

Vol. 5 | No. 1 | Januari - Maret 2009

Jurnal *Sosial Demokrasi*

Dari Wall Street Ke All Streets

**Krisis Keuangan Global dan Kapitalisme
Bagaimana dengan Indonesia?**

ISSN 1978-9084



9 77 978 908490

KITA MAU KEMANA?
NGAPAIN?
DAN MAU DIAPAIN?

NGGAK TAU!
KARENA SAYA BINGUNG
MAKA SAYA
IKUTAN AJA!

IEDOLOGI?

Campur sana. Campur sini. Tarik sana. Tarik sini. Saling rayu.
Ideologi jadi buram maknanya.
Suara rakyat untuk siapa? Dan untuk apa?
Apa jadinya jika pembangunan tanpa ideologi?

Iklan Layanan ini dipersembahkan

Jurnal
Sosial Demokrasi

Jurnal Sosial Demokrasi

Daftar Isi

Editorial

Wall Street runtuh Indonesia [4]

Laporan Utama

Transkrip Diskusi

DARI "WALL STREET" KE "ALL STREET": KRISIS KEUANGAN GLOBAL DAN BAGAIMANA DENGAN INDONESIA? [6]

Laporan Utama

KRISIS KEUANGAN GLOBAL: DAMPAK BAGI INDONESIA DAN SOLUSI SOSDEM [28]

Artikel

Martin Manurung >> Krisis Finansial Global: Dari Wall Street ke All Streets dan Respons Indonesia [32]

Artikel

Yanuar Rizky >> Makna Krisis Finansial Global Bagi Negara Berkembang: Penyebab Krisis Sektor Riil atau Peningkat Terbaikannya Sektor Riil Di Politik Ekonomi Negara? [40]

Artikel

CHRISTOPHER RUDE >> Krisis Finansial Global: Apa yang Perlu Dilakukan? [48]

Artikel

Ivan A Hadar >> REORIENTASI PARADIGMA EKONOMI [56]

Artikel

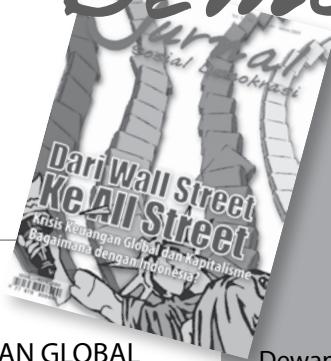
Rudof Traub-Merz >> Krisis Keuangan Global: Cina Andalkan Ekonomi Domestik untuk Hadapi Krisis Keuangan Global [58]

Artikel

Jochen Steinhilber >> Krisis Keuangan: Apakah Brasil Luput dari Bahaya? [61]

Resensi

KRISIS FINANSIAL GLOBAL DAN UPAYA PENCARIAN ALTERNATIF [63]



Dewan Redaksi

Ketua : Amir Effendi Siregar
Wakil Ketua : Ivan Hadar
Anggota : Faisal Basri
Mian Manurung
Nur Iman Subono
Arie Sujito

Pelaksana Redaksi

Koordinator : Azman Fajar
Redaksi : Puji Riyanto
Launa

Alamat Redaksi

Jl. Kemang Selatan II No.2A
Jakarta 12730
Telp. 021 -719 3711 (hunting)
Fax. 021 - 7179 1358

Jl. Mampang Prapatan XIX No.34
Mampang - Jakarta Selatan
Telp/Fax. 021 - 798 4559

Ilustrasi*

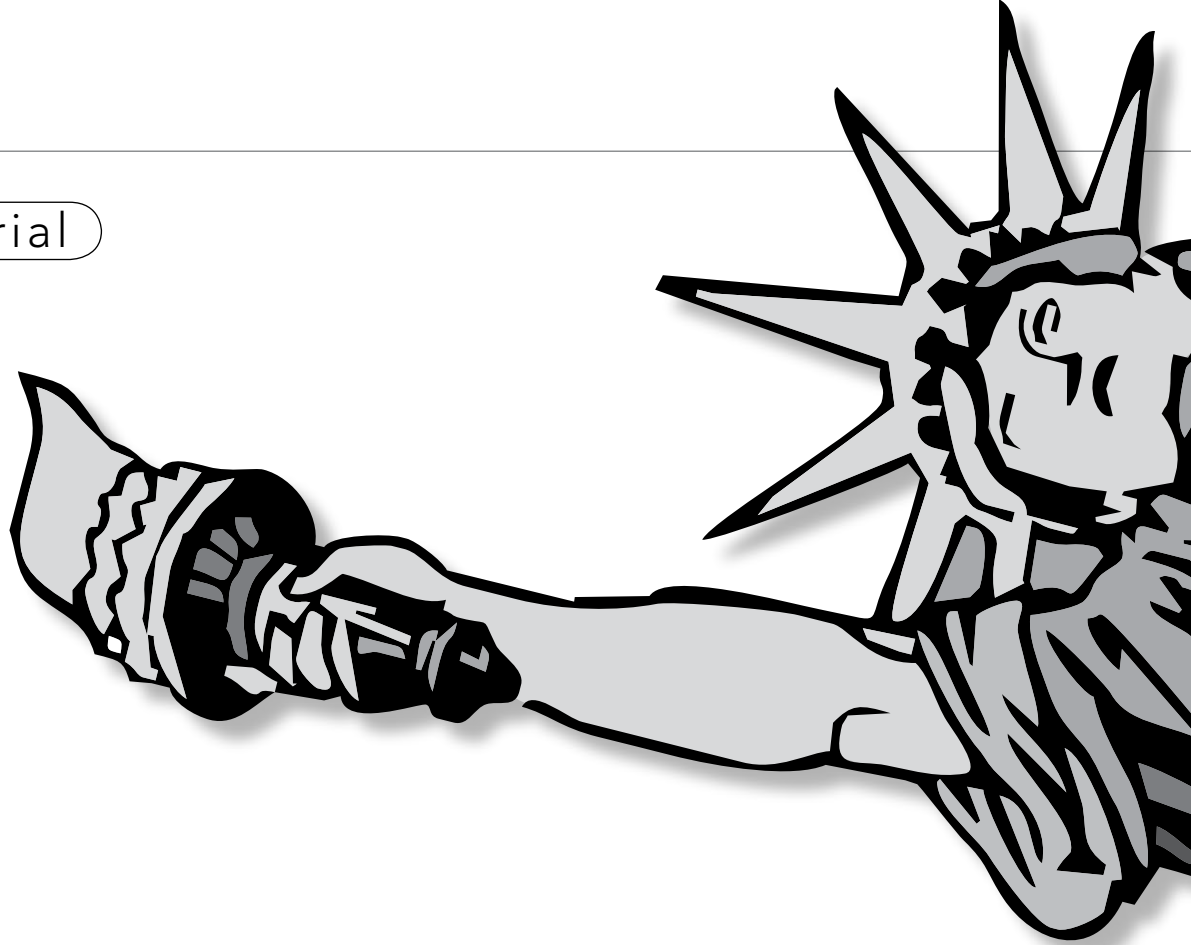
Kuss Indarto
Friedrich-Ebert-Stiftung

Penerbit

Pergerakan Indonesia dan Komite
Persiapan Yayasan Indonesia Kita

ISSN: 1978-9084

*) Dilarang mengkopi dan memperbanyak
ilustrasi tanpa seijin Friedrich-Ebert-Stiftung



Wall Street runtuh Indonesia

Ekonomi pasar bebas telah gagal!! Begitulah komentar berbagai kalangan merespons rontoknya *Wall Street* akibat kebangkrutan perusahaan finansial. Nama-nama besar seperti Lehman Brothers, American International Group (AIG), Merrill Lynch, Goldman Sachs sudah lempar handuk. Wall Street yang selama ini dikenal dunia sebagai simbol kedigdayaan ekonomi kapitalis dan suksesnya ekonomi pasar bebas, kini, tak berdaya. Tanpa *bail out* pemerintah, krisis keuangan yang menimpa Wall Street tidak hanya melumpuhkan ekonomi AS, juga menyeret ekonomi dunia ke dalam resesi. Kondisi ekonomi AS saat ini ditandai inflasi

tinggi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, angka pengangguran yang melonjak, serta defisit bujet dan defisit neraca pembayaran yang terus membengkak. Krisis subprime mortgage mengakibatkan ketatnya likuiditas dan bangkrutnya perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, serta ambruknya harga saham dan surat utang di *Wall Street*. Inilah krisis keuangan paling besar setelah *Great Depression* pada 1929. Waktu itu, pasar modal ambruk. Bank investasi dan bank komersial bangkrut. Nasabah hanya bisa menarik separuh dananya dari bank. Perusahaan finansial di luar bank gulung tikar. Prediksi akan jatuhnya

ekonomi Amerika kedalam jurang yang tajam telah membuat pemerintah US terpaksa menyiapkan dana talangan 700 milyar dollar. Semuanya akibat sistem kapitalisme liberal sebagaimana halnya di Indonesia.

Apa sesungguhnya yang terjadi? Krisis ini bermula dari macetnya kredit perumahan di Amerika karena ternyata para pemilik rumah memang tak mampu membayar cicilan kredit. Kemacetan itu merembet ke mana-mana, terutama menimbulkan krisis keuangan di Amerika, dan kemudian berdampak ke berbagai belahan dunia.

Keguncangan *Wall Street* bermula dari krisis *subprime mortgage loan*, yakni



Wall Street bankrupt **Indonesia**

Free market economy has failed! So is the comment from various societies responding to the collapse of the Wall Street due to the bankruptcy many financial companies. Big names like Lehman Brothers, American International Group (AIG), Merrill Lynch, Goldman Sach are throwing the towel. Wall Street, which is known as a symbol of the world capitalist economy and the main actor of the successful free market economy, now, has no power at all. Without a government bailout, the financial crisis that befall Wall Street does

not only paralyze the U.S. economy, but also dragged the world economy into recession as well. U.S. economic conditions at this time are marked by high inflation, slower economic growth, and high rates of unemployment, budget deficit and balance of payments deficit which continue to swell. Sub prime mortgage crisis resulted in strict liquidity and the bankruptcy of some companies engaged in the financial sector, and the fall of stock prices and bond in the Wall Street. This is the biggest financial crisis after the Great Depression in

1929. At that time, the capital market collapsed. Investment and commercial bank went bankrupt. Now, customers can only withdraw half of their funds from the bank. Non-bank financial companies when into bankrupt. Experts say that the crisis will bring US into a ravine sharp; therefore the US government has been forced to provide a fund around 700 billion dollars. This is the effect of the liberal capitalism system and the same goes for Indonesia.

But, what exactly has happened? This crisis started from the stagnation of housing credit in

kredit pemilikan rumah (KPR) kepada para debitor menengah bawah yang hidupnya sangat bergantung pada pendapatan tetap yang pas-pasan. Ketika inflasi membengkak, mereka tidak bisa lagi mampu membayar bunga dan cicilan pokok. Situasi yang sudah dimulai sejak sekitar lima tahun silam itu akhirnya meledak pertengahan 2007. Nilai surat berharga dengan underlying asset subprime mortgage merosot tajam, sehingga tidak bisa dijual pada harga wajar. Dalam kenyataan, nilai pasar yang wajar sulit diketahui karena banyak dan bervariasi derivasi dari surat berharga dengan basis *subprime mortgage*. Total kerugian investasi di *subprime mortgage* mencapai lebih dari US\$ 800 miliar, bahkan ada yang memperkirakan jauh di atas US\$ 1 triliun. Perkiraan bahwa krisis *subprime mortgage* segera berakhir tidak terbukti. Satu demi satu, perusahaan finansial mengumumkan kerugian akibat investasi di berbagai derivasi *subprime mortgage* yang bernilai triliunan dolar AS. Ketika harga *subprime mortgage* ambruk, utang melonjak tajam, jauh melebihi aset. Kerugian itulah yang kini harus ditolong oleh semua pembayar pajak, termasuk mereka yang selama ini tergolong hidup susah. Sekitar lima tahun terakhir, ekonomi AS sesungguhnya tidak lagi sehat. Daya beli masyarakat menengah bawah relatif tetap, bahkan sebagian mengalami penurunan.

Indonesia sudah mulai merasakan imbas krisis di Amerika dengan jatuhnya indeks di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Apalagi, siapa pun tahu, bahwa para pemain di BEJ didominasi asing. Kalau mereka menarik investasi jangka pendek itu karena suatu keperluan di negerinya yang sedang dilanda krisis, BEJ bisa jadi pasar loak. Hentakan krisis terlihat setelah dibuka sesi perdagangan pada pagi hari Bursa Saham di Jakarta, terjadi penurunan yang amat sangat. Hingga akhirnya pihak BEJ menutup perdagangan pada siang harinya, dan penutupan ini belum tahu sampaikan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kondisi indeks perdagangan Eropa dan Amerika serta kawasan Asia lainnya juga ikut menurun. Penurunan nilai indeks saham di BEJ ini, adalah merupakan penurunan yang terbesar dan sekaligus memecahkan rekor sebelumnya. Demikian juga dengan bursa saham di Australia juga menurun tajam. Bahkan bursa Hen Seng di Hongkong juga ikut-ikutan turun dengan sangat besar nilainya.

Mungkin terlalu dini untuk menggambarkan bahwa perekonomian Amerika akan *kolaps* sebagaimana Indonesia dan beberapa negara di Asia pada tahun 1980-an, akan tetapi tetaplah harus dilihat secara riil bahwa tata kelola perekonomian negara haruslah secara benar menerapkan sistem pengelolaan ekonomi yang berbasis pada sektor riil yang secara nyata menunjang perekonomian negara melalui keikutsertaan masyarakat. Mengutip pendapat Faisal Basri pada Jurnal Sosdem edisi pertama, maka perekonomian yang tepat bagi Indonesia adalah perekonomian yang mengikutsertakan masyarakat dalam jalannya sistem ekonomi dengan menerapkan Ekonomi Pasar Sosial dimana kesempatan untuk melakukan usaha ditopang

the United States, which caused the underpaid house owner could not afford the installment credit. This bottleneck then has spread out everywhere. It especially caused the financial crisis in the United States, which has had the impact to various parts of the world. The Wall Street's turmoil began from the sub prime mortgage loan crisis such as; housing credit to the debtor came from the working middle class. These people live from the low income. This situation has already started since five years and eventually exploded in the mid year 2007. The value of bonds with sub prime mortgage underlying assets had fallen sharply, so that it can not be sold at reasonable price in the market. In fact, the fair market value is unpredictable and difficult to know because there are lot of varieties bonds derivatives with sub prime mortgage basis. Total losses in the sub prime mortgage investment reached more than US\$ 800 billion, even if that number is far below US\$ 1 trillion. The prediction which says that the sub prime mortgage crisis will end soon is not proven. One by one, financial companies announced their financial loss due to investment in various derivatives products, whose value billions US dollars. When the price of subprime mortgage collapsed, debt increased sharply, far exceed the assets. Those losses must now be fed by all taxpayers, including those who are poor and living in the difficult situation. Since the last five years, the US economy is no longer healthy. Consumer's buying power especially from the the middle class is relatively stable, but some are decreased.

Indonesia has already begun to feel the impact of this crisis since the fall of the index at the Jakarta Stock Exchange (BEJ). Because everyone knows that the key players in BEJ are dominated by foreign companies. If they withdraw short-term investment in a huge amount due to the crisis in their home country, BEJ could be a flea market. The impact of this crisis could be seen after trading session opened in the morning at the Jakarta Stock Exchange, they saw an intense decline. Finally BEJ had to close the stock trade on that day and no one knew when it would be opened again. This situation is of course connected to the ones in Europe, the US and other Asia countries, whose stock market index was also decreased. This decline is the worst and record-breaking in the BEJ history. Similarly, the stock exchange in Australia also declined sharply. Even the stock market Hen Seng Hong Kong also dropped to a very low level.

May be it is too early to say that the US economy will collapse in the same manner as Indonesia and some Asian countries collapsed in the 1980's. But it should be seen that the real economy system must apply the correct management system based on the real sector economic which significantly supports the national economy growth through participation of the society. Faisal Basri asserts in the first edition of Journal Sosdem that the proper economy system for Indonesia is to include the society in the economic by implementing Social Market Economy, where the opportunity to make business supported by the strength of the people. The phenomenon described above clearly indicates that the United States are experiencing a "economic abstraction", because of their mistakes in providing

oleh kekuatan rakyat. Fenomena yang dijabarkan diatas jelas menunjukkan bahwa Amerika mengalami abstraksi ekonomi akibat kesalahan dalam penyakuran kredit yang notabennya adalah untuk sektor konsumtif dan bidang yang lebih didominasi oleh sektor jasa sebagaimana Indonesia pra krisis moneter pada tahun 1998.

Satu hal yang bisa kita catat dari perjalanan krisis kali ini adalah bahwa kegagalan Pasar Bebas melalui kehancuran *Wall Street* menunjukkan bahwa ekonomi pasar bebas yang diagungkan tidak mampu meningkatkan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang sudah dicapai. Kehancuran *Wall Street* mengisyaratkan pentingnya peran pemerintah bahkan intervensi pemerintah. Resesi yang terjadi akibat krisis membuat masyarakat kelas bawah akan terkena dampaknya. Apalagi pada Indonesia yang hingga saat ini masih menganut sistem kapitalisme yang cuma menguntungkan segelintir kaum pemodal besar. Kekayaan mereka melonjak berlipat-ganda. Sementara mayoritas rakyat bertambah miskin. Itu sudah terbukti selama ini dan terjadi di mana saja sistem kapitalisme dipraktekkan, termasuk di Amerika Serikat. Lihat bagaimana rakyat kecil mati terjepit karena berebutan zakat, mati karena kurang gizi atau kelaparan. Itulah yang terjadi selama ini

Last but not least, Andre Gunder Frank salah satu tokoh pengusung teori Dependencia pernah berujar "Negara maju mungkin saja tidak berkembang, akan tetapi mereka tidak mengalami keterbelakangan." Mungkinkah fenomena ini yang sedang terjadi saat ini? Wallahualam, untuk itu Redaksi mengucapkan selamat membaca dan sambil menggali kiranya fenomena apa yang sebenarnya terjadi dalam relevansinya dengan krisis finansial yang ada diantara kita semua.

Azman & Launa
Redaksi Jurnal Sosdem

huge credits for consumer and because the economy is dominated by the service sector as well as happened in Indonesian during the monetary crisis in 1998.

One thing we can note from the current financial crisis is that the failure of free market economy shown by the downfall of the Wall Street shows that this kind of economic system was not able to increase and sustain the economic growth and failed to achieve people's welfare. The destruction of the Wall Street shows how important the role and intervention of the government in a country. Recession caused by the crisis affected the people from lower class too. Moreover in Indonesia, which until now still implementing the capitalism system that benefits only a small segment of the population, i.e. the big capitalists. Their wealth is soaring dramatically, while the economic condition of the majority of poor people is getting worst. Proof of the pudding is in the eating, in a country which capitalism practiced anywhere show this case including in the United States. See some cases recently in Indonesia where people die when queuing food and tithe and also because of hunger and malnutrition. That's happened many times.

Last but not least, Andre Gunder Frank, one of the prominent of Dependencia theory once said "Industrialized countries may not develop, but they don't experience backwardness." Is it possible that this phenomenon is happening at this time? Only God knows. Therefore the editor team wishing you to have an enjoyable reading and meanwhile you may find out another explanation and its relevance to the financial crisis among us all.

Azman & Launa
Editors Jurnal Sosdem





Transkrip diskusi

DARI “WALL STREET”

KRISIS KEUANGAN GLOBAL DAN BAGAIK

Pengantar

Juan Somavia, Direktur Organisasi Buruh Sedunia (ILO), mengingatkan bahwa krisis finansial yang terjadi saat ini bukan semata-mata pada Wall Street, melainkan all streets. Ini bermakna bahwa krisis finansial tidak saja potensial untuk menular pada sektor lain dalam perekonomian satu negara, melainkan juga pada negara-negara lain dan dapat bersifat multisektoral.

Bagi Indonesia, dampak krisis tersebut dapat diamati melalui sektor-sektor yang menjadi “jendela” bagi transmisi krisis finansial global menjadi krisis ekonomi domestik. Meskipun tidak berarti bahwa hal tersebut tidak dapat diatasi. Pemahaman yang menyeluruh atas anatomi krisis, sebagaimana telah diuraikan di atas, akan membantu pembuatan kerangka kebijakan yang tepat sasaran dan lebih berpengaruh pada masyarakat.

Untuk itulah, Jurnal Demokrasi Sosial edisi kelima mengambil krisis finansial global tersebut sebagai topik yang akan diangkat dalam edisi kali ini. Untuk itu, beberapa orang telah diundang dalam diskusi tersebut diantaranya adalah Yanuar Rizky

KE “ALL STREET”: IMANA DENGAN INDONESIA?

(analisis pasar modal) dan Wandy “Binyo” Nicodemus Tuturoong (praktisi pasar modal), dan Martin Manurung, Repdem sebagai narasumber dalam diskusi tersebut. Jurnal juga mengundang beberapa orang sebagai peserta aktif, yakni Dominggus Oktavianus dari Papernas, Giri Sandra (ketua DPP PBR Bali dan ketua Litbang Papernas), Aggito (Masyarakat Universal Lintas Agama), Ulfa Yulia (Papernas), Timbul Siregar (Ops), Ridwan Manoarfa dan Roni Febrianto dari Serikat Pekerja Metal Indonesia. Diskusi dihadiri oleh seluruh Redaksi Jurnal Sosial Demokrasi serta Erwin Schweissheim, selaku Resident Director Friedrich-Ebert-Stiftung.

Ada tiga pertanyaan pokok yang akan didiskusikan dalam kesempatan kali ini, yakni (1) bagaimana krisis keuangan terjadi? (2) apa yang menjadi faktor penyebabnya?; bagaimana respon pemerintah terutama 10 “direktif” arahan SBY agar ekonomi Indonesia tidak terkena dampak krisis?; Apakah tawaran Sosdem dalam mengatasi persoalan tersebut?; dan bagaimana gerakan Sosdem harus mengambil strategi dan taktik untuk menghadapi krisis finansial dan kemungkinan krisis ekonomi?

Mian Manurung

Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, terima kasih atas kehadiran dan waktunya untuk memenuhi undangan dari FES. Sebagaimana biasanya, hari ini kita akan berdiskusi, untuk bahan Jurnal Sosdem edisi kelima yang TOR-nya sudah dibuat oleh Saudara Martin Manurung. Judulnya sangat menarik saya kira dari “Wall Street ke All Street”. Diskusi ini akan direkam, oleh karena itu, saya meminta agar kawan-kawan bisa berbicara lebih jelas. Diskusi ini akan dimoderasi oleh Bung Ivan A. Hadar. Untuk menghemat waktu ada baiknya kita beri kesempatan untuk Saudara Martin mengawali presentasinya terlebih dahulu. Bagi semua yang hadir di sini saya kira akan menjadi peserta aktif yang dapat memberikan masukan ataupun kritikan secara terbuka di dalam forum diskusi ini. Selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya ke Bung Ivan untuk memimpin diskusi. Terima kasih.

Ivan A. Hadar

Terima kasih banyak. Tadi, kita lihat ada display 40 tahun FES. Terima kasih kepada FES yang telah memberikan banyak fasilitas kepada kita. Nah, kita akan mendiskusikan topik yang sangat menarik. Seperti telah ditulis oleh Martin Manurung dalam TOR dengan judul: “Dari Wall Street ke All Street: Krisis Finansial Global Dampak Terhadap Indonesia dan Respon Sosial Demokrasi”.

Secara singkat, krisis keuangan telah ditulis panjang lebar dalam makalah Martin. Dalam kesempatan diskusi malam ini, akan ada dua orang presenter, yakni selain Martin ada Bung Yanuar yang dalam waktu belakangan sering muncul di televisi sebagai analisis dan komentator krisis keuangan global.

Krisis yang sekarang ini terjadi berbeda dengan krisis tahun 1997. Jika krisis tahun 1997 Asia yang menjadi tempatnya, maka sekarang ini Amerika Serikat yang menjadi pusat krisis. Beberapa orang mengatakan bahwa



Amerika sudah lemah belakangan ini, tetapi ketika negara tersebut kena “flu”, “batuk-batuk” atau mungkin radang tenggorokan atau paru-paru maka dampaknya kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Artinya, Amerika belum terkalahkan meskipun kita belum dapat mengetahui apa yang akan terjadi pada masa datang.

Sekarang ini, ada kekuatan-kekuatan baru yang muncul, yang disebut-sebut paling mantap, yakni Cina. Dilihat dari cadangan devisa merupakan yang paling banyak di dunia, dan yang paling kuat melakukan fiskal stimulus. Tadi, Bung Yanuar mengatakan bahwa ketika di Cina harga saham anjlok maka pemerintah melakukan intervensi dengan membeli saham-saham tersebut. Di Indonesia, meskipun konon katanya jumlah devisanya banyak, sekitar 50-54 milyar US dolar, tetapi fungsinya tidak begitu banyak karena lebih ditujukan untuk menjaga inflasi, rupiah, dan lain sebagainya yang tidak

mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan yang produktif, kaitannya dengan sektor riil. Nah, kita nanti bisa menanyakannya kepada Martin atau Yanuar mengapa begitu?

Indonesia sebagai negara besar tampaknya dari segi geografis, market, dan lain sebagainya belum sebesar dari segi kuantitas tadi. Meskipun begitu, konon katanya, ada sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan Indonesia. Jika dilihat dari ideologi, maka ada Deng Xio Ping yang pernah bilang, “Tidak penting kucingnya hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus”. Mungkin ini merupakan ideologi pragmatis, dan yang sekarang dilakukan Amerika. Bush yang sangat neoliberal, tetapi melakukan pembelian (bail out) bank-bank yang mengalami kebangkrutan sehingga minimal separuhnya menjadi bank BUMN. Jadi, ada suatu transformasi ideologis dan dunia mempunyai kecenderungan semacam itu, yakni melakukan intervensi

negara. Sosial demokrasi mungkin akan mulai berjaya lagi menggantikan neoliberal yang sebelum mengambil kepemimpinan.

Saya tidak akan panjang lebar. Saya persilahkan Martin untuk presentasi.

Martin Manurung

Sebenarnya, saya mengharapkan ada Bang Faisal (Faisal Basri) dalam kesempatan ini karena ketika saya menjadi moderator pertemuan di Yogyakarta dia berkomentar yang tidak dapat saya bantah karena posisi saya sebagai moderator sehingga tidak memungkinkan ikut berdebat.

Pada waktu itu, Bang Faisal bilang, “Dalam sistem ekonomi kapitalis terdapat *self adjusting mechanism* yang sifatnya cepat dan instan, *spontaneous*”. Oleh karena itu, menurut Bang Faisal, situasi yang ada sekarang ini, orang-orang progresif dan kiri sudah capek-capek atau menurut komentar Bang Faisal genit memaki-maki *neolib*, tetapi

ternyata bisa sembuh dengan cepat. Padahal, menurut saya, krisis ini masih, kalau dalam bab-bab buku, baru sebatas bab pendahuluan, belum menyentuh ke tingkat yang paling parah dan belum menular ke sektor lain dalam perekonomian. Barangkali, di negara-negara yang berada dalam episentrum krisis sudah terjadi penularan, tetapi di Indonesia masih merupakan gejala. Pertanyaannya sebenarnya adalah seberapa besar krisis ini?

Saya dengan teman-teman berkumpul sejak akhir tahun lalu sejak *subprime mortgage* pecah. Kita diskusi dari mulai 3 hingga 4 orang kemudian meluas menjadi sekitar 10-15 orang dengan latar yang berbeda. Diantaranya ada yang belajar ekonomi, pelaku pasar, sejarawan, pemerhati, dan lain sebagainya. Kita sudah mulai merasakan meskipun belum ada datanya bahwa ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Bagi Indonesia, seberapa besar dampaknya juga belum kita ketahui, tetapi *soon or later* dampak itu akan sampai ke Indonesia dan jika tidak mempersiapkan diri, maka kita akan terjerumus seperti 10 tahun yang lalu.

Mengenai data kuantitatif, ketika *subprime mortgage* pecah, beberapa ekonom mengatakan 700 milyar dollar tingkat kapitalisasi yang mungkin harus dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian, Norial Rubini bilang 1 triliun dan beberapa bulan kemudian bilang 2 triliun, yang terakhir 14 Oktober 2008 sebesar 3 triliun dollar. Angka-angka tersebut ongkos yang harus ditanggung oleh krisis ini.

Secara kualitatif, kita bisa melihat bahwa dalam sejarah perekonomian dunia, global, dan Amerika maka kita melihat bahwa lembaga-lembaga keuangan Amerika yang besar-besar tersebut ketika krisis bahkan *the great depression* pun mereka selamat. GP Morgan, City Group, Lehmann Brothers, dan yang lainnya masih selamat. Namun, krisis kali ini tidak mampu mereka bendung, dan akhirnya

tumbang sehingga harus di-*bail out* oleh pemerintah. Jadi, secara kualitatif, kita bisa bayangkan meskipun angka-angka tadi sangat bervariasi, tetapi krisis ini sangat besar dan signifikan.

Nah, pertanyaannya kemudian, apakah yang menjadi penyebab krisis? Ada dua kelompok. Pertama, pasar keuangan yang dibuat bebas bahkan regulasinya dihapuskan yang terjadi pada akhir pemerintahan Clinton sehingga bank umum dan lembaga keuangan bisa menjadi satu institusi. Akibatnya, mereka bebas bermain, mengakumulasi uang masyarakat dan mempermainkannya sedemikian rupa sehingga mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Pendapat kedua mengatakan bahwa krisis terjadi karena defisit keuangan pemerintah yang sangat besar. Nah, penyebabnya adalah perilaku pemerintah yang *big spender* seperti Perang Irak, yang menurut Stiglitz, sebesar 3 triliun dolar. Nah, inilah yang menjadi penyebab inflasi tinggi dan pengurangan daya beli masyarakat serta *economic growth* yang *stagnan* sejak pemerintahan Clinton. Diluar kedua pendapat tadi, para penganut Marxian mengatakan bahwa tanpa dua hal itu pun perekonomian kapitalis pasti akan mengalami krisis. Ini karena karakteristik yang *inherent* dalam dirinya yang selalu memproduksi lebih. Pada waktu terjadi *great depression* terjadi *over capacity*, sekarang terjadi *over accumulation*. Jadi, perekonomian yang selalu memproduksi melebihi kapasitasnya membuat kesenjangan meningkatkan, *purchasing power* masyarakat turun sehingga barang yang berlebih tidak dapat dibeli sehingga terjadilah krisis. Dalam krisis finansial sekarang, kita bisa melihat begitu banyak produk keuangan sehingga orang yang tidak membutuhkan pun membeli produk tersebut. Akhirnya, hal ini berakibat pada pemotongan *spending* mereka.

Pada waktu terjadi *great depression* terjadi *over capacity*, sekarang terjadi *over accumulation*. Jadi, perekonomian yang selalu memproduksi melebihi kapasitasnya membuat kesenjangan meningkatkan, *purchasing power* masyarakat turun sehingga barang yang berlebih tidak dapat dibeli sehingga terjadilah krisis. Dalam krisis finansial sekarang, kita bisa melihat begitu banyak produk keuangan sehingga orang yang tidak membutuhkan pun membeli produk tersebut. Akhirnya, hal ini berakibat pada pemotongan *spending* mereka.

dan lain sebagainya.

Menurut kaum neoliberal, krisis bukan karena kurangnya regulasi, tetapi lebih disebabkan oleh orang-orang rakus saja. Padahal, kerakusan manusia ini, yang nanti bisa kita lihat, bukan sub-produk yang tidak diciptakan karena dalam perekonomian kapitalis jika tidak rakus maka kamu akan mati. Contohnya, tulisan di majalah **The Economist** yang mengkuatkan respon terhadap krisis di Amerika dan Eropa yang memberikan

peran besar terhadap negara. Mereka takut karena negara yang terlalu mengatur pasar akan juga merugikan.

Menurut saya, krisis terjadi karena tiga faktor. Pertama, hakikat pasar finansial yang senantiasa memproduksi *bubble*. Kedua, keterputusan sektor finansial dan sektor riil. Ketiga, lemahnya peranan negara dan salah arah. Untuk yang kedua, sebenarnya kita bisa meng-update-ekonomi politik Marxian yang selama ini dianut dengan model M-G-M (*Money-Comodity-Money*). Nah, dalam sistem sekarang ini, model M-G-M sudah tidak *up to date* karena yang ada adalah model M-M karena terjadi dikotomi antara sektor finansial dengan sektor riil sehingga uang bisa menciptakan uang tanpa proses produksi.

Wandy "Binyo" Nicodemus

Inti krisis finansial sekarang ini sebenarnya terletak pada *money supply* lebih banyak ke financial sector, dan uang yang ada di sektor produktif semakin terserap ke dalam sektor finansial. Akibatnya, bangunan ekonomi yang fundamental rapuh dan akhirnya patah. Mengapa bisa terjadi struktur bangunan ekonomi yang semacam ini maka kita harus merunut ke proses *money creation*-nya.

Sistem keuangan yang dikembangkan sekarang, khususnya yang dikembangkan oleh the Fed secara *inheren* akan menciptakan kondisi seperti sekarang, yakni ke sektor finansial. The Fed merupakan institusi swasta yang didirikan oleh Rockefeller ataupun GP Morgan. Sistem yang dikembangkan the Fed yang kemudian digunakan oleh Bank International of Settlement menghasilkan *debt money* bukan *free money*. Sistem perbankan yang dianut dan berkembang sekarang, pemerintah tidak boleh mencetak uang, tidak boleh memproduksi uang sendiri, yang boleh mencetak uang adalah Bank Central. Namun, caranya adalah pemerintah harus berhutang pada Bank Central dengan bunga jika di

Amerika sekitar 6%, maka uang tersebut baru bisa dikeluarkan. Di sini, dikenal dengan obligasi. Setiap pemerintah membuat obligasi, yang kemudian dibeli oleh perbankan dan dijadikan aset untuk memberikan kredit, dan kredit itulah yang sebenarnya uang baru. Inilah yang terjadi dalam the Fed. Setiap uang beredar maka sebenarnya pemerintah berhutang kepada the Fed. Jadi, sebenarnya, ini merupakan sistem berhutang, dan tentu saja setiap hutang pasti ada bunganya. Nah, karena bunga hutang harus dibayar padahal jumlah uang beredar tetap maka negara akan terus-menerus berhutang kepada the Fed, dan pihak bisnis yang mendapatkan uang ini-mendapatkan hutang ini, secara natural harus menghasilkan bunga yang lebih tinggi agar bisnisnya bisa *survive*. Ini berarti bahwa menanam investasi di sektor riil tidak menarik. Selain *return*-nya kecil, kepala juga pusing, buruh suka demo, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, daripada uang ditaruh di sektor riil maka lebih baik ditaruh di pasar finansial. Kita bisa mendapatkan uang lebih cepat dalam jumlah banyak. Meskipun di Indonesia investor di sektor finansialnya berjumlah 298.000 investor dengan kapitalisasi tahun 2007 akhir sekitar 100 Milyar dolar. Duit begitu banyak, tetapi dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Sistemnya memang begitu. *Debt money* inilah yang sebenarnya ditolak oleh kelompok reformis di Amerika Serikat. Mereka setuju dengan *free money* karena pemerintah mempunyai hak untuk mengeluarkan uang yang dapat disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia dan jumlah penduduk maupun aset serta potensi *growth*-nya sehingga tidak akan terjadi *inflectionary*.

Oleh karena itu, jika sistem ini diteruskan, maka akan mengalami kerontokan pada masa yang akan datang. Mengapa begitu? Seperti telah dijelaskan di awal, untuk mencetak uang, pemerintah harus berhutang. Menurut hitungan John Williams yang dapat dilihat dalam website-nya

Sistem yang dikembangkan the Fed yang kemudian digunakan oleh Bank International of Settlement menghasilkan *debt money* bukan *free money*. Sistem perbankan yang dianut dan berkembang sekarang, pemerintah tidak boleh mencetak uang, tidak boleh memproduksi uang sendiri, yang boleh mencetak uang adalah Bank Central. Namun, caranya adalah pemerintah harus berhutang pada Bank Central dengan bunga jika di Amerika sekitar 6%, maka uang tersebut baru bisa dikeluarkan. Di sini, dikenal dengan obligasi.

shadow government statistic yang selalu merilis statistik yang menurut dia lebih tepat tentang inflasi, *money supplier* dan sebagainya di Amerika. Menurutnya, sekarang ini, pemerintahan federal Amerika Serikat utangnya di atas 10 triliun dolar, belum termasuk obligasi dan kewajiban untuk membayar obligasi segala macam. Jika utangnya ditambah lagi untuk menutupi krisis kapitalis, pemerintah harus berhutang lagi untuk *baillout* sebagaimana tadi telah

Setiap uang beredar maka sebenarnya pemerintah berhutang kepada the Fed. Jadi, sebenarnya, ini merupakan sistem berhutang, dan tentu saja setiap hutang pasti ada bunganya. Nah, karena bunga hutang harus dibayar padahal jumlah uang beredar tetap maka negara akan terus-menerus berhutang kepada the Fed, dan pihak bisnis yang mendapatkan uang ini- mendapatkan hutang ini, secara natural harus menghasilkan bunga yang lebih tinggi agar bisnisnya bisa *survive*.

dijelaskan Martin, maka diperkirakan bahwa pajak yang harus dibayar oleh orang Amerika adalah 100% dari penghasilannya untuk bisa membayar utang dan cicilannya. Oleh karena itu, secara matematis, sudah tidak dapat di *bail out* lagi jika masih menggunakan sistem *debt money*.

Amir Effendi Siregar

Sekedar klarifikasi, mengapa sistem tersebut yang digunakan? Jika *free money* logis, tetapi untuk *debt money* mengapa sistem ini yang digunakan? *Basic*-nya dimana?

Wandy "Binyo" Nicodemus

Debt money ini digunakan sejak 1913, dan mengapa dipakai karena menguntungkan swasta besar yang sangat berkuasa.

Martin Manurung

The Fed didirikan oleh lembaga keuangan dan businessman besar di Amerika, dan mereka menginginkan uang dalam jumlah besar dan gratis. Dalam sejarahnya, ketika perang sipil terjadi pemerintah mencetak uang, tetapi setelah itu balik lagi ke sistem yang sekarang.

Amir Effendi Siregar

Pertanyaan apa dasar filosofi *debt money*?

Wandy "Binyo" Nicodemus

Sistem yang mereka buat menguntungkan the Fed. Mereka bukan pemerintah, tetapi swasta. Tujuannya bisnis, dan bisnis selalu mencari untung. Mereka mempunyai lobi yang sangat kuat. Sebelum munculnya undang-undang the Fed tahun 1913. Sampai tahun '30-an, demonstrasi untuk menentang *debt money* dan tuntutan menasionalisasi the Fed ini masih sangat besar. Namun, sejak Perang Dunia Kedua, wacana ini sudah berhenti sehingga orang *taken for granted*. Sesuatu yang *given* dan sudah tidak dipertanyakan lagi. Sekarang ini, mulai dipertanyakan lagi karena orang melihat bahwa sistem ini akan runtuh. Sekarang ini, diam-diam the Fed ingin membuat *free money*. Namun, dengan cara yang bermacam-macam.

Martin Manurung

Nah, sebelum kita masuk ke perdebatan itu sekarang mari kita lihat kondisi Indonesia. Jika kita lihat untuk kasus Indonesia, maka aktornya yang dapat membuat dampak dan membuat krisis finansial di Indonesia semakin buruk, yakni Depkeu, moneter. Namun, menurut saya, yang paling krusial adalah kepemimpinan nasional. Pemimpin

nasional kita tidak memahami anatomi krisis sehingga tidak mengetahui dengan baik apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis finansial yang ada di luar maka sebenarnya, menurut saya, kekuatan ekonomi kita terlalu kecil untuk mempengaruhi apa yang ada di luar likuiditas ketat ini. Menurut saya, yang harus diurus bukan likuiditas ketatnya dulu, tetapi bagaimana menyelamatkan sektor riilnya. Ini karena kita terlalu kecil untuk mempengaruhi apa yang terjadi di tingkat global. Di sisi lain, barangkali, bukan anatomi yang memang tidak dipahami, tetapi persoalannya adalah pemerintah juga tidak sependapat apakah kita akan terseret krisis dan mendapatkan imbas dari krisis global tersebut. Ini dapat dilihat ketika SBY mengatakan 10 langkah untuk menangkalkan krisis, maka besoknya Yusuf Kalla mengatakan, "Memangnya kita ada krisis?". Akibatnya, kita dibuat bingung. Ada yang bilang fondasi ekonomi kita kuat, tetapi tiba-tiba Sri Mulyani mengatakan bingung mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu buruh ataukah sektor riil?

Persoalannya, seperti saya bilang, kita terlalu sibuk menangani ekspor, sistem pembayaran global yang menghabiskan sekian trilyun (6,3 trilyun) untuk *buy back*. Padahal, masalahnya bukan di situ atau mungkin di situ, tapi di luar kendali kita. Menurut saya, yang paling mungkin kita kontrol devisa bukannya memfasilitasi dana tambahan supaya praktik tersebut bisa tetap berlangsung. Ini sangatlah lucu. Oleh karena itu, yang paling penting adalah faktor-faktor yang bisa diurus inilah yang seharusnya diselamatkan pemerintah, *capital flow* harus diselesaikan dengan kontrol devisa. Bagaimanapun pemerintah harus segera menangani sektor riil yang tiarap. Ini juga merupakan langkah penting. Di sini, menyelamatkan sektor riil bukannya mengeluarkan SKB 4 menteri dan langsung ke buruhnya karena hambatan sektor riil banyak.

Ini dapat dilihat ketika SBY mengatakan 10 langkah untuk menangkal krisis, maka besoknya Yusuf Kalla mengatakan, “Memangnya kita ada krisis?”. Akibatnya, kita dibuat bingung. Ada yang bilang fondasi ekonomi kita kuat, tetapi tiba-tiba Sri Mulyani mengatakan bingung mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu buruh ataukah sektor riil?

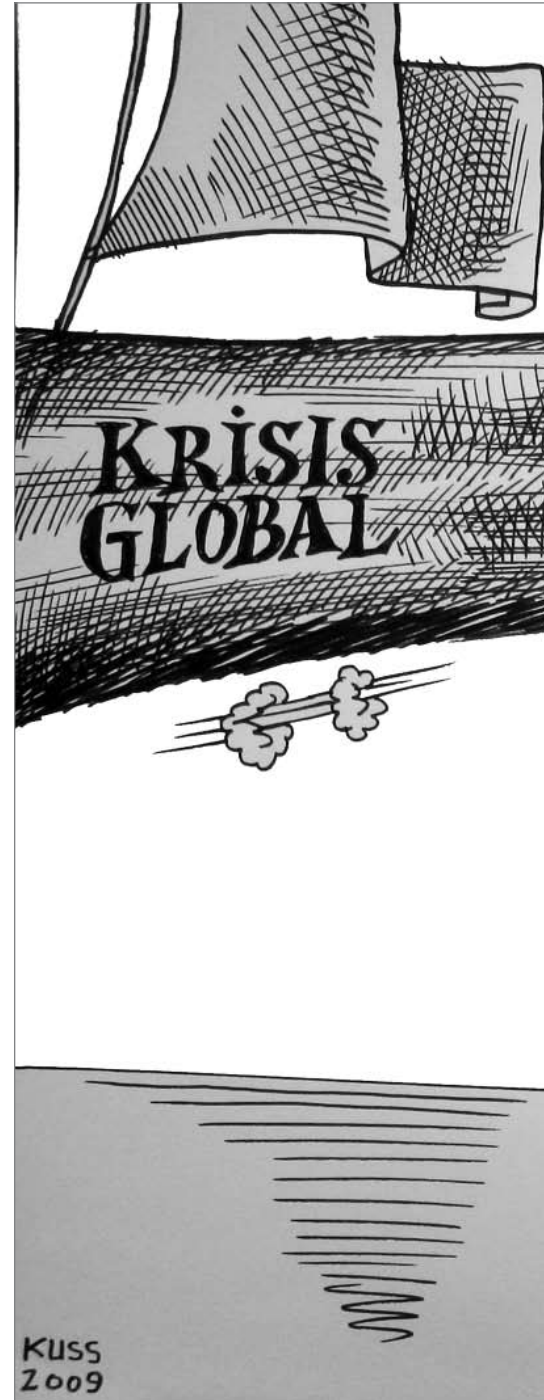
Bahkan, IMF sendiri menempatkan, kalau buruh bisa dibilang sebagai hambatan investasi, sebagai faktor nomor tujuh. Pertanyaannya mengapa tidak ditangani yang satu sampai dengan enam padahal bukankah ini yang paling penting? Misalnya, apakah karena birokrasi yang korup? Pungli, infrastruktur, dan lain sebagainya? Nah, jika ongkos-ongkos ini sudah ditangani, maka baru bisa berbicara dengan buruh. Namun, jika yang lain-lainnya belum dihitung, maka akan sulit berbicara dengan buruh. Lalu, *agregat demand* yang anjlok dan sektor informal UKM. Menurut saya, inilah yang harus dikunci oleh pemerintah agar tidak menyebar ke Indonesia secara dominan.

Saya belum mencatat perkembangan yang baru. Namun, jelas bahwa penurunan ekspor terjadi di industri-industri yang menyerap tenaga kerja terbanyak. Itu sebabnya diprediksi orang yang akan kehilangan pekerjaannya

tahun 2009 paruh pertama dan kedua sekitar 2 juta orang. Lalu, harga komoditas global kalau kita lihat dua di bawah pemainnya menengah besar, tapi yang dua lainnya menengah kecil. Itu data dari asosiasi kopi di Sumatra, 400 petani kopi terdaftar di Sumatra Utara hanya 60 yang aktif dan inipun terancam untuk gulung tikar. Nah, ini yang harus ditangani segera daripada mempertahankan indeks harga saham dan sebagainya.

Kita telah menyarankan adanya lima langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah krisis. Pertama, hentikan subsidi untuk orang kaya. *Bail out* dari dari sektor finansial memberikan subsidi bagi orang kaya. Untuk itu, perlu dipastikan *money supplay* ke sektor riil. Kedua, imunisasi diri agar tidak tertular krisis global melalui kontrol devisa. Nah, analoginya begini, sebenarnya kalau tetangga kita kena penyakit, kena virus maka langkah yang harus dilakukan bukannya membuka pintu lebar-lebar supaya kita tertular, dan ini yang terjadi tahun 1997-98 ketika krisis Bath. Pada waktu itu, kita bukannya melakukan imunisasi, tetapi justru melempangkan jalannya virus tersebut melalui liberalisasi. Ketiga, selamatkan daya beli rakyat melalui *safety nett* secara komprehensif bukannya dengan cara karikatif, BLT dsb. *Safety nett* tersebut harus sebagai *skim* sehingga orang ketika dipecat tidak akan pusing besok mau makan apa sehingga bisa menjadi *buffer* untuk mempertahankan daya belinya. Keempat, berani berpikir di luar kotak, *out of the box*. Kita harus mendorong sistem pertukaran alternatif yang komplementer. Jadi, di luar sistem yang ada selama ini, kita mengenal sistem pegadaian, ini harus difasilitasi, *micro financing*. Sebenarnya, pemerintah hari ini sudah menerbitkan peraturan mengenai *mikro financing* dan saya tahu bahwa selama ini kita tidak mempunyai peraturannya. Kelima, bersihkan diri dari *private interest public relations neoliberal*. Selama ini, ekonom-ekonom yang

sering kali didengarkan, yang sering kali disebut para ekonom kritis coba kita buka portofolionya. Apakah para ekonom kritis ini mempunyai saham sehingga mengaku ekonom, tetapi sebenarnya mereka humas dari diri mereka sendiri dan neo-lib? Saya kira itu, terima kasih.



Yanuar Rizky

Saya telah menulis secara panjang lebar di Kompas pada tahun 2003-2004. Tulisan tersebut pada akhirnya mendorong saya untuk *resign* dari pasar bursa karena memicu konflik yang dalam. Pada tahun 2003, saya sudah mengingatkan pada pasar bursa bahwa sebenarnya ini berbahaya karena ada indikasi berat dan besar bahwa dana

perbankan sebetulnya pindah *kuali* dari SBI ke saham sehingga jika teman-teman perhatikan maka ada dua masalah besar, yakni masalah *intern* dan *ekstern*. Sampai tahun 2001, suku bunga yang diterapkan oleh BI tinggi sekitar 19%, inflasi $\pm$ di 21%. Dulu, hampir semua ekonom bilang, "BI *nich* yang mengakibatkan sektor riil tidak jalan. Kita tidak bisa pulih dari reformasi karena BI menerapkan

suku bunga tinggi". Sebetulnya, kalau dilihat masalahnya secara umum waktu itu BI memang tidak bisa melakukan operasi pasar terbuka karena ada aturan dari International Settlement bahwa bank sentral sebuah negara jika rasio antara modal pemerintahnya dengan kewajiban moneterinya sudah di bawah rasionya 8% maka tidak boleh melakukan operasi pasar terbuka. Ini



Ilustrasi: Kus Indarto © Friedrich-Ebert-Stiftung

karena dapat dianggap gagal settlement. Ini yang dibilang Martin tadi.

Jika kita ingin melebar sedikit, maka sebenarnya aliran dana BI yang mengalir ke DPR dan sekarang lagi diributkan adalah masalah ini. Agar BI bisa beroperasi lagi, bisa OPT lagi, yang namanya beban BLBI ini harus ditarik ke laporan BI agar di atas 8%. Nah, itu keputusan politik, DPR-nya minta uang. Inilah sebenarnya yang terjadi. Urusan tahun '98 adalah uang ke uang sebenarnya. Jika kita sekarang ngomong lagi, maka sangat mungkin ini aliran dana BI kedua.

Sekarang ini, BI cukup riskan karena kondisinya berada pada 8,04. Rasio antara modal pemerintah dengan kewajiban moneter BI sekarang 8,04. Cadangan devisanya 61.000 US\$, tapi ini menurut saya kritis. Makanya, jika *hit* sekali lagi, maka besar kemungkinan rupiah kita akan susah. Sekarang, mereka mencoba devisa terkontrol. Namun, tidak mengakui menjalankan rezim kontrol devisa karena sebenarnya sudah berat, makanya didesain *by loan* dsb mengingat posisinya sudah di 8,04. Dia bisa mengalami sebagaimana telah terjadi pada tahun 2002, tidak bisa melakukan OPT karena kurs bebas sehingga pilihannya kemudian suku bunga. Setelah mereka efektif, suku bunga drastis turun dari 19% menjadi 7% dalam kurun waktu satu tahun. Bahkan, dari 2003-2005 stabil di 7,4.

Jika parameter makro menjadi ukuran sebuah pemerintahan, maka kita patut bertanya mengapa Megawati tidak terpilih lagi. Megawati pernah memotong suku bunga dari 19% menjadi 7%. Kemudian, SBY mengatakan bahwa suku bunga sekarang berada pada kisaran 7%. Padahal, bukan di area dia. Dalam hal ini, dia menjatuhkan Megawati bukan dari makro moneter dan sekarang membuat iklan yang kurang lebih sama. Bedanya, SBY menambah dengan katakan tidak. Itu saja.

Undang-undang pilpres 2009

mestinya lebih baik. Program yang dimasukkan kalau seorang kandidat menang akan mengikat secara konstitusi sehingga bisa kita ungkit-ungkit lagi di kelak kemudian hari. Jika tidak, maka semua bisa berbicara pendidikan gratis, pendidikan murah, tetapi itu tidak pernah mengikat dirinya. Oleh karena itu, reformasi politik sebetulnya gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena sebetulnya ada yang terputus antara politik dan ekonomi. Tadi, Martin telah menyinggung bahwa ekonomi lebih ke pragmatis, yang penting proyek jalan. Tidak ada ideologi di dalam diri para penggiat ekonomi.

Peserta

Bukankah politik juga pragmatik?

Yanuar Rizky

Ekonomi lebih pragmatik lagi, ultra pragmatik. Kebijakan ekonomi benar-benar *follow demand*. Kalau kita lihat yang atas suku bunga Bank Indonesia adalah SBI, yang di bawah indeks saham gabungan. Kalau kita perhatikan jika SBI naik, maka mimpi buruk buat bursa. Di situ, ketika saya masih bekerja di sana, transaksi cuma Rp. 350 miliar. Padahal, BEP waktu itu 500 miliar. Sebagai ketua SPBIJ, saya harus negosiasi turun upah meskipun tidak sampai seburuk seperti yang baru-baru ini terjadi karena sudah di atas layak. Yang harus diperhatikan masalah fasilitas dan sebagainya. Orang-orang finansial memang rakus semua seperti tadi dibilang Martin. Oleh karena itu, jika teman-teman di sektor finansial terkena krisis maka menurut saya bagus. Ini karena jika urusan dia belum terkena, maka tidak akan pernah konkret. Jika berbicara reformasi '98, maka sebenarnya sudah sampai ke pialang. Oleh karenanya, krisis yang berdampak kepada mereka bagus karena pemerintah ini sebenarnya selalu deal dengan kelas menengah sehingga perlu ada kelas menengah yang bergerak.

Pada satu sisi, Amerika Serikat

menerapkan bunga rendah yang diprakarsai Allan Greenspan. Ia sangat mempunyai keyakinan bahwa ekonomi AS harus segera ekspansi, dan ini adalah era mulai diperkenalkannya oleh apa yang disering disebut sebagai *investment bankers* atau *financial markets*. Sebetulnya, yang mendorong hal ini adalah the Fed setelah mengalami *over likuiditas*. Suku bunga rendah. Greenspan mempunyai keyakinan bahwa jika bunga rendah maka ekspansi akan datang ke pasar modal, akan banyak terjadi sekuritisasi di pasar modal. Namun, dia melupakan satu hal bahwa sejak '95 Amerika mengenalkan instrumen yang namanya *hedge fund*, yang sebenarnya adalah *investment bankers*. GP Morgan, misalnya, punya City Morgan Bank ataupun City Morgan Securities. Mereka mempunyai semuanya, suatu model *one stop financial market*. Bedanya, *hedge fund* sama reksadana apa? Kalau reksadana memang harus jelas dulu penempatannya, jadi harus jelas berapa persen di saham, obligasi, kemudian diajukan ke Bapepam atau LC untuk mendapatkan pernyataan efektif. Oleh karena itu, menjadi betul-betul tepat ketika membeli instrumen, dan pembelian tersebut dilakukan secara kolektif. Sementara *hedge fund* tidak demikian. Semuanya terserah kita. Celakanya, 78% orang Amerika sudah *hedge fund*. Yang lebih parah, jaminan sosialnya juga sudah masuk *hedge fund*, dana pensiunnya menjadi nasabah utama *hedge fund*, dan ini yang menjadi masalah. Masalahnya, *hedge fund* ini memberikan imbalan hasil pada pada tahun 2003 saja sebesar 25 %. Jika sekarang saya sebagai pengelola dana, maka kalau saya tempatkan di the Fed, saya hanya mendapatkan 1%, di New York kemungkinan 2-3%. Itupun jika saya paling jago di pasar. *Hedge fund* memang terbuka. Di sini, hanya dapat 6%-an. Kalau sistem di Amerika 1 plus 6, tujuh plus 2 jadi 9. Lalu, saya harus memberi 25. Nah, itulah yang menjadi pemicu. Inilah yang merusak pasar di

negara berkembang.

Pertanyaan buat kita apakah pasar kita pertama juga *hedge fund* yang mengerjakan? Ternyata perbankan yang bergerak. Saya selalu yakin karena kalau investasinya mau jalan, lokalnya dulu bergerak. Oleh karena itu, pemerintah kita butuh lapangan kerja yang terbuka, investasi asing, tetapi jika banknya tidak mau menyalurkan kredit maka tidak ada gunanya. Dalam kenyataannya, di luar akan bergerak masuk jika dana dalam negeri bergerak. Jika tidak, maka tidak akan ada pasangannya.

Jika kita berbicara mengenai Bank Century sekarang ini sebenarnya ada kasus yang sama pada tahun 2004, yakni Bank Global yang sebenarnya menjadi indikasi bahwa dana-dana pihak ketiga yang ditaruh di bank diputar di *black market*. Dikatakan *black market* karena kita tidak mempunyai *investment bankers*. Ini sangat berbeda dengan GP Morgan.

Ada beberapa orang yang bilang, "Sudahlah sekarang kita tidak boleh menyandera diri kita". Ini terjadi karena kalau kita ngomong masalah perbankan seolah-olah kita menciptakan *rush*. Sebagian orang malah bilang, "Janganlah ngomong masalah perbankan!". BI bilang ke saya, "Udah mas ngomong masalah kebijakan moneter aja *dech* jangan ngomong perbankan dulu". Jadi, seolah-olah kita telah disandera oleh diri sendiri. Persoalannya bagaimana bisa memperbaiki sektor riil kalau kita tidak melakukan pendisiplinan sektor perbankan itu sendiri?

Pada tahun 2003, ini yang sebenarnya terjadi. Pada waktu itu, pertama kali pemerintah masuk pasar finansial menjual obligasi, tetapi tidak laku meskipun pemerintah memberi bunga tinggi. Nah, ini kredit dari 26 bank publik. Sebetulnya, pada tahun 2004, salah satu iklan Mega dan pidatonya Pak Djatun mengatakan kita sudah pulih dari krisis karena laba perbankan tumbuh menjadi 520% tahun 1997. Jika kita perhatikan, maka pada tahun

Sebetulnya, pada tahun 2004, salah satu iklan Mega dan pidatonya Pak Djatun mengatakan kita sudah pulih dari krisis karena laba perbankan tumbuh menjadi 520% tahun 1997. Jika kita perhatikan, maka pada tahun yang sama biaya operasional kita membengkak. Pertanyaannya laba ini datang dari mana? Inilah yang saya bilang *black market*.

yang sama biaya operasional kita membengkak. Pertanyaannya laba ini datang dari mana? Inilah yang saya bilang *black market*. Pada waktu itu, saya hanya mempunyai data mengenai bank yang *go public*. Dari 26 bank publik tersebut, 46%-nya sekitar sebelas bank mengalami kenaikan laba dan juga mengalami penurunan laba. Jadi sebetulnya, jangan pernah mimpi bahwa bank akan mendapat laba tanpa memberikan laba pada Anda. Ini yang menjadi masalah sistemik. Sementara itu, sisanya, 58%, tetapi sayangnya jumlah ini tidak ada hubungannya dengan *Operating Cash Flow*. Jika dihubungkan antara Laba, LDR sama *Operating Cash Flow*, maka 81% tidak ada hubungannya. Hanya 4 bank saja yang sebetulnya mempunyai korelasi. Labanya tumbuh, *operation cash flow*-nya naik, kemudian LDR-nya naik. Sisanya, tidak mempunyai korelasi sama sekali. Oleh karena itu, kita perhatikan mengapa kasus seperti di Bank Century terjadi karena memang dia main-main. Kenapa jadi masalah

karena peraturan Bank Indonesia jelas melarang.

Selanjutnya, dana ketiga adalah dana kita, tabungan kita, deposito kita. Jika ke *Treasury*, maka hanya bisa ke surat utang negara, SBI, dan surat utang antarbank. Obligasi korporasi yang *rating*-nya BI *rate* ke atas sehingga sangat ketat *treasury*-nya. Kebijakan BI sebenarnya sudah benar. Jika kita tidak mau menempatkan dana di sana, maka kita harus menempatkannya di sektor riil untuk mendapatkan *income*. Hanya saja, kelemahan di kita peraturannya bagus, pengawasan jelek, *enforcement* tidak ada. Dengan demikian, jika ada orang yang berbicara mengenai sektor riil, tetapi hanya menumpukan pada masalah BI *rate*, maka menurut saya tidak akan selesai masalahnya. Kita juga harus ingat bahwa semua orang sekarang mengatakan jika BI *rate* sangat rendah. Kemudian, jika kita runut ke belakang, maka kalau BI *rate* turun maka saham akan ramai lagi.

Sekarang ini, saham ramai lagi karena mengalami kekeringan likuiditas. Bank main di *treasury*, mata uang. Mereka semua mendorong *rate* BI rendah karena membutuhkan insentif dari perbankan yang akan kembali mengucur. Oleh karena itu, kita harus hati-hati jika berbicara masalah turunkan suku bunga karena jangan sampai menjadi corong orang yang mau mengambil untung yang bukan urusan kita karena sekali lagi persoalan sektor riil tidak cukup hanya berdasarkan pada suku bunga.

Sebenarnya baik neolib maupun sosial demokrat, sebenarnya menurut pandangan saya, hanya membahas tiga sektor ini, yakni bagaimana negara berurusan dengan dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah bilang *flexible labour market*. Namun, mereka tidak pernah memberikan *social security*. Di Amerika, misalnya, ketika berbicara mengenai *flexible labour market*, maka pengangguran yang mungkin muncul akibat privatisasi diatasi dengan *social security*. Jika menganggur, maka APBN

yang menanggung. Persoalannya di Indonesia ini tidak terjadi. Sosial demokrasi barangkali menjadi jawabannya, tetapi persoalannya bagaimana cara mengimplementasikannya?

Pembicaraan tripartit dalam konteks Indonesia, menurut saya, yang harus dibahas adalah bagaimana daya beli tetap ada, dan bukannya mengenai upah seperti sekarang. Ini karena persoalan upah menyangkut persoalan mikro, dan ini sudah diselesaikan oleh Dewan Pengupahan. Tripartit harus berbicara sektor apa yang terganggu untuk kemudian dicari cara menyelesaikannya. Jika persoalannya tidak mempunyai uang, maka panggil gubernur Bank Indonesia.

Menjadi hal yang tidak jelas saat menteri keuangan mengatakan, “Saya bingung mana nih yang harus diselamatkan, buruhnya atau dunia usahanya?”. Menurut saya, dunia usahanya, tetapi yang prospektif membuka lapangan kerja dan daya tahan pekerjaannya. Dengan demikian, jika ia bingung, maka yang dia maksud dengan menyuntikkan dana berarti memberikan dana ke pemilik modal bukan dunia usahanya. Ini karena ketika kita berbicara mengenai dunia usaha, maka berarti kita harus pula berbicara pula pemilik modal, pabrik, dan juga buruh. Kalau kita ingin menyelamatkan sektor riil, maka harus menyelamatkan dunia usahanya. *Include* semuanya.

Oleh karena itu, aneh jika di Apindo, misalnya, hanya berfikir mengenai sepatu, tetapi tidak pernah memikirkan buruh sebagai konsumen. Apa arti ini semuanya? Jawabannya bahwa kita kehilangan kepemimpinan. Menteri Tenaga Kerja hanya berbicara kesediaan memfasilitasi, melindungi, tapi di sini bukan hanya masalah pengusaha, tetapi juga konsumen.

Ivan A. Hadar

SBY memberikan sepuluh langkah untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis. Bagaimana dengan langkah-

langkah tersebut?

Yanuar Rizky

Langkah tersebut baru sebatas wacana, dan kalau diperhatikan dari 10 langkah tersebut, maka manakah yang paling konkret? DPR saja membahas 1 jam realokasi 4,1 triliun di APBN untuk infrastruktur, dan menurut saya langkah ini lebih konkret. Dengan demikian, sepuluh langkah tersebut akan jauh lebih konkret jika, misalnya, berapa triliun untuk mengganti mesin pabrik biar harga turun. Kalau 10 langkah itu, memastikan kurs tetap berbunga rendah, bankir yang baca ya Pak SBY saja. Yang paling parah di Indonesia ini tidak pernah mengemuka sampai saya berbicara ke Kompas, “Mengapa *you* tulis di halaman satu CEO-CEO Amerika, sedangkan di Indonesia tidak? Padahal, ini masalah berat”. Di bank, 60% pendapatan berasal dari renumerasi berdasar perolehan laba. Bukankah, jika demikian, maka dunia perbankan kita sudah gila. Misalnya, saya banker di Bank Mandiri. Gaji saya di Bank Mandiri, misalnya, 75 juta. Saya akan mendapatkan tambahan seberapa besar pencapaian laba yang saya dapatkan. Jadi, jika saya menjadi banker, maka saya akan mencari itu. Tidak masalah jika saya menaruh uangnya di saham atau apapun yang penting akhir tahun renumerasi tercapai. Itulah alasan saya menyarankan Kompas untuk membongkar praktik-praktik semacam ini.

Saya dulu berurusan dengan manipulasi pasar *investment trading*, orang yang dalam *core* bisnis mendapat investasi jabatan. Mereka mendapat asuransi resiko, *risk insurance*. Jadi, kalau saya salah mengambil keputusan, saya salah *suspence* sesuatu dan saya dituntut orang, saya turun jabatan. Namun, saya dibayar *insurance* sehingga tidak ada resiko. Yang jadi pertanyaan adalah karena tidak ada resiko, maka mestinya dihajar saja karena jika ada apa-apa toh akan dibayar juga. Namun anehnya, tidak

Menjadi hal yang tidak jelas saat menteri keuangan mengatakan, “Saya bingung mana nih yang harus diselamatkan, buruhnya atau dunia usahanya?”. Menurut saya, dunia usahanya, tetapi yang prospektif membuka lapangan kerja dan daya tahan pekerjaannya. Dengan demikian, jika ia bingung, maka yang dia maksud dengan menyuntikkan dana berarti memberikan dana ke pemilik modal bukan dunia usahanya. Ini karena ketika kita berbicara mengenai dunia usaha, maka berarti kita harus pula berbicara pula pemilik modal, pabrik, dan juga buruh. Kalau kita ingin menyelamatkan sektor riil, maka harus menyelamatkan dunia usahanya. *Include* semuanya.



ada yang berani. *Insurance* ini hampir seperti *golden parasut*. Dipecat, tetapi dibayar. Deputy BI juga bayar *insurance*, tetapi yang saya heran mengapa mereka tidak mempunyai cukup keberanian, dan ini yang seharusnya dibuka di media seperti Kompas. CEO Merryl Lins Amerika tidak ada urusan sama kita, tetapi kalau CEO Indonesia baru menjadi urusan kita.

Mengenai industri manufaktur, mengapa macet? Ini karena tidak ada kejujuran. Pemerintah tidak mau membuka harga pokok produk (HPP). Jika saya bertanya ke orang bisnis, maka jawabannya karena mesinnya ngadat melulu. Dulu mesinnya dibeli dengan cara berhutang, dan ketika sekarang akan dilakukan *refreshment* mesinnya supaya usahanya lebih lancar, perbankan tidak bersedia memberi kredit. Akibatnya, mesin jelek selalu digunakan.

Kalau dilihat Harga Pokok Produk (HPP), maka HPP usaha manufaktur kita yang namanya upah buruh manufaktur, tekstil, misalnya, ada yang *go public*. APAC, misalnya, sudah *go public*, sekarang berubah bentuk menjadi *drilling*. Dulu tekstil sekarang Apacindo. Nah, kalau kita perhatikan, struktur harga pokok produknya, yang namanya ongkos buruh padat karya 4-11, bayaran UMP. Tapi, ada yang namanya biaya administrasi umum dimasukkan ke dalam biaya HPP, angkanya antara 11-23-

an. Jika sekarang Emiten, maka semua sektor kita masukan yang namanya ongkos tenaga kerja yang kisarannya antara 11-15%, biaya tenaga kerja langsung yang masuk HPP. Tapi yang namanya biaya administrasi umum yang masuk HPP angkanya 20-25, kata Indef turun harganya jika angka emitten bisa sampai 35. Nah kalau kita bedah lagi apa ini angka administrasi umum? Mengapa angkanya besar sekali? Nanti dijelaskan sama emitten-nya, sama direktornya, CEO, "Gini mesin kami sudah rusak semua, biaya represiasinya tinggi". Namun, inilah sebenarnya uang golfnya bupati, uang baju ijo, baju coklat, security, dan lain sebagainya.

Jika kita mengajukan pertanyaan kepada pengusaha mengapa mereka masuk Apindo, maka jawabannya untuk menghindari pajak. Saya bilang secara *accounting* tidak boleh, secara *accounting* biaya lain-lain harus keluar dari HPP, tapi masalahnya jika dikeluarkan menurut mereka tidak boleh karena dipotong oleh pajak. Oleh karena itu, mereka mengakalinya dengan menaikkan ke atas. Toh, untuk membayar aparat. Persoalan yang kita hadapi sekarang ini menjadi semakin jelas, yakni birokrasi. Oleh karena itu, masalah selanjutnya adalah apakah SBY-JK mempunyai komitmen untuk menertibkan birokrasi ini, yang menurut saya merupakan persoalannya yang

jauh lebih besar dibandingkan dengan upah buruh yang jauh lebih rendah.

Birokrasi yang tidak efisien inilah yang membuat HPP kita lebih besar dari Cina, dan membuat harga unit *cost* kita lebih mahal dibandingkan dengan Cina. Ini sekali lagi bukan karena masalah upah buruh. Kompas pernah menuliskan di Fokus, membandingkan unit *cost*-nya, UMR kita Rp. 808.000, sedangkan di Cina UMR sebesar Rp. 898.000. Selanjutnya, Kompas membandingkan lagi upah dengan *output* yang dihasilkan sehingga mereka dikatakan upah produktivitas kita lebih mahal karena *output*-nya sedikit. Saya bilang ke Kompas, "Salah juga dong, bicara *output* bicara jualan. Ini berarti ada yang tidak bisa jualan. Bicara jualan bukan bicara buruh, tetapi bicara bosnya, majikannya, bicara pemerintah. Ini karena buruh tahunya kerja, bukan jadi marketing, kita harus proporsional dalam melihat persoalan". Upah produktivitas adalah output yang mengecil. Berbicara *output* dalah bicara jualan dan bukannya bicara produksi.

Nah, saya selalu bingung jika dikatakan bahwa buruh kita lebih malas. Di Cina, para buruh bisa menghasilkan lebih banyak barang. Saya kira jika buruh kita disuruh kerja, maka akan menghasilkan lebih banyak barang juga. Hanya saja, persoalannya adalah apakah barang-barang tersebut bisa dijual? Dengan demikian, apakah sebenarnya persoalan sektor riil kita? Pertama, mesinnya usang. Kedua, bank tidak mau melakukan *refreshment* mesin. Di Cina, mesin yang sudah usang diganti produktivitasnya naik. Dalam kaitan ini, mereka benar-benar menerapkan *Competitive Value Chance*. Mesinnya dari mereka sendiri sehingga unit *cost*-nya rendah, yang namanya biaya aneh-aneh mereka turunkan. Biaya-biaya siluman mereka hilangkan sehingga unit *cost*-nya mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia.

Anton Supit pernah bilang jika di Vietnam biaya iurannya lebih banyak. Namun, biaya pesangonnya tidak ada.

Tentu saja, karena mereka dibayar dengan menggunakan premi, dan bagi mereka tidak masalah karena lebih pasti. Persoalannya di kita pemerintah tidak pernah memberikan kepastian berusaha, baik untuk buruh maupun pengusahanya. Akhirnya, mereka saling menyalahkan, dan situasinya menjadi tambah parah ketika pemerintah berpihak pada kelompok tertentu.

Nah, sekarang, kita masuk ke persoalan krisis global. Jika kita perhatikan laporan emiten kita atau perusahaan yang *go public*, maka dapat kita lihat bahwa kondisinya cenderung tidak tumbuh. Jadi, *working capital tax* tidak tumbuh. Nah, Pak Ivan Hadar senang sekali berbicara mengenai *tax ratio*. Persoalannya adalah mengapa *tax ratio* tidak pernah mencapai target? Jawabannya karena perusahaan tidak kerja. Lantas, darimana mereka mendapatkan uang? Ya, main saham, main kurs dibandingkan dengan mengurus buruh pusing. Padahal, jika sektor riil bergerak, maka buruh dapat duit. Kemudian, negara mendapatkan PPN, sedangkan dari sisi perusahaan mendapatkan *income tax*. Namun, jika pemerintah menghajar daya beli, maka sama saja menghajar *tax ratio* dia. Pertanyaannya kita akan mendapatkan uang darimana? Jika sektor riilnya bergerak, maka kita dapat memperolehnya dari PPN dan PPH. Di sektor *finance* pajaknya lebih rendah, hanya 10% yang 0,4. Kalau pemerintah bergerak di sektor riil, maka akan menolong dirinya sendiri. APBN kuat, sektor riilnya kuat. Persoalannya mengapa *tax ratio* kita tidak pernah menjadi solusi karena pemerintah tidak pernah ke sektor riil. Inilah yang menjadi salah faktor penyebab mengapa ketergantungan terhadap utang besar. Oleh karena itu, ayam telornya harus jelas.

Neolib dan kapitalisme sebenarnya memudahkan mencari uang. Inti teorinya sebenarnya seperti itu. Nah, untuk membiayai ini memerlukan modal. Kapitalisme menawarkan modal. "Anda

menjual saham (*equity*) atau berutang (*debt*)". Dalam keseluruhan teori *financing, corporate finance*, yang saya dan Martin pelajari, membahas mana yang lebih rendah antara keduanya. Cara mudahnya adalah ke pasar modal. Anda akan bertemu dengan orang yang memiliki *capital supply*. Inilah yang disebut pasar perdana (EPO). Jika sudah sampai ke pasar modal, maka ia akan menjadi sinterklas karena bisa mengatasi persoalan. Padahal, jika diperhatikan, maka EPO ini hanya 0,2 %. Itupun di sektor keuangan, yang tidak ada kaitannya dengan sektor riil. Coba kalau sektor pasar modal benar-benar berjasa, maka mengapa urusan infrastruktur PLN tidak ke pasar perdana jika memang banyak uangnya?. Jawabannya selalu dibilang karena jika di pasar modal susah. Akibatnya, kita dibuat bingung karena katanya tidak ada uang untuk investasi infrastruktur, tetapi pasar modalnya bergairah dari hari ke hari. Padahal mestinya, jika pasar modal mampu menjawab persoalan ini, maka bukankah persoalannya kekurangan investasi dapat diselesaikan? Nah, di sinilah ketika barang dapat diperjualbelikan di pasar, maka masuklah ke permainan portofolio.

Pertanyaannya adalah apakah relevansinya *buy back*? *Buy back* jika saya pegang saham saya sendiri, maka akan menjadi musang berbulu domba ke depannya. Jika suatu saat pusing, maka goreng saham sendiri aja deh. Inilah yang disebut dengan "goreng-menggoreng saham". Dia menggoreng sahamnya sendiri, kerja sama dengan bank juga. Kita bisa memperhatikan antara tahun 2002-2004 siapa yang melakukan goreng-menggoreng saham, Lippo, dan di sana ada Laksamana Sukardi. Pertanyaannya jika Bakri memang jagoan main di treasury mengapa tahun 2002-2004 tidak kelihatan? Namun, ketika ia berkuasa maka melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Lippo. Ini karena jika main goreng-menggoreng saham maka kita

butuh berkuasa. Mengapa demikian? Jamsostek jawabannya yang alokasinya ke properti, saham, obligasi, dan deposito. *Return*-nya pada tahun 2007, indeksnya naik 130%, yang namanya Schroeder memberikan reksadana 42%, nasabah reksadana 17%. Schroeder mengelola dana 4 trilyun memberikan 42%, sedangkan Jamsostek punya 63 trilyun hanya memberikan 10%. Jadi, sebenarnya, ini selalu menghasilkan *zero sum game*. Nah, jika persoalannya, misalnya, saya pusing maka goreng saham saja, maka jika tidak mempunyai kekuasaan, maka akan sama saja sehingga kita memerlukan kekuasaan agar *capital game* menjadi nyata.

Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika presiden memanggil Menteri Negara BUMN untuk melaporkan perkembangan Bumi Resources. Namun, ia tidak pernah meminta laporan dari menteri perdagangan tentang perkembangan harga beras. Menurut saya, ini sudah kacau. Ironisnya, PDIP juga membela bahwa saham Bumi Resources harus ditolong. Semua satu suara untuk melakukan *buyback*. Nah, kuncinya ketemu, "Loe dapat duit, dapat dana kampanye, dan bandarnya sama".

Ivan A. Hadar

Katanya Sri Mulyani marah.

Yanuar Rizky

Nah, kita mesti proporsional juga Bang Ivan. Sri Mulyani pada sisi itu betul. Namun, ia melakukan hal sama pada bulan April ketika melakukan *buy back* obligasi US dolar yang jatuh tempo pada tahun 2010. Nah, bukankah hal yang aneh karena melakukan pembelian sesuatu yang belum jatuh tempo. Padahal, dana yang ada sebenarnya dapat digunakan untuk subsidi BBM. Alasannya untuk menyusun obligasi selanjutnya. Pada bulan Juni, ia melakukan lagi 1,5 kali jumlah yang di-*buy back* suku bunganya dari 5,2 menjadi 7,8 dengan diskon 2,5%. Oleh karena itu, sebenarnya yang terjadi adalah sama saja. Perbedaan hanya

terletak pada bandarnya saja. Jika dilihat nilai plusnya, maka memang benar tindakannya bagi publik.

Nah, persoalannya dia dibilang membela IMF. Saya dibilang begitu juga. Setelah saya perhatikan, Ketua Bapepam bilang mengapa kita lebih membuka suspensi untuk persoalan bangsa yang lebih besar karena yang saya dengar GP Morgan memang mengancam, "Jika kamu *back up* terus si Bakri, maka saya tidak akan merealisasikan komitmen saya sebagai *standing buyer* obligasi RI yang akan *ingsut* Desember". Nah, *ingsut* ini ternyata tidak terjadi. Sebaliknya, yang terjadi adalah *stand by loan* dan IMF komplain. Ini yang saya bilang, "orang bangkrut diajak ngomong terus". GP Morgan sedang berada dalam posisi bangkrut, tetapi selalu diajak ngomong sehingga ya tidak ada solusi. Oleh karena itu, kita ini sama saja ngomongin susu basi. Padahal, mestinya, kita ini berbicara sesuatu yang segar bukan sesuatu yang sudah basi. Sayangnya, ini tidak dilakukan.

Di sini, relevansinya jelas. *Release*-nya Sri Mulyani pada akhir 2007, ia bilang, "Kapitalisasi pasar modal Indonesia naik 131,73%". Dengan gagahnya ia bilang, "Itu sudah 67% dari GDP". Lebih lanjut, ia bilang ini menunjukkan kepercayaan investor asing pada Indonesia. Padahal, menurut saya, investasi tidak pernah terkena status menganggur. Jika kita lihat, maka yang benar-benar ke GDP adalah hanya 0,72% dari GDP yang turun 0,13%. 0,13 dikalikan 0,72 akan menghasilkan 11,75%. Ini berarti bahwa 52,25 hanya angin spoi saja. Cerita indah yang sebenarnya tidak akan ada kaitannya dengan apa-apa. Mengapa ini terjadi? Jika di pasar tenaga kerja atau di sektor riil ditambahi intermediasi di sektor keuangan akan menghasilkan 5 sumber PPN dan 6 PPH. Namun, jika investasi portofolio, maka hanya akan menghasilkan 1 PPN dan 1 PPH sehingga begitu sektor ini tidak jalan maka hanya akan menghasilkan 11% tadi.

Jika kita lihat dari sini, maka tampak

bahwa sektor riil menganga lebar. Padahal, ini terjadi dalam situasi dimana sektor finansial bagus. Ketika finance dalam kondisi bagus saja mereka tidak ingat untuk membantu, apalagi kalau lagi susah? Nah, jadi mengapa kita harus membuat deal dengan orang-orang susah yang tidak pernah ingat. Meskipun demikian, kita tidak sendirian. Jadi, benar yang dikatakan SBY bahwa ini merupakan dampak global. Jadi, negara yang GDP-nya tumbuh, lapangan kerjanya tumbuh, dan EPO yang *capital stock*-nya tumbuh hanya ada tiga negara, yakni Canada, Jerman, dan Jepang. Lainnya kacau, dan Amerika Serikat kondisinya paling kacau. Menurut saya, ini mungkin potret kelakuan *hegde fund* yang membuat gempa dimanamanya. Memicu semuanya pindah ke pasar *finance*. Dari sini, bisa dilihat mengapa krisis dan mereka mampu menghantam? Ini karena sumber dana mereka besar dimana tahun '02-'07 saja tumbuh 225% dana kapitalisasi yang dikelola.

Di Thailand, kalau saya perhatikan Thaksin menyewa seorang konsultan untuk membuat kuadran *competitive advantage* yang nilai kompetitifnya cukup tinggi. Ia mengumpulkan para banker, dan mereka harus memberikan kredit ke sektor riil. Thaksin memberikan *guarantee*-nya jika seandainya mengalami kebangkrutan. Thaksin bilang agar suku bunganya lebih rendah dari harga pasar, kompensasi insentif pajak. Inilah yang dilakukan Thailand tahun 2002. Di situlah, muncul jawaban, menciptakan lapangan pekerjaan yang memang harus diciptakan dengan cara mengumpulkan bankir agar memberikan kredit ke sektor riil. Di Indonesia, para bankir ini mestinya dibilangin, "Hai *bankir you* bukan pengusaha, saya mau ada kredit ke sektor ini. Kalau macet ke gedung bundar saya yang tanggung". Menurut saya, itu yang dibutuhkan dari seorang pemimpin.

Erwin Rasyid pernah bilang ke saya, "You ngomong enak aja, nanti kalau

saya dijatuhin, mana politiknya lagi kayak gini nanti kalau macet satu saja maka saya dibawa ke gedung bundar gara-gara masalah beginian". Nah, saya sebenarnya mencoba berempati pada bankir. Resiko yang dia tanggung begitu besar, pasar bebas, pemimpin nagih uang untuk kampanye, masyarakat nagih sektor riil. Lantas dia pikir, "rezim jatuh saya dulu yang dibawa ke meja bundar". Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil resiko jika tidak maka tidak akan jalan. Menurunkan BI *rate* tidaklah cukup. Menurunkan obligasi mungkin, memperbolehkan *face to face* kredit, misalnya. Dengan demikian, menurut saya, jika terjadi kredit macet dan dianggap melakukan pemihakan maka tinggal menunjukkan bahwa telah dilakukan riset.

Berdasarkan riset saya, sektor ini yang harus diatasi. Jika Sri Mulyani bilang, "Saya bingung mana yang harus ditolong terlebih dahulu?", maka tanya ke Menteri Perindustrian, apakah mereka mempunyai peta industri, dan jika kita tanya sama menteri tenaga kerja maka berapa jumlah pengangguran yang ada selama ini? Pasti jawabnya akan kemana-mana ngomongnya. Saya curiga selama ini pemimpin kita menggunakan peta buta.

Persoalannya sekarang mengapa di Indonesia GDP-nya 65% konsumsi rumah tangga. Kalau daya beli dirusak hancur GDP kita. Para ekonom bilang bangsa kita ini bangsa konsumtif, *nett* importir, tidak mau produksi. Nah, saya bilang, "Mengapa itu dijadikan beban?". Mestinya kita bisa bilang pada Ibu Marie Elka, sebenarnya ini 65% Senayan City tidak pernah sepi, media, misalnya, meliput tidak pernah sepi, tapi ini roh-nya tidak ada. Mestinya, ini yang harus kita jual ke pemilik order. Baju, Levis segala macem, banyak terjual di sini. Tapi mengapa kita tidak diberi order hanya karena Cina yang menawarkan biaya rendah. Nah, jika kita tidak menerima order harusnya kita bisa bilang, "Kita tidak menerima barang



impormu". Dengan cara demikian, kita akan menyelamatkan sektor riil daripada ngomongin upah segala macam. Kalau saya perhatikan barang konsumsinya tidak menipis. Di Kalimantan yang semi konduktor, yang kemarin baru saja PHK 13.000 orang. Saya lihat ternyata usahanya *mikro chip* kecil-kecil buat hp. Menurut saya, kemungkinan *buyer* terbesar Nokia. Saya kebetulan ikut milis untuk komunikasi juga, hp nokia komunikator banyak yang antri. Harusnya menteri perdagangan bilang ke Nokia, "Eh Nokia ini masyarakatku miskin, tetapi konsumsinya luar biasa, semuanya mau beli. Kalau nggak kasih order tak kasih pajak tinggi". Menurut saya, *it's government*.

Martin Manurung

Nanti dilarang WTO?

Yanuar Rizky

Triple treatment dilarang, tapi sekali-kali menurut saya tidak apa-apa. Bukankah WTO juga tidak pernah membantu kita. Kita akan ikut WTO jika sejahtera, tetapi pada kenyataannya bukannya tidak demikian. Sekarang, bagaimana teman-teman di sektor finansial kita sadarkan karena bagaimanapun teman-teman di sektor finansial merupakan influence terbesar

ke kandidat yang mau run election. Saya kemarin, misalnya, ditelpon sama Asosiasi Bursa Efek Indonesia (ABEI), "Anda kan pernah di industri, dibesarkan oleh industri ini, masak Anda bilang untuk nggak ngasih insentif ke pasar modal?". Pada waktu itu, saya bilang, "jika sektor riil kuat, maka pasar modal kuat". Nah, saya pikir kalau mereka dihajar terus, maka lobi bisa makin kencang. Nah, ini juga yang saya rasakan, dan terlihat media buying-nya terjadi. Inilah fenomena demoktrasi pilar keempat di Indonesia. Dulu, waktu Harmoko, jika media membuat ulah, maka cabut SIUPP nya. Nah sekarang, jika media berbuat macam-macam, maka belanja iklannya dicekik. Dengan demikian, jika saya lawan maka kita tidak akan mampu mempengaruhi apa-apa. Menurut saya, mereka harus diberi pekerjaan yang sedikit beres. Ini karena kalau dihajar terus-menerus, maka akan menghajar kita dengan menggunakan lobi, yang ujungnya kebijakan. Oleh karena itu, menurut saya, baik juga jika teman-teman di reksadana banyak yang di-PHK sehingga ada middle class movement seperti di SPMI yang jika mengadakan apa-apa pesertanya banyak sekali. Kalau tidak ada PHK, maka tidak akan rame. Fenomena harus digeser, dan agak radikal mungkin karena harus terjadi

gesekan kelas.

Ada penyiar di Radio yang bertanya bagaimana buruh nih (ngomongin buruh) mengapa demo terus? Padahal, ia sendiri juga seorang buruh. Seorang penyiar bukankah juga seorang buruh, tetapi nanti baru sadar jika di-PHK. Pernah di forum pembaca Kompas ada yang bilang harusnya birokrat yang mengurus masalah ini. Birokrat juga buruh, di pemerintahan kalau di pertanian ya buruh tani. Nah, kita belum ada perasaan sama buruhnya.

Menurut saya, pada tahun '09, bakal lebih dalam karena saya perhatikan kelemahan kurs kita besar sekali resikonya karena kita nett importir, dan kenyataan ini tidak bisa ditolak. Dalam jangka pendek, jika kurs naik terus, inflasi naik, maka upah naik tidak akan terkendali. Menurut saya, BI sekarang ini bermain di pinggir lapangan, episentrumnya belum tersentuh. Kita tidak bisa deal dengan Amerika untuk tidak menarik portofolionya dari kita. Oleh karena itu, SBY harus mengadakan pertemuan dengan Obama dan tidak hanya sekedar bicara masalah rambutan, bakso dan nasi goreng, tetapi SBY dan Obama, Budiono dan Ben Bernard lantas ngomong, "Bos, ini Anda akan menarik portofolio dari negara saya. Cobalah kita sepakat di level berapa khusus untuk kurs

ini saja supaya tidak mengganggu pasar saya". Itu yang dilakukan Rusia. Mereka melakukan suspense pasar benar-benar berdasarkan kesadaran. Amerika protes karena barangnya mandeg, tetapi Putin bilang bahwa mereka harus bicara dulu karena krisis currency menjadi masalah. Akhirnya, mereka negosiasi. Terakhir saya dengar mereka akan melakukan over the counter, yang dilakukan di luar bursanya.

Cina gila lagi. Mereka bilang tidak perlu ada *suspense*. Bunga sudah turun 150%. Dibilang sama Cina, "Ya biar ini kan mekanisme pasar". Sudah harga sahamnya seharga permen sugus, yang beli Jamsosteknya. Di Cina sekarang, barang semuanya dipegang oleh negara. Oleh karena itu, kita harus hati-hati terhadap penurunan *crude oil* yang terlalu tajam. Ini karena Cina over likuiditas dalam devisanya luar biasa, 2 triliun dolar. Cina bisa memborong semua kontrak di harga 30 US\$ sehingga ia bisa menaikkan harga kapan saja karena semuanya mereka yang pegang.

Kondisi kita sangatlah kacau. Jika kita hendak menetapkan harga *crude oil* sekian, di SPBU segini, kalau memang serius maka seharusnya Pertamina membeli kontrak, bukan masalah tahun depan BBM tanpa subsidi. Jika tahun depan BBM tidak akan disubsidi, maka mengapa tidak membeli saja kontrak untuk satu tahun mumpung harganya 30 US\$. Kalau harganya naik tinggal eksekusi aja sehingga tidak akan ada kenaikan di SPBU karena mengeksekusi kontrak lama. Nah, persoalannya yang seperti ini saja tidak dikerjakan. Padahal, kita tahu kalau ada kenaikan BBM pasti ada kerusuhan sosial.

Pada intinya, pasar finansial adalah *game*. Namun, ada sesuatu yang saya pelajari dari sistem sosial demokrat, mereka juga membiayai *social security* dari *game* pasar finansial juga. Tidak perlu tahu kucing hitam atau putih yang penting duitnya. Menurut saya, Cina sosial demokrat. Namun, Cina mengatasi dengan SWF, selisih finansial, begitu

dapat selisih finansial maka sektor riil digerakkan. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan adalah mengapa Jamsostek tidak menjadi maling yang baik, tetapi justru menjadi korban? Harusnya mereka mendapat 40%. Jika berbicara krisis, maka mereka mestinya bilang, "*Nich* pakai uang *gue* dulu". Menurut saya, mereka mestinya begitu.

Kelebihan Cina selain itu adalah selalu beli emas dan perak. Jadi, pas G20 Amerika menolak *Bretton Woods Agreement* karena mereka sudah tidak mempunyai emas lagi sehingga jika kembali ke *Bretton Woods System* maka sama saja *harakiri* ke Cina. Cina lebih gila

Pada intinya, pasar finansial adalah *game*. Namun, ada sesuatu yang saya pelajari dari sistem sosial demokrat, mereka juga membiayai *social security* dari *game* pasar finansial juga. Tidak perlu tahu kucing hitam atau putih yang penting duitnya.

lagi karena jika mempunyai kelebihan akan dibelikan emas untuk investasi masa depan. Itulah gilanya Cina. Cina adalah salah satu contoh pasar finansial yang dijadikan *social security*. Menurut saya, ini realita globalisasi. Jika tidak demikian, maka kita akan menderita.

Sosdem sebenarnya *invest* di saham juga dalam pengertian *social security*. Di kita, pasar *finance* jadi musuh bersama karena tidak pernah ingat sama kita.

Dalam pemahaman saya, ada 2 sistem yang bisa dilihat. Pertama, solusi Sosdem yang masih ada deal dengan sektor *finance*, tetapi diatur dengan ketat. Kedua, seperti Amerika Latin yang

melupakan sektor *finance*. Namun, jika kita menggunakan cara Amerika Latin, maka perlawanan di sektor finansial juga akan sangat besar mengingat kemampuan lobi mereka yang luar biasa. Oleh karena itu, kita memerlukan kompromi atau jalan tengah karena memang realitanya begitu kecuali revolusi.

Martin Manurung

Sebenarnya, dalam kasus Amerika Latin, sektor finansialnya tidak dibunuh, tetapi diseleksi duitnya. Diantara mereka sendiri ada bank, jadi duitnya diseleksi. Duit-duit yang mempunyai resiko tinggi tidak dipakai, tetapi *revenue* dari minyak diputar.

Ivan A. Hadar

Di Amerika Serikat, kelompok liberal yang di sana merupakan kelompok kiri mulai mengkritik Obama karena sudah mulai mengumpulkan orang-orang yang sebenarnya neolib. Nah, kecenderungan apa sebenarnya ini?

Yanuar Rizky

Tahun 2004, Obama terpilih menjadi senator. Dia mendapatkan dana kampanye dari SCAU (*Service Center American Union*), serikat pekerja otomotif, dan KIR untuk kesehatan. Tahun 2006 uang yang berasal dari kelompok ini sudah habis, paceklik. Saya membaca dari salah seorang analisis di *Washington Post* bahwa sebenarnya Obama diuntungkan keadaan karena Edward Kennedy mengalami *stroke* pada waktu mau konvensi. Intinya, keluarga Kennedy tidak menginginkan *trah* baru dalam Partai Demokrat, yakni *trah* Clinton. Nah, dicarilah orang yang paling memungkinkan mengalahkan Hillary Clinton, yakni Obama. Di sinilah mungkin, Obama berkenalan dengan Goldman Sach melalui keluarga Kennedy.

Jika kita perhatikan, maka penyandang dana terbesar adalah Goldman Saha, Soros. Dilihat dari



realitasnya, tidak dipungkiri bahwa Obama dari *grass root*, tetapi yang mengantarkannya ke kursi presiden adalah dari sektor *finance* juga sehingga wajar kalau sebagian kecewa kalau yang menjadi menteri keuangan adalah Gubernur Bank Central New York. Kelompok buruh sebenarnya tidak mengharapkannya. Namun, ia terikat dengan Goldman. Persoalan di Indonesia, menurut saya, juga tidak jauh berbeda. Meskipun kandidat berasal dari *grass root*, tetapi toh pada akhirnya yang mengantarkannya adalah dari finansial sektor juga. Lihat, misalnya, "iklan hidup adalah perjuangan". Bukankah sekarang mulai seret? Jadi, bisa kita lacak siapa sebenarnya yang berada di balik itu.

Amir Effendi Siregar

Kalau ditarik secara garis besar dari perspektif historis jaman dulu untuk melihat sekarang ini secara makro karena tadi Bung Yanuar sudah sangat baik sekali menjelaskannya secara mikro dan makro maka saya melihat

bahwa sejak 1900an ketika kapitalisme berjalan, dan kemudian muncul revolusi Bolshevik 1917 sebagai paham alternatif dimana negara memegang peran penting dalam ekonomi kapitalisme ortodoks dulu yang hancur pada tahun '30-an, mengalami *great depression* pertama. Itu lebih mengutamakan apa yang disebut Martin tadi sebagai *over capacity* di sektor riil. Jadi, belum masuk ke perdagangan finansial. Sektor riil mengalami *over capacity* dan monopoli terjadi kemudian menyulut krisis pertama kali pada tahun 1930-an. Itulah yang sebenarnya coba diatasi oleh John Maynard Keynes melalui intervensi negaranya yang pertama. Padahal waktu itu, jika saya tidak salah, banyak ekonom-ekonom kapitalis sudah mulai mempelajari ekonomi terpusatnya Rusia (dulu Uni Sovyet) yang begitu cepat dalam mengejar industri yang sudah dibangun oleh kapitalisme. Namun kemudian, Keynes justru menyelamatkan kapitalisme melalui *state intervention*. Nah, menariknya dinamika kapitalisme

ternyata bergerak ke sektor finansial yang kemudian mengalahkan sektor riil. Krisis tahun 1997 terjadi dan mempunyai imbas ke kelas menengah. Nah, krisis yang sekarang terjadi lebih daripada krisis mata uang. Lebih mengerikan lagi, krisis 2007/2008 ini justru bersifat ganda, bukan hanya pada perdagangan mata uang, tetapi juga eksploitasi orang miskin melalui apa yang sering disebut sebagai subprime mortgage. Oleh karena itu, menurut saya, situasi krisis sekarang ini lebih parah dibandingkan dengan krisis tahun 1997/1998. Meskipun Soros sudah berbicara mengenai hal ini.

Nah, pertanyaan sekarang adalah model-model apa yang mesti kita ikuti? Apakah model Amerika Latin atau model Cina? Menurut saya, Cina lebih memainkan "kapitalisme negara" meskipun ia menjadi monopoli negara. Saya tidak tahu persis mana pilihan yang paling tepat. Namun, kita memang harus belajar perspektif Amerika Latin, tetap di finansial tetapi diseleksi atau dengan perspektif Cina yang bermain di sektor

finansial untuk kemudian didistribusikan ke bawah. Mungkin juga, kita dapat menggunakan model Jerman yang juga bermain di sektor finansial, tetapi, jika saya tidak keliru, mereka lebih ke *free money* dibandingkan dengan *debt money*.

Cina menjadi negara yang cukup menarik sebenarnya jika diikuti perkembangannya. Ia lincah sekali bermain. Dulu, ia mempunyai konstitusi yang secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar ekonominya adalah *socialist economy*, kemudian diubah dan menambah *market economy is major component of socialist economy*. Terakhir, mereka mengubahnya menjadi *socialist market economy*.

Menariknya, jika kita belajar ke Amerika Latin atau Cina, jika di Amerika Latin, demokrasi politik dan sipilnya seiring sejalan, sedangkan Cina atau Cuba tidak demikian. Sebaliknya, mereka melalui partai. Ini, menurut saya, model-model yang harus dicari untuk kita yang terus terang jawabannya belum final. Namun, proses rumusan penting memang sudah kita dapat bahwa negara harus memberi perhatian. Demokrasi politik dan sipilnya harus sejalan dengan demokrasi ekonomi, budaya dan sosial.

Ivan A. Hadar

Ya, intinya kita harus melakukan pilihan. Pertanyaannya pemerintah sekarang sudah melakukan pilihan belum?

Martin Manurung

Kalau menurut saya, pilihan-pilihan itu merupakan pilihan yang sangat ideal. Namun, persoalannya bagi saya jangankan pilihan yang se-sophisticated itu, pilihan untuk melakukan langkah-langkah minimal untuk tidak tertular krisis global tidak dilakukan. bahkan, yang terjadi obscure, selalu ragu-ragu. Dari sisi neolib saja, dengan signal pasar yang kacau semacam itu, tidak ada juntrungannya. Langkah minimal selamatkan kita dulu. Bagaimana

mencegah PHK 2 juta orang. Menurut saya, itu dulu. Setelah itu, baru bisa memikirkan model-model tadi.

Amir Effendi Siregar

Maaf, saya ada tambahan sedikit yang dimaksud kita di sini adalah kaum sosial demokrat karena pemerintah sebenarnya belum mempunyai perspektif. Kita yang sudah mempunyai perspektif sosial demokrat.

Peserta

Memang ada yang menarik relasi neolib yang menurunkan juga liberalisme di bidang politik yang memaksa negara Amerika Latin menjalankan mekanisme politik dan sepertinya sudah jadi urat nadi seperti pemilu dan itu sudah tidak dapat ditolak di Indonesia. Mentalnya sudah sulit untuk dipukul mundur dengan dihajar lagi oleh kebangkitan militer dan semacamnya.

Hanya saja, persoalan di kita dibandingkan dengan negara Amerika Latin adalah kemiskinan perspektif. Parpol mungkin punya banyak tawaran di atas kertas bagus, tetapi orang yang mengimplementasikan belum mempunyai gambaran yang lengkap bagaimana menjalankan program yang sebenarnya sudah cukup sosial demokrat. Oleh karena itu, jika kita hendak mengandalkan satu partai menengah yang mempunyai idealisme sosialis religius saya rasa masih sangat berat untuk menghadapi neoliberalisme. Untuk persatuan yang lebih luas atau mungkin teman-teman PDIP, misalnya. Namun, memerlukan persatuan dan kemudian menentukan perspektif kita bersama. FES mungkin bisa memfasilitasi.

Andito

Jelas tadi sudah disampaikan Mas Yanuar, yakni masalahnya imajinasi yang *over limit* dari spektrumnya yang sebenarnya nilai tukar bukan komoditi. Nah, tawarannya sudah riil, yakni pembusukan kelas biar ada gesekan

karena syaratnya jika seseorang tidak bisa dikitik-kitik maka perlu diguyur dengan air. Itu riil. Artinya begini, mengapa banyak orang bunuh diri di pasar modal daripada di sektor riil? Ini karena ada ekspektasi yang dibangun dan sektor riil lebih nyata, sama seperti yang didapat uang dari hal yang jelas, ada keringat yang dikeluarkan. Persoalannya adalah di Sosdem kurang ada pemahaman mengenai trust. Padahal, bukankah ini yang ditekankan oleh Francis Fukuyama. Jika memang, misalnya, pasar modal dari dulu tukang tipu karena ia berkuasa maka ia membuat uang. Ia cetak uang semaunya, kemudian dia jual ke negara miskin. Kebijakan Amerika sebenarnya bukan yang intrinsik, tetapi persoalan emas.

Nah, kembali ke trust. Jika trust sudah terciptakan, maka efeknya kemudahan pemberian kredit. Di Perbankan, masih ada jaminan, dan akhirnya menjadi ambivalen karena pada saat yang sama sosdem menyarankan bahwa untuk menghidupi masyarakatnya ini melalui pasar finansial. Padahal, kita tahu bahwa masalah jaminan tersebut tidak ada dalam sektor riil.

Nah, sebetulnya, apa yang dilakukan oleh Mohammad Yunus adalah riil. Pendapatan yang dia hasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan negara yang ikut main di wilayah imajinasi. Itu mungkin perlu kita lebih dalam karena dalam kenyataannya orang-orang suku anak dalam tidak pernah terkena krisis. Di Aceh, orang-orang yang hidup di dipinggir pantai tidak terjadi krisis.

Timbul Siregar

Saya pikir begini PHK 2 juta orang merupakan prediksi, dan itu belum riil. Artinya, saya kira angka-angka itu sengaja diciptakan untuk menakut-nakuti dunia usaha. Misalnya, pertengahan 2009 akan ada PHK dan itu diciptakan untuk menakut-nakuti dunia usaha supaya buruh menerima saja PHK tersebut.

Mian Manurung

Namun, ada informasi di koran bahwa ada 3 perusahaan garment di Depok yang tutup dan 15000 karyawannya dirumahkan.

Timbul Siregar

Nah, menurut saya, jangan dipikir mereka akan tutup lalu stop. Kalau dilihat lagi mereka akan pindah lokasi ke Sukabumi. Indonesia masih menarik untuk investasi. Namun, ia akan lari ke Sukabumi dengan upah minimum yang rendah.

Sebelum krisis, PHK sudah banyak. Nah, para pengusaha itu sekarang mintanya agar karyawan tetap itu berubah menjadi karyawan yang sifatnya fleksibel, yaitu *outsourcing*, kontrak dan magang. Di daerah Krawang, perusahaan asing, 60% karyawannya magang dari 1000 karyawan. Ini aneh karena magang hanya cukup Rp. 500.000,-. Oleh karena itu, kita harus kritisi sehingga krisis ini tidak kita terima begitu saja, utamanya untuk buruh. Di sini, strategi perlawanan kita tidak ke pengusaha, tetapi ke negara, yakni bagaimana APBN 1000 triliun ini berapa persen jatuh ke rakyat, riil untuk pekerja karena mereka juga penyumbang pajak PPh dan PPN. Misalnya, mereka belanja di Indomaret mereka kena pajak juga.

Persoalannya bagi kita adalah bagaimana mempertahankan daya beli. Kegagalan pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga itulah yang menjadi persoalan kita dengan pengusaha. Tahun 1997 beras Rp. 700,- upah minimum waktu itu bisa buat beli 350 kilogram beras. 10 tahun kemudian 2008, UMR Rp. 972.000,- buat beli beras dengan harga Rp. 5000,- hanya bisa membeli 160 kilogram. Artinya, daya beli kita turun. ILO *me-release* risetnya bahwa 10 tahun terakhir produktivitas kita naik 60%, artinya dengan daya beli kita yang turun, produktivitas kita naik. Sebenarnya, Indonesia dari segi sumber daya, tenaga kerja makin menarik hanya masalahnya salah urus negara. Oleh karena itu, strategi perjuangan

kita adalah bagaimana melawan negara karena capek melawan dengan pengusaha?

Ridwan Manoarfa

Ketika kita berbicara negara, maka kita berbicara partai politik karena mereka yang mengisi ruang-ruang itu. Persoalannya kita tidak mempunyai parpol yang mempunyai pemikiran ekonomi alternatif, yakni bagaimana mengelola perekonomian kita. Nah, justru kalau kita ditakut-takuti sama PHK, maka saya rasa orang tahu bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa karena hampir semua di Indonesia buruh kontrak. Menurut saya, ruang tersebut memungkinkan terjadinya perlawanan buruh. Namun, kalau perlawanan tersebut tidak dirumuskan dengan baik, maka mendorong munculnya tindakan represif dengan alasan pengamanan ekonomi, dan seterusnya. Bahkan, sekarang ini, ada diskusi yang mencoba mereproduksi, misalnya, dari Depnaker kemarin jika seandainya mengubah pesangon karena jumlahnya terlalu besar agar investasi masuk bagaimana komentar buruh? Saya bilang kalau diubah nanti akan kacau karena merupakan bentuk perlindungan kepada buruh. Mengapa uang PHK mahal karena masalahnya jaminan sosial tidak ada, sedangkan jaminan sosial tidak disentuh?

Lalu, kita berharap kalau melihat kondisi krisis ini maka negara yang mengambil alih, tetapi persoalannya pemimpin kita tidak mempunyai visi sosdemnya. Semuanya berpikir ala kapitalis. Ini dapat kita lihat bagaimana mereka mengelola jaminan sosial. Sudah jelas UU-nya minta UU sendiri diubah bukan PP apalagi BUMN sehingga ujung-ujungnya kembali ke partai politik. Apakah ada partai politik yang mempunyai visi sosial demokrat? Partai Buruh, menurut saya, ditinjau dari segi gagasan merespon banyak tentang apa yang disebut negara kesejahteraan itu. Namun, jika dilihat dari orang-orangnya,

maka akan muncul pertanyaan apakah benar mereka kemampuan untuk melaksanakan gagasan tersebut. Dengan demikian, elit-elit sosdem harus muncul mendiskusikan berbagai persoalan dan memberikan tawaran-tawaran yang kemudian mengerucut. Nah, persoalan kita sekali lagi pertarungan di tingkat elit dalam hal argumentasi gagasan tidak muncul.

Martin Manurung

Masalahnya korannya juga neolib. Menurut saya, tentang PHK massal 2 juta orang itu merupakan *world estimate*. Dalam kondisi ekonomi yang tidak krisis saja, setiap pertumbuhan 1% maka sekitar 300.000 tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Jika sekarang 6,8 prediksinya sekitar 3%. Kira-kira seperti itu. Artinya, kalau pemerintah menjadikan hal tersebut untuk menakut-nakuti, maka menurut saya pemerintah goblok juga. PHK 2 juta orang, masalahnya struktural bukan PHK massal biasa. Uraian melawan negara saya rasa tepat. Ini karena ada tendensi pemerintah mengadu domba pengusaha dengan buruhnya. Di Kompas, misalnya, diberitakan mengenai himbauan agar pengusaha tidak memecat buruh. Persoalannya memangnya pengusaha dendam dengan buruh? Para pengusaha bukankah membutuhkan buruh untuk produksi sehingga mengapa mereka harus melakukan PHK jika tidak mempunyai alasan? Oleh karena itu, pemerintah harusnya membuat kondisi agar tidak terjadi pemecatan. Negara jangan lupa bertanggung jawab untuk hal itu.

Ridwan Manoarfa

Mungkin juga karena pemerintah ingin lari dari tanggung jawab

Timbul Siregar

Itulah alasan mengapa saya bilang bahwa angka 2 juta itu jangan-jangan ciptaan pemerintah.



Rudi

Menurut saya, mengenai negara dan pasar adalah begini. Negara dianggap wilayah sosialisme, sedangkan pasar adalah kapitalisme. Nah, itu selalu dipertentangkan sehingga negara campur tangan dianggap sosialis. Sebenarnya, kita bisa melihat dalam liberalisme negara sama sekali tidak campur tangan. Dalam neolib, negara juga memfasilitasi seperti ekspansi liberal atau di negara maju ada proteksi. Nah, pada saat memilih neo-lib, negara angkat tangan, negara dianggap sumber daya yang akan menyelamatkan pasar. Kita lihat bagaimana neo liberal menggunakan negara, bagaimana Keynesian menggunakan negara, dan bahkan sosialis juga menggunakan negara. Menurut saya, persoalannya kemudian adalah bagaimana mendefinisikan peran negara dalam pasar apakah negara sebagai pengendali, penjaga persaingan bebas, yang kemudian berbicara mengenai redistribusi kekayaan dengan pajak, investasi sosial, dan sebagainya. Jadi, perlu dibuka pemikiran di ekonom bahkan intelek kita bahwa neoliberal bukan berarti tidak ada negara sama sekali.

Yanuar Rizky

Ini mengenai soal PHK tadi. Menurut saya, pemerintah saat ini malah menginginkan isu PHK hilang karena mau pemilu. Kemarin, yang omongan Timbul tadi, tentang relokasi ke Sukabumi. Saya cukup kaget juga waktu mendapat sms dari BI. Saya berfikir mengapa tidak berbicara mengenai relokasi tersebut. Ini berarti ada pergerakan di sektor riil.

Menurut saya, pemerintah sekarang menginginkan isu-isu PHK hilang dari media karena akan pemilu. Terlepas siapa yang akan bermain di isu ini, tetapi menurut saya *killing factor* ini harus kita mainkan. Jadi, biarkan saja siapa yang akan bermain di isu tersebut, mau saling hajar antarpolitisi tidak menjadi soal, tetapi yang penting isu besarnya adalah perlawanan negara atau siapapun ada yang menggerakkan. Isu besar ini pasti ada yang *men-drive*, tetapi kita tidak tahu siapa orangnya.

Jika kita meninggalkan isu media, maka media akan meninggalkan kita juga. Dalam konteks ini, kita harus memperhatikan realita bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan opini karena sektor riilnya di sini. Jadi, bagaimana menyatukan langkah

tersebut. Isu apa yang digiring? Yang penting kita ikut mewarnai saja karena tidak mempunyai keistimewaan untuk *men-drive* isu terlepas dari pragmatisme media itu sendiri. Jadi, kita harus hajar terus. Ini karena jika kita melawan isu tersebut, maka kita harus melihat psikologi media juga apalagi ada yang pesan. Nah, coba perhatikan dengan seksama siapa yang banyak menyerang PHK ini, diantaranya Kompas, MNC group, TVOne. Jadi, jika memang nantinya koalisi Ical dengan SBY pecah maka pasti akan menghajar SBY dengan media. Mereka akan menggunakan media dengan menampilkan kenistaan-kenistaan ini. TVOne, misalnya, memberitakan pembagian daging kurban yang menelan korban beberapa kali. PHK juga dengan demikian. Liputan terus-menerus. Ini jelas merupakan mainan politik dan kelihatan sisi polarisasi mediana. Masak pembagian daging kurban di Mabes Polri dan memakan kurban. Bukankah ini merupakan dramatisasi isu dan benar-benar menjadi anomali. Fenomena sosial menjadi isu.

Launa

Saya hanya akan menambahkan dari



Illustrasi: Kuss Indarto © Friedrich-Ebert-Stiftung

Bang Amir tadi karena perspektifnya sebenarnya sudah banyak. Persoalannya dari diskusi ini kita tidak mempunyai kendaraan untuk menyampaikan ide-ide sosdem. Pertanyaan saya adalah apakah sosdem mempunyai perspektif perubahan dari dalam karena jika saya membaca tesisnya Thomas Meyer semuanya tentang visi sosial demokrasi. Menurut saya, ini penting karena perubahan Amerika Latin menggunakan kekuasaan politik cukup panjang. Partai buruh didesain cukup panjang, dan tidak seperti di kita dimana konflik elit sangat tajam dan tidak ada saling kepercayaan. Partai buruh dibuat, tetapi tidak ada pemilihnya padahal buruh jumlahnya jutaan. Saya kira kendalanya secara formal adalah partai politik karena kita tidak mungkin bermain di pinggir lapangan terus karena capek. Usulan untuk menghajar negara tidaklah mungkin jika kita tidak mempunyai

kekuatan politik formal.

Oleh karena itu, harus ada diskusi diantara kita mengenai apa yang menarik untuk dilakukan di masa yang akan datang. Saya kira ini penting karena kalau hanya sebatas wacana akan melelahkan. Jadi, apa kemudian alternatifnya?

Andito

Salah satu ciri sosdem adalah partisipasi publik, dan ini mensyaratkan independensi kelas menengah. Nah, independensi kelas menengah ini mensyaratkan kesediaan logistik swadaya lepas dari mekanisme pasar liberal. Nah, independensi warga otomatis menyangkut ketersediaan suatu mekanisme komoditi yang tidak terikat dengan pasar finansial. Oleh karena itu, mengapa pada akhirnya, secara alamiah, sosdem sangat meng-*increase* segala hal yang sifatnya

multikultural, dan biasanya sangat fobia dengan segala bentuk uniformitas. Cina, misalnya, apapun nama sosialisme yang mereka gunakan, tetapi tetap melakukan pembangunanisme atas nama sosialisme karena yang dilakukan kapitalisme gaya Amerika.

Menariknya, jika di Jerman, independensi warga dan isu formalnya nasionalisasi sehingga semangat ini menggugah daya tarik konsumtif sehingga, misalnya, budaya Indonesia tidurnya di tikar bukan di kasur busa bukan di *spring bed*. Dengan demikian, daya tarik masyarakat untuk membuang uangnya keluar tidak terjadi. Uang berputar di dalam. Artinya, budaya –budaya tanding sebenarnya secara alamiah sudah eksis di masyarakat. Hanya saja, budaya politik kita seperti jenglot, yang kita lihat adalah yang mainstream. Padahal, jika kita tidak membeli, misalnya, Koran Tempo,

Kompas, dan lain sebagainya pasti mereka akan ambruk. Menurut saya, kemenangan kapitalisme adalah karena kemampuannya dalam mengolah imajinasi, dan kita mengakui imajinasi itu ada.

Penekanan pasar sosial dalam sosdem adalah kesetaraan melalui sharing saham dengan buruh. Jika seandainya saya mempunyai saham di MNC, maka saya akan rela untuk mengeluarkan uang di situ. Oleh karena itu, menjadi terjawab mengapa kita harus membeli ke Alfamart, Indomaret sehingga uangnya keluar semua. Kenapa tidak menggunakan koperasi sehingga uangnya berputar di dalam sendiri.

Launa

Saya ingin mengatakan begini bahwa studi-studi sudah banyak dilakukan, tetapi persoalannya pada masa datang di tingkat nasional kita lemah. Jika saya simak presentasi tadi, maka sepertinya kita tidak mempunyai peluang. Buruh kita lemah, dan petani tidak terorganisasi dengan baik. Meskipun di tingkat bawah sebenarnya bisa disatukan dengan isu. SKB 4 menteri kemarin, misalnya, hampir semua buruh melakukan demonstrasi. Pagar DPR toh juga bisa ambruk juga. Oleh karena itu, di tingkat nasional, apa yang harus kita lakukan dalam perspektif sosdem yang menyiapkan prasarana dan tidak hanya sebatas wacana atau bacaan.

Amir Effendi Siregar

Kira-kira sebulan lalu saya mendengar sebuah presentasi yang intinya mengatakan bahwa pasar uang tidak benar, tetapi yang benar adalah sektor riil. Oleh karena itu, mereka melakukan gerakan dinar. Pertama, intinya, dunia finansial harus direformasi. Kedua, melanjutkan apa yang disampaikan Bung Ridwan. Itu yang saya bilang bahwa pikiran sosdem ada, tetapi belum terorganisir dengan baik. Kendaraan tunggal memang tidak ada, tetapi berbagai kendaraan

dapat diidentifikasi, baik partai politik maupun elit. Inilah mengapa kita butuh diskusi, jurnal, dan sebagainya yang men-suplay pikiran-pikiran di tingkat elit atau organisasi politik. Coba kita bayangkan seorang Sultan Yogya, yang tim intinya Garin Nugroho, Sukardi Rinakit, Muslim Abdurahman. Nah, mereka secara ideologis dekat dengan sosial demokrat. Sultan mungkin tidak mempunyai kedekatan dengan pikiran sosdem, tetapi kedekatan mereka dengan orang-orang ini akan sangat membantu masuknya pikiran-pikiran sosdem. PDIP juga demikian. Akhirnya, kita hanya bisa melihat siapa saja yang dekat. Pertaruhan akan datang bukan hanya soal partai politik, tetapi juga orang. Mungkin ini khas Indonesia, setidaknya untuk sekarang ini dimana sosdemnya tidak lahir dari partai besar. Namun, muncul di berbagai lini.

Berikutnya, peta media. Radio memiliki jangkauan paling luas bahkan sampai *grass root*. Radio juga merupakan media paling demokratis di Indonesia dengan *ownership* dan *content*-nya juga bagus. Kalau mau *campaign* sampai *grass root*, maka radiolah yang dapat kita gunakan. Ini karena radio paling luas jangkauannya di seluruh Indonesia, baru kemudian TV.

Azman

Tetapi kita hanya mendengarkan radio di mobil saja.

Yanuar Rizky

Untuk Azman, saya pernah diminta RRI pro 2 jam 3 pagi. Nah, siapa yang telepon jam segitu, tetapi ternyata petani semua yang telpon sampai kita pusing.

Amir Effendi Siregar

Itu yang saya bilang radio merupakan yang paling demokratis. Jadi, ini yang saya bilang bahwa radio merupakan media paling demokratis. Yang kedua tv, yang menarik *ownership*-nya dibagi 2, lokal dan nasional. Yang nasionalnya

MNC-RCTI, TPI, Global dikuasai Hary Tanu. Ia akan dekat ke semua calon. Kemudian, Metro Surya Paloh, ada dinamika Golkar maka pasti akan ikut main. Kemudian, SCTV, Suryaatmaja, dia akan dekat dengan semua orang. Berikutnya Indosiar, ia pasti akan memberikan perhatian kepada semua orang. Antv dan TVOne *owner*-nya mayoritas di Bakri jadi pasti akan ada perspektif. TV7 dan Trans dimiliki oleh Khairul Tanjung baru sebagian Kompas. Ini peta tv nasional. Jadi, sebagian besar bisnismen yang akan mencari keuntungan. Sekarang, kita baru melihat *ownership*-nya tv lokal, yang paling kuat dipegang group Jawa Post, kecuali di Bali. Kalau media cetak ada 2 besar, yakni Kompas dan Jawa Pos. Semua ini harus menjadi perhatian dan perhitungan.

Puji Rianto

Saya mau menyambung apa yang dikatakan Bang Amir tadi untuk memeriahkan perspektif dalam komunikasi. Setahun lalu saya dan teman-teman melakukan riset di beberapa daerah, salah satunya di Nunukan. Betul yang disampaikan Bang Amir bahwa radio dalam komunitas terutama di daerah pinggiran merupakan media komunikasi kedua karena tv tetap yang pertama. Dalam beberapa kali riset, memang tv menjadi nomor 1 untuk sumber informasi dan hiburan baru kemudian radio. Radio ini memiliki loyalitas yang luar biasa. Saya kira ini masih ada 70% yang mendengarkan radio, dan merupakan tingkat pendengar yang luar biasa. Saya kira ini bisa dipakai sebagai instrument untuk menyebarkan ide-ide sos-dem dan tentunya kemudian problemnya pembingkaiannya. Bagaimana pesan sampai di tingkat *grass root* karena kalau bicara dalam konteks akademik akan susah diterima. Lalu, bagaimana membumikan ide-ide sos-dem dengan persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat. Katakanlah petani dan buruh sehingga dialog jadi makin

dekat. Yang menarik adalah bagaimana pendengar radio mendengarkan siaran radio dari pagi-sore karena mereka tidak mempunyai kerjaan, barangkali. Ketika itu bisa dipakai sebagai media yang baik untuk mempresentasikan informasi tadi. Menurut saya, ini sesuatu yang luar biasa.

Yang kedua tidak bisa dipungkiri, dalam pengamatan saya, penyebaran ide sosialis tak bisa lepas dari penyebaran buku pasca-reformasi. Kalau kita masuk ke toko buku di Yogja, misalnya, dari pemikiran lama Marx sampai pemikiran baru laris manis di Yogja. Nah, sekarang bagaimana teman-teman membumikan gagasan ini karena kalau dilihat dalam konteks perspektif ekonomi politik media memang agak susah. Seperti yang tadi disinggung bahwa kita tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Namun, alternatif lain mungkin perlu dicoba. Misalnya, ada kisah menarik di Iran ketika penguasa Iran yang menjadi kaki tangan Amerika digulingkan. Pada waktu itu, dikenal dalam ilmu komunikasi dengan Revolusi Xerox karena menggunakan fotokopian untuk menyebarkan gagasan. Jadi, bagaimana, misalnya, menggunakan media yang kecil-kecil ini untuk menyebarkan gagasan. Menurut saya, kemenangan kapitalis, neolib karena mereka mempunyai banyak ahli propaganda dan kita kekurangan itu. Nah, sekarang kita juga harus bertarung dalam konteks wacana. Jika kapitalisme menjual mimpi, maka, barangkali, kita menjual solusi.

Giri Sandra

Saya belum mendengar poin-poin praktis untuk menyelesaikan persoalan kita ke depan. Minimal sebagai caleg, saya mempunyai alternatif konkret untuk rakyat. Jadi, hal-hal yang simpel saja.

Martin Manurung

Saya akan memberi komentar tentang *local wisdom* dan sebagainya. Saya ingat kurang lebih beberapa waktu

lalu, dan saya memanasi-manasi gereja untuk berdiskusi tentang neoliberalisme dalam krisis. Mereka berhasil kita kompor-kompори. Pendeta dari Papua, Kalimantan, Sumatra kumpul di wisma Samadi. Mereka mendiskusikan bagaimana mengatasi PHK. "Oh, gereja membuat kolam lele dumbo, tanaman organik, dan itu sudah ada di Samosir." "Ok," saya bilang. Namun, persoalan kita adalah struktural. Oleh karena itu, melawannya harus dengan struktur sehingga saya sepakat jika negara harus kita tuntut untuk melaksanakan kebijakan mencegah krisis dan jaminan sosial. Fokus di dua hal itu. Penjagaan kontrol lalu lintas modal, jangan main di sektor keuangan yang tidak tahu juntrungannya. Memperkuat sektor riil dengan menghapuskan hambatan investasi dalam artian bukan solusi neolib, tetapi *cost cutting* jadi *trade costing* harus kecil-kecil semua. Pungli disikat, birokrasi disikat, infrastruktur diperbaiki. Menurut saya, ini akan memperbaiki sektor riil.

Amir Effendi Siregar

Itu pertanyaan Ridwan tadi. Negara harus ada yang menjalankan. Nah, sekarang pertanyaan siapa?

Martin Manurung

Nah, ini runtutannya. Menurut saya, kita bisa melawan melalui media, via demo, via politik yang penting *all out* dengan menggunakan semua jalur yang mungkin karena probability, *electability* SBY masih gede. Lantas, bagaimana cara melawannya? Menurut saya, "*better you pick the devil you don't know than pick the devil you know*". Bukankah demikian? Perlawanannya bisa dari berbagai jalur dari PBR, Sultan ataupun Fadel Muhammad. Jadi, bisa menggunakan semua jalur. Yang penting jangan kehilangan fokus bahwa masalahnya struktural. Tri partit jangan berbicara mengenai upah, tetapi masalah kebijakan makro, yakni bagaimana jaminan sosial. Jadi, bukan

masalah upah, pesangon. Negara harus *out of the box*. Jangan terperangkap persoalan semacam ini terus-menerus.

Peserta

Singkat saja mengenai BI bagaimana? Apakah BI bisa diambil kembali dalam arti tidak mencari keuntungan seperti sekarang?

Yanuar Rizky

Intinya apa yang harus dilakukan? Bukankah begitu pertanyaannya? Apakah perbankan mempunyai uang. Waktu tahun '02 saat-saat krisis ada 1000 triliun yang orang pikirkan dana asing masuk. Kemudian, ada 1600 triliun, dan sekarang angkanya 1500 triliun sehingga *turn over*-nya baru 100 triliun. Sudah keluar 12% untuk portofolionya, sehingga sekarang punya 52% ambil kasar 52% adalah uang dia sehingga uang yang *stay* 700 triliun. Nah, pertanyaan yang Bank Indonesia tadi maka mestinya ia harus mempunyai struktur seperti yang tadi saya bilang?

Mestinya, kita bisa menuntut ke Menteri Tenaga Kerja petanya bagaimana? Begitu juga dengan Menteri Perdagangan dan Gubernur BI. Dari 700 triliun ini, mestinya bisa diidentifikasi mana yang punya dana pensiun, dan lain sebagainya. Orang ribut 100% *blanket guarantee*-nya. Apakah kalau 100% *blanket guarantee*-nya kredit akan mengucur? Saya tidak percaya. Bahkan, insentif bunga rendah pun mereka tidak akan ke sana. Nah, apa yang akan dilindungi Kadin? Seperti yang saya bilang tadi, ketika pasar naik ada black market antara modal dan perbankan. Semua barang sekarang dalam kondisi omzet, dan jika sampai tidak ada juntrungannya, maka pada akhirnya akan menimbulkan krisis likuiditas. Nah, di ini, kita mempunyai peluang mengulang kisah lama.

Nah, menurut saya, jika kasusnya BI mempunyai dana 700 triliun tadi, maka sebenarnya mereka bisa menawarkan antara kebijakan fiskal dan moneter.

Sekarang, mereka menawarkan ke GP Morgan juga tidak akan dibeli. Mengapa kita tidak menawarkan konversi deposito, misalnya? Jika ini terjadi, maka tidak akan ada uang keluar. Namun, orang biasanya tidak mau mengkonversi begitu saja. Menurut saya, dibandingkan dengan melakukan *buy back* yang belum jatuh tempo maka buat apa? Kita tidak perlu membahas masa lalu, tetapi harusnya masa depan. Nah, uang-uang yang produktif ini dilarikan ke obligasi baru meskipun akan ditentang teman-teman yang anti utang karena sama saja dengan utang baru. Namun, persoalannya kita tidak mempunyai pilihan. Dalam situasi krisis semacam ini, pada dasarnya, orang tidak peduli dengan suku bunga, tetapi keamanan.

Nah, tadi disinggung mengapa Mohamad Yunus berhasil karena sebenarnya ia arisan model kompleks. Saya meminjamkan duit ke Anda tidak akan menjadi masalah karena memang kenal dengan baik. Inilah yang dikembangkan oleh Mohammad Yunus. Persoalannya kita tidak pernah mengembangkan model dimana kita meminjam uang kepada orang-orang yang kita kenal dulu. Ini potensi pertama yang bisa dikembangkan. Potensi kedua bisa kita lihat di uang-uang yang ada di APBD ataupun DAU yang dipindahkan sehingga sebenarnya kita tidak mengalami likuiditas.

Menurut saya, kita harus membiarkan likuiditas. Untuk itu, kita memerlukan dayung, dan dayung tersebut adalah kepemimpinan. Persoalannya adalah apakah kepemimpinan kita mau berusaha dengan memanfaatkan segala yang ada. Nah, pemimpin kita ini harus dipacu. Ia harus dipengaruhi agar mau berusaha. Pemimpin kita ini tidak mau dibilang inteligensia rendah. Oleh karena itu, katakan saja, ia mempunyai intelegensia rendah agar mau berusaha, terpacu untuk mencari pemecahan persoalan yang ada.

Dengan demikian, menurut saya, bagaimana memanfaatkan semua outlet



agar pemimpin kita ini merasa gerah sehingga akan berusaha menyelesaikan persoalan. Jika mengatakan, misalnya, "Ah, masa loe ndak punya solusi?", maka ia akan gerah dan selanjutnya berusaha. Apalagi pemimpin kita ini sangat menghitung rating. Menurut saya, kita harus menyerang semuanya baik yang *incumbent* maupun yang sedang ke arah sana. Semua orang harus merasa tertekan sehingga akan mengingat bagaimana caranya keluar. Oleh karena itu, yang paling mungkin adalah bagaimana meng-*influence* mereka karena berbicara mengenai perahu di 2009 masih sangat berat.

Kemudian, bagaimana dengan Bank Indonesia? Sekarang ini, Bank Indonesia menjadi common enemy karena aliran dan BI-DPR. Jika dilihat dari sudut Bank Indonesia, maka dia akan berfikir "Wah, saya ndak ambil uang sesenpun, tetapi saya dikorbankan oleh sistem politik ini". Menurut saya, ini akan sangat berbahaya jika terjadi pemberontakan institusi. Sekarang ini, memang belum kelihatan, tetapi tidak menutup kemungkinan ke arah sana.

Peserta

Lalu, bagaimana dengan ekspor-impor?

Yanuar Rizky

Seperti saya bilang masalah konsumsi kita masih tebal. Misalnya, saya baru tahu juga ternyata belanja di sini jauh lebih murah daripada di Singapura untuk barang-barang yang branded karena di Singapura currency-nya melemah. Jika pemerintah berfikir agak gila, misalnya, masuk ke Indonesia tidak menggunakan visa dengan syarat mau belanja dengan limit 1 juta, maka akan jauh lebih konkret. Dengan demikian, menurut saya, pemerintah dapat menggunakan konsumsi yang besar ini untuk negosiasi order. Jadi, kita harus realistis bahwa yang disebut pasar ekspor bukanlah selalu barang jadi, tetapi juga pasar order sehingga bagaimana yang menjadi persoalan adalah meningkatkan posisi tawar untuk menyelamatkan buruh, sektor riil. Perilaku orang-orang kaya tidak perlu dicerca, tetapi justru kita jual dan menjadi solusi produksi.

Ivan A. Hadar

Jadi, kata-kata akhirnya "tekan dan dorong".



Resume Diskusi

KRISIS KEUANGAN GLOBAL:

DAMPAK BAGI INDONESIA DAN SOLUSI SOSDEM

Pendahuluan

Krisis yang terjadi saat ini, seperti dikemukakan Ivan A. Hadar, berbeda dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998. Menurutnya, jika krisis pada tahun 1997 pusatnya di negara-negara Asia (Tenggara dan Timur), maka sekarang ini pusat krisisnya adalah Amerika Serikat, dan imbasnya dapat dirasakan di banyak belahan dunia. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih menjadi negara adidaya meskipun banyak pengamat mulai meragukannya. Meskipun demikian, kekuatan-kekuatan baru sudah mulai muncul seperti Cina. Hingga saat ini, Cina mempunyai cadangan devisa terbesar di dunia, dan menjadi salah satu negara yang melakukan fiscal stimulus paling kuat. Menurut Ivan A. Hadar, ini berbeda dengan Indonesia yang meskipun mempunyai cadangan devisa cukup banyak, tetapi hanya digunakan untuk menjaga stabilitas rupiah yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan produktif di sektor riil.

Lebih lanjut, Amir Effendi Siregar

mengatakan bahwa krisis yang sekarang terjadi lebih daripada krisis mata uang. Ini karena krisis 2007/2008 ini bersifat ganda, bukan hanya pada perdagangan mata uang, tetapi juga eksploitasi orang miskin melalui apa yang sering disebut sebagai subprime mortgage. Oleh karena itu, menurut Amir Effendi Siregar, situasi krisis sekarang ini lebih parah dibandingkan dengan krisis tahun 1997/1998 meskipun sebenarnya George Soros telah mengingatkan jauh sebelumnya.

Ditinjau dari perspektif historis, krisis yang terjadi sekarang ini sebenarnya bukanlah kali pertama terjadi. Tahun 1997/1998, krisis keuangan menghajar negara-negara Asia Timur dan Tenggara yang diawali oleh krisis mata uang Bath, Thailand. Krisis tersebut kemudian dengan cepat menyebar ke negara-negara lain seperti Malaysia, Indonesia, dan juga Korea Selatan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat krisis paling parah. Bahkan, dampak krisis tersebut

masih bisa dirasakan hingga saat ini. Jauh, sebelumnya, kapitalisme juga mengalami krisis dasyat yang terjadi pada tahun 1930an, yang dikenal dengan the great depression. Namun, krisis dasyat tersebut masih mampu menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan besar Amerika Serikat (AS) seperti GP Morgan, City Group, Lehmann Brothers. Namun, krisis sekarang ini telah menghancurkan mereka sehingga harus di-*bail out* oleh pemerintah. Dengan demikian, krisis tahun 1997/1998 berbeda dengan yang sekarang tidak hanya pada episentrum krisis, tetapi juga kedalaman dan dampaknya. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mendiskusikan apa yang sebenarnya tengah terjadi? Beberapa pertanyaan yang relevan untuk dicari jawabnya adalah (1) bagaimana krisis keuangan terjadi? (2) apa yang menjadi faktor penyebabnya?; bagaimana respon pemerintah agar ekonomi Indonesia tidak terkena dampak krisis?; Apakah tawaran sosialis demokrasi dalam mengatasi persoalan tersebut?; dan

bagaimana gerakan sosialis demokrasi harus mengambil strategi dan taktik untuk menghadapi krisis finansial dan kemungkinan krisis ekonomi?

Akar Penyebab Krisis

Menurut Martin Manurung, ditinjau dari perspektif historis, krisis yang terjadi sekarang ini jauh lebih besar dibandingkan dengan krisis yang terjadi pada tahun 1930-an ketika terjadi *the great depression*. Pada waktu itu, menurut Martin Manurung, lembaga-lembaga keuangan besar Amerika seperti GP Morgan, City Group, Lehmann Brothers, dan yang lainnya masih selamat. Namun, krisis keuangan yang terjadi sekarang ini telah memaksa lembaga-lembaga tersebut bangkrut, dan akhirnya k tumbang sehingga harus *di-bail out* oleh pemerintah".

Dalam melihat krisis, seperti dikemukakan Martin Manurung, ada dua kelompok yang berbeda dalam menjelaskan akar krisis keuangan global sekarang ini. Pertama, pasar keuangan yang dibuat bebas bahkan regulasinya dihapuskan. Ini terjadi pada akhir pemerintahan Clinton sehingga bank umum dan lembaga keuangan bisa menjadi satu institusi. Akibatnya, mereka bebas bermain, mengakumulasi uang masyarakat dan mempermainkannya sedemikian rupa sehingga mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kedua, kelompok yang mengatakan bahwa krisis terjadi karena defisit keuangan pemerintah yang sangat besar. Penyebabnya adalah perilaku pemerintah yang *big spender* seperti dalam kasus Perang Irag, yang biayanya mencapai sekitar 3 triliun dolar. Inilah yang menjadi penyebab inflasi tinggi dan pengurangan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami stagnan. Di luar kedua pendapat tadi, para penganut Marxian mengatakan bahwa tanpa dua hal itupun perekonomian kapitalis pasti akan mengalami krisis. Karakteristik yang inheren dalam dirinyalah yang selalu

memproduksi lebih sebagai penyebab utama terjadinya krisis. Krisis tahun 1930-an yang dikenal sebagai *The great depression* terjadi karena *over capacity*, dan krisis keuangan sekarang terjadi karena *over accumulation*.

Sementara itu, Martin Manurung mengemukakan bahwa krisis yang sekarang ini terjadi sebenarnya dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, hakikat pasar finansial yang senantiasa memproduksi bubble. Kedua, keterputusan sektor finansial dan sektor riil. Ketiga, lemahnya peranan negara dan salah arah. Menurut Wandy "Binyo", inti krisis finansial sekarang ini sebenarnya terletak pada money supply lebih banyak ke financial sector, dan uang yang ada di sektor produktif semakin terserap ke dalam sektor finansial. Akibatnya, bangunan ekonomi yang fundamental rapuh dan akhirnya patah, dan ini disebabkan oleh proses penciptaan uang (*money creation*) yang hanya menguntungkan kelompok swasta besar.

Menurut Wandy "Binyo", sistem keuangan yang dikembangkan sekarang, khususnya yang dikembangkan oleh the Fed secara *inheren* akan lebih mengarahkan ke sektor finansial. Sebagai institusi swasta yang didirikan oleh Rockefeller ataupun GP Morgan, yang kemudian digunakan oleh Bank International of Settlement ini menghasilkan *debt money* bukan *free money*. Di sini, pemerintah tidak boleh mencetak uang, tidak boleh memproduksi uang sendiri. Kekuasaan untuk mencetak uang berada di tangan Bank Central. Pemerintah harus berhutang pada Bank Central dengan bunga yang kemudian dikenal sebagai obligasi. Dalam hal ini, setiap uang beredar maka sebenarnya pemerintah berhutang kepada the Fed sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini adalah sistem berhutang. Kemudian, karena bunga hutang harus dibayar padahal jumlah uang beredar tetap maka negara akan terus-menerus berhutang kepada the Fed, dan pihak bisnis yang

mendapatkan uang ini secara natural harus menghasilkan bunga yang lebih tinggi agar bisnisnya bisa survive. Ini berarti bahwa menanam investasi di sektor riil tidak menarik karena return-nya kecil. Mereka akhirnya menanamkan investasinya di sektor finansial.

Sistem ini sebenarnya telah banyak diperdebatkan, dan ada dorongan kuat untuk melakukan nasionalisasi terhadap the Fed. Namun, setelah Perang Dunia Kedua tidak lagi terdapat perdebatan semacam itu, dan sistem yang dikembangkan the Fed menjadi taken for granted begitu saja. Akhirnya, krisis tidak bisa dielakkan lagi dengan kedalaman yang lebih dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya.

Krisis juga disulut oleh kaitan kuat dana-dana di AS dengan hedge fund. Allan Grenspan telah memprakarsai bagi diberlakukannya bunga rendah. Maka, mulailah diperkenalkan investment bankers atau *financial markets* yang sebenarnya didorong oleh the Fed setelah mengalami over likuiditas. Suku bunga rendah. Grenspan mempunyai keyakinan bahwa jika bunga rendah maka ekspansi akan datang ke pasar modal, yang pada akhirnya akan mendorong sekuritisasi di pasar modal. Namun, seperti dikemukakan Yanuar Rizky, Grenspan lupa bahwa sejak '95 Amerika mengenalkan instrumen yang disebut *hedge fund*, yang tidak lain adalah *investment bankers*. GP Morgan, misalnya, mempunyai City Morgan Bank ataupun City Morgan Securities, suatu model *one stop financial market*. *Hedge fund* ini berbeda dengan Reksadana. Reksadana harus jelas dulu penempatannya, *hedge fund* tidak demikian. Semuanya tergantung pada kita. Di Amerika Serikat, 78% orang sudah *hedge fund*, jaminan sosialnya masuk *hedge fund*, dan dana pensiunnya juga menjadi nasabah utama *hedge fund*. Inilah yang kemudian menjadi masalah dan menjadi penyulut krisis keuangan AS sekarang ini.

Sebagai negara besar, apa yang terjadi

di Amerika Serikat tentu mempunyai imbas yang tidak sedikit terhadap perekonomian dunia. Ini karena banyak sekali negara, termasuk Indonesia yang perekonomiannya nasionalnya terikat bahkan tergantung dengan AS. Oleh karena itu, imbas yang ditimbulkannya sangat sangat beragam.

Dampak Krisis dan Persoalan Kepemimpinan

Menurut Yanuar Rizky, pada tahun '09, krisis finansial global tersebut akan mempunyai dampak yang lebih mendalam karena kelemahan kurs rupiah yang sangat besar. Utamanya sebagai akibat status Indonesia sebagai *nett importir*. Dalam jangka pendek, jika kurs naik terus, inflasi naik, maka upah naik tidak akan terkendali sehingga kondisinya akan sangat berbahaya. Menurut Martin Manurung, apa yang terjadi sekarang baru sebatas permukaan sehingga akibat yang ditimbulkan belum menyentuh ke sektor riil meskipun di negara episentrum terjadinya krisis dampak tersebut mungkin telah menjalar ke sektor riil. Dampak yang paling nyata adalah PHK besar-besaran, world estimate mencapai 2 juta orang.

Dalam menyikapi krisis seperti ini, kepemimpinan menjadi persoalan utama. Menurut Martin Manurung, persoalan imbas krisis keuangan global lebih disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan nasional. Pemimpin nasional kita tidak memahami anatomi krisis sehingga tidak mengetahui dengan baik apa yang sebenarnya terjadi. Ini dapat dilihat dari, menurut Martin Manurung, bahwa ketika terjadi krisis di tingkat global maka cara yang terbaik adalah bukan mengurus likuiditasnya, tetapi sektor riilnya. Oleh karena itu, langkah paling utama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan sektor riil. Di sisi lain, para pemimpin Indonesia juga tidak mempunyai visi sosdem yang cukup. Seperti dikemukakan Ridwan Manoarfa, persoalannya pemimpin kita tidak

mempunyai visi sosdemnya. Semuanya berpikir ala kapitalis. Padahal, kapitalisme neoliberal itulah yang menjadi penyebab utama krisis keuangan global sekarang ini.

Menurut Yanuar Rizky, baik neoliberal maupun sosial demokrat, sebenarnya hanya membahas tiga sektor, yakni bagaimana negara berurusan dengan dunia usaha dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai *flexible labour market* mereka tidak pernah diikuti dengan *social security*. Padahal, di negara Amerika, misalnya, ketika berbicara mengenai *flexible labour market*, maka pengangguran yang mungkin muncul akibat privatisasi diatasi dengan *social security*. APBN memberikan jaminan jika terjadi pengangguran sebagai akibat privatisasi. Persoalannya di Indonesia ini tidak terjadi. Sosial demokrasi jelas memberikan solusi, tetapi lemahnya pemimpin yang mempunyai visi sosial demokrasi membuat tawaran-tawaran sosial demokrasi tidak diterapkan di Indonesia.

Persoalan kedua yang dihadapi oleh Indonesia adalah birokrasi yang korup. Yanuar Rizky mengemukakan, "Persoalan yang kita hadapi sekarang ini menjadi semakin jelas, yakni birokrasi". Oleh karena itu, masalah selanjutnya adalah apakah SBY-JK mempunyai komitmen untuk menertibkan birokrasi ini, yang menurutnya merupakan persoalannya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan upah buruh yang jauh lebih rendah. Birokrasi yang tidak efisien inilah yang membuat HPP Indonesia lebih besar, dan membuat harga unit cost lebih mahal dibandingkan dengan Cina.

Persoalan ketiga adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor riil. Menurut Yanuar Rizky, ada dua persoalan yang kini dihadapi oleh sektor riil di Indonesia, yakni mesinnya usang dan bank tidak mau melakukan *refreshment* mesin. Di Cina, mesin yang sudah usang diganti dengan yang baru

melalui mesin-mesin yang mereka buat sendiri sehingga produktivitasnya naik. Dalam kaitan ini, mereka benar-benar menerapkan *Competitive Value Chance*. Dengan cara demikian, *unit cost*-nya rendah karena biaya-biaya "siluman" sebagai akibat birokrasi yang tidak efisien juga dipangkas habis. Di Indonesia, selain mesin-mesin usang yang tidak dilakukan *refreshment*, birokrasinya juga korup dan tidak efisien.

Dalam situasi krisis, menyelamatkan sektor riil berarti menyelamatkan pemerintahan sendiri. Ini karena penyelamatan sektor riil akan meningkatkan pemerintahan di sektor pajak melalui PPH dan PPN. Menyelamatkan sektor riil tidak seperti yang dianggap oleh pemerintah yang lebih cenderung menyelamatkan pengusahannya, tetapi dunia usaha, pengusaha dan juga tenaga kerjanya. Sayangnya, sektor riil tidak pernah menjadi solusi sehingga ketergantungan Indonesia terhadap hutang sangatlah besar.

Persoalan keempat adalah lemahnya partai politik. "Ketika kita berbicara negara", menurut Ridwan Manoarfa, "maka kita berbicara partai politik karena mereka yang mengisi ruang-ruang tersebut". Persoalannya kita tidak mempunyai parpol yang mempunyai pemikiran ekonomi alternatif, yakni bagaimana mengelola perekonomian kita? Isu PHK memberikan ruang yang memungkinkan terjadinya perlawanan dari kaum buruh. Namun, kalau perlawanan tersebut tidak dirumuskan dengan baik, maka mendorong munculnya tindakan represif dengan alasan pengamanan ekonomi, dan seterusnya. Dalam konteks inilah, partai politik menjadi penting.

Alternatif Solusi dan Jalan Sosial Demokrasi

Martin Manurung merekomendasikan lima langkah untuk mengatasi imbas krisis keuangan global bagi Indonesia. Pertama, hentikan subsidi untuk orang kaya. *Bail out* dari dari sektor

finansial memberikan subsidi bagi orang kaya. Untuk itu, perlu dipastikan *money supplay* ke sektor riil. Kedua, imunisasi diri agar tidak tertular krisis global melalui kontrol devisa. Ketiga, selamatkan daya beli rakyat melalui *safety net* secara komprehensif bukannya dengan cara karikatif seperti BLT sehingga dapat menjadi *buffer* untuk mempertahankan daya beli. Keempat, berani berpikir di luar kotak, *out of the box*, yakni perlunya mendorong sistem pertukaran alternatif yang komplementer. Kelima, bersihkan diri dari *private interest public relations neolib*. Dalam kaitan ini, menurut Martin Manurung, adalah penting untuk membuka portofolio para ekonom yang kritis dan sering didengarkan oleh pemerintah selama ini. Dalam banyak kasus, sangat mungkin mereka juga mempunyai saham sehingga *interest-interest* semacam itu harus dihilangkan. Lebih lanjut, Yanuar Rizky mengemukakan bahwa dalam rangka mengatasi persoalan yang kini dihadapi oleh Indonesia sebagai akibat krisis keuangan global maka sektor dunia usaha yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Utamanya, sektor usaha yang prospektif membuka lapangan kerja dan daya tahan pekerjaanya.

Ditinjau dari perspektif sosdem, pada tingkatan makro, menurut Amir Effendi Siregar, memang harus ada reformasi dalam sistem keuangan global karena telah terbukti gagal. Yanuar Rizky menawarkan dua model sebagai alternatif. Pertama, solusi sos-dem yang masih ada deal dengan sektor *finance*, tetapi diatur dengan ketat. Cina menjadi contoh menarik. Mereka bermain di sektor finansial, dan menggunakan keuntungan dari sektor tersebut untuk membiayai *social security* dan menggerakkan sektor riil. Hanya saja, cara ini akan menimbulkan *paradoks*. Seperti dikemukakan oleh Anggito, salah satu ciri sosdem adalah partisipasi publik, dan ini mensyaratkan independensi kelas menengah. Padahal, ini hanya mungkin terjadi jika terdapat suatu mekanisme

komoditi yang tidak terikat dengan pasar finansial. Kedua, model Amerika Latin yang melakukan seleksi dengan ketat atas sektor finansialnya. Dana-dana Amerika dan mempunyai resiko tinggi ditolak, sedangkan dana dari revenue minyak digunakan untuk keuntungan ekonomi domestik. Namun, model kedua ini juga mempunyai kelemahan karena resistensi yang kuat akan muncul. Oleh karena itu, menurut Yanuar perlu ada kompromi atau jalan tengah karena memang realitanya semacam itu kecuali revolusi.

Persoalanya sekarang adalah, seperti dikemukakan oleh Launa, "Kita tidak mempunyai kendaraan untuk menyampaikan ide-ide sosdem". Dalam kasus Amerika Latin, mereka menggunakan kekuasaan politik, dan Partai buruh didesain cukup panjang. Sementara dalam konteks Indonesia, Partai Buruh dibuat, tetapi tidak ada pemilihnya padahal buruh jumlahnya jutaan.

Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja tidak mudah karena begitu banyaknya persoalan yang dihadapi oleh Indonesia, terutama dalam konteks sosialisasi Sosdem. Yanuar Rizky menawarkan solusi dengan menggunakan berbagai media yang memang bisa digunakan saat ini. Media yang digunakan dapat apa saja, tetapi tidak boleh kehilangan fokus, yakni seperti dikemukakan Martin Manurung persoalan yang dihadapi bersifat struktural. Oleh karena itu, fokus harus tetap diletakkan pada bagaimana membongkar struktur yang ada. Sementara itu, Yanuar Rizky mengemukakan bahwa persoalan perahu atau kendaraan yang dapat digunakan untuk tahun 2009 masih sangat jauh sehingga langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana mempengaruhi seluruh kandidat baik yang *incumbent* maupun yang akan run election agar bergerak menyelamatkan kondisi krisis sekarang. Jika semua dibuat tertekan, menurut Yanuar, maka akan bergerak mencari

solusi. Lebih lanjut, Amir Effendi Siregar mengemukakan bahwa pikiran-pikiran sosdem sudah ada, hanya saja kendaraan tunggal memang belum ada. Namun, berbagai kendaraan dapat diidentifikasi, baik partai politik maupun elit. Inilah, menurut Amir Effendi Siregar, mengapa kita butuh diskusi, jurnal, dan sebagainya yang men-suplay pikiran-pikiran di tingkat elit atau organisasi politik mengingat pertarungan 2009 tidak hanya menyangkut institusi, tetapi juga individu.

Kesimpulan

Benang merah diskusi Jurnal Sosial Demokrasi edisi kelima dengan judul dari "Wall Street ke All Street" ini adalah akar krisis keuangan di Amerika Serikat ini merupakan akibat kegagalan sistem kapitalisme, yang mendorong sektor finansial lebih menarik dibandingkan dengan sektor riil. Investasi di sektor finansial mempunyai keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor riil meskipun tingkat resikonya tinggi. Krisis finansial sekarang ini menjadi indikasi betapa rentannya sistem tersebut terhadap krisis.

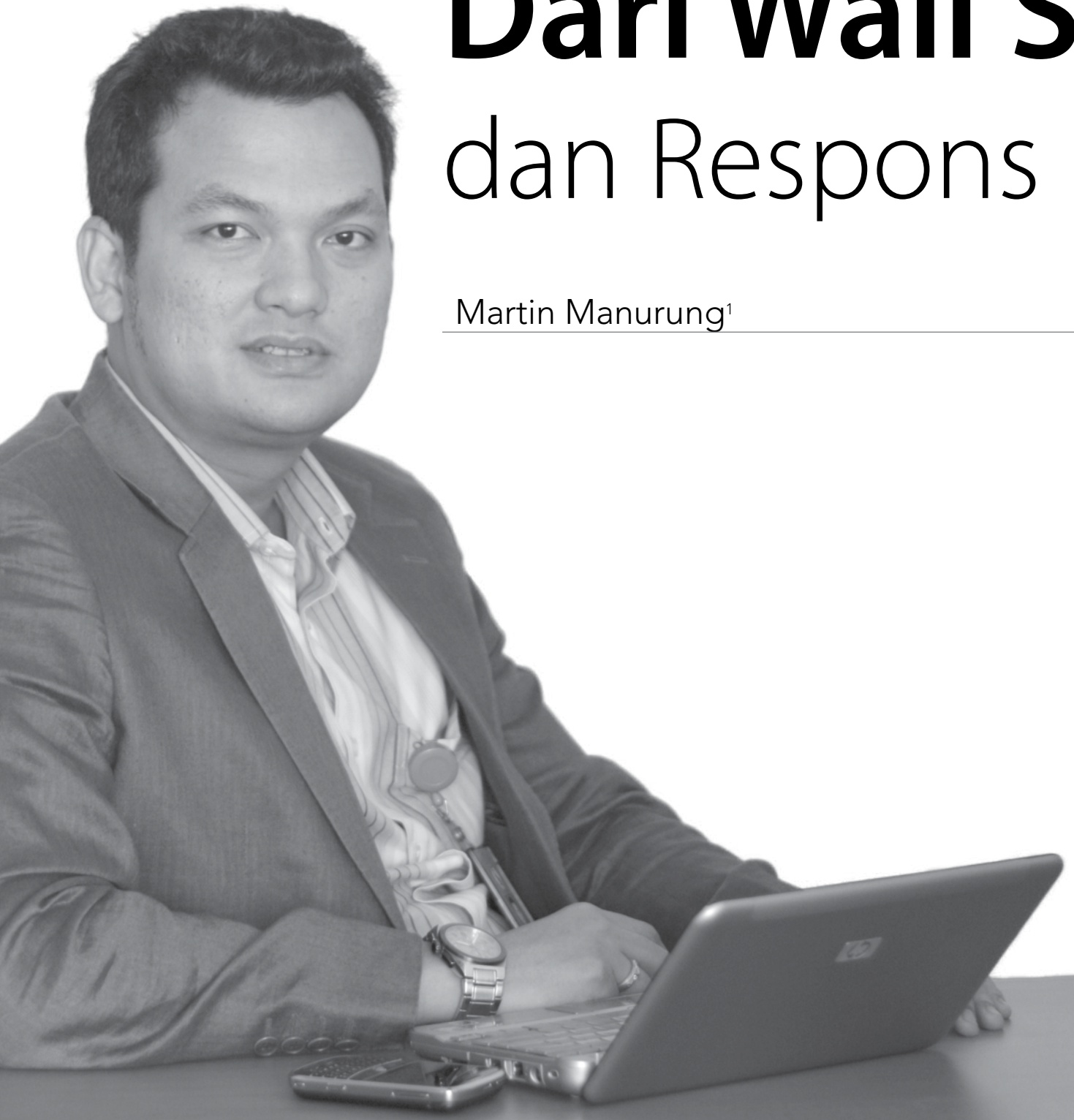
Bagi Indonesia, besaran dan kedalaman dampak yang ditimbulkan oleh krisis finansial global akan sangat tergantung pada kepemimpinan nasional. Jika kepemimpinan mampu membaca anatomi krisis dengan baik, maka Indonesia tidak akan terkena dampak krisis yang sangat dalam. Persoalan yang kini dihadapi adalah lemahnya visi kepemimpinan. Oleh karena itu, gerakan sosial demokrasi mestinya menggunakan berbagai media yang ada untuk terus melakukan pressure terhadap kekuasaan politik yang ada. Selain itu, secara aktif, mempengaruhi kekuatan elit dan juga partai politik mengingat kendaraan politik dengan ideologi sosdem belum muncul secara kuat meskipun bibitnya sudah ada.



Artikel

Krisis Finansial C **Dari Wall Str** dan Respons In

Martin Manurung¹



Global: reet ke All Streets donesia

Latar Belakang

Sebelum krisis finansial global yang berawal dari Amerika Serikat meledak, pandangan yang mengemuka adalah bahwa sistem dan ideologi kapitalisme Anglo-American telah final². Hal itu bertambah dominan setelah tumbanganya sistem ekonomi komunisme bersamaan dengan bubarnya Uni Sovyet. Sistem dan ideologi itulah yang kerap dinamakan sebagai neoliberalisme yang menandai kembalinya semangat liberalisme klasik (*laissez faire*) dengan pengembangan utama pada globalisasi finansial serta tata dan susunan institusi yang pro-market.

Krisis finansial membuka mata banyak orang, termasuk mereka yang selama ini mengampanyakan pasar bebas, bahwa neoliberalisme ternyata belum final. Bahkan, bukan hanya itu. Neoliberalisme juga membawa bencana dengan rontoknya institusi-institusi kapitalis utama dan mandeknya sistem pembayaran global yang mengancam dunia ke ambang resesi dan depresi.

Seberapa parahkah krisis kali ini, bila dibandingkan dengan krisis-krisis yang pernah terjadi dalam pendulum kapitalisme global? Ini adalah pertanyaan pertama yang harus dijawab agar kita mengetahui langkah antisipasi yang harus diambil.

Besaran ongkos biaya krisis bervariasi dan masih terus bertambah. Namun jelas bahwa paket dana talangan tahap pertama yang berjumlah USD 700 milyar³ tidaklah cukup. Faktanya, Gubernur Bank Sentral AS (The Fed), Ben Bernanke, telah mengajukan paket tambahan senilai USD 150 milyar dalam testimony-nya di depan Congress AS pada 20 Oktober 2008⁴. Ekonom Nouriel Roubini dari Stern School of Business, New York University, memberikan kalkulasi terakhir perihal total beban krisis mencapai USD 3 trilyun, atau meningkat dari prediksi sebelumnya yang menyebutkan USD 1 trilyun dan USD 2 trilyun⁵. Angka ini kiranya masih akan bertambah seiring

1. Alumnus Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan School of Development Studies, University of East Anglia, Inggris.
2. Fukuyama (1989) mengklaim hal ini sebagai 'the final form of human government'. Lihat Francis Fukuyama, "The End of History?" National Interest 16, no. Summer 1989 (1989).
3. Bila dihitung dana-dana talangan yang telah dikeluarkan pemerintah AS sejak awal krisis, akan berjumlah hampir USD 1 trilyun.

4. Dapat diakses pada <http://federalreserve.gov/newsevents/testimony/bernanke20081020a.htm>
5. Lihat http://www.rgemonitor.com/roubini-monitor/254036/bloomberg_october_14_2008_roubini_sees_worst_recession_in_40_years_rallies_end. Kapitalisasi pasar produk-produk derivatif yang menginisiasi krisis, antara lain Index, Futures, CDO maupun CDS, telah mencapai USD 681 trilyun. Bandingkan dengan PDB AS yang 'hanya' sekitar USD 14 trilyun.

dengan masih memburuknya sentimen terhadap perekonomian AS⁶.

Lebih lanjut, secara kualitatif kita dapat menyaksikan betapa beratnya krisis finansial yang kini melanda negara adidaya itu. Lembaga-lembaga keuangan utama AS, seperti Lehman Brothers, American International Group, Citigroup, JPMorganChase, dsb, adalah institusi yang mapan dan telah berusia puluhan, bahkan ratusan, tahun. Mereka telah menempuh beragam peristiwa, ancaman dan krisis dalam kiprahnya di lembaga keuangan. Mereka dapat bertahan melampaui peristiwa 9/11, *dotcom crash*, perang dunia dan bahkan depresi besar pada 1930-an. Namun, kali ini mereka harus menelan pil pahit dan beberapa akhirnya tumbang!

Beberapa Pendapat tentang Penyebab Krisis

Setidaknya ada dua pendapat yang kini mengemuka perihal penyebab utama krisis. Pendapat yang pertama dan mendominasi adalah krisis disebabkan oleh kurangnya peraturan (*lack of regulation*) yang mencegah kerakusan para eksekutif korporasi *Wall Street* yang mengabaikan tata kelola risiko demi mengejar rente. Hal ini merupakan topik perdebatan yang panas antara Menteri Keuangan AS (pada era Presiden George W. Bush) Henry Paulson dengan kalangan Congress ketika mengajukan paket dana talangan yang pertama. Pendapat ini pula yang mendasari pemimpin-pemimpin Eropa, antara lain Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang berhaluan konservatif, mendesak reformasi institusi-institusi keuangan dunia (*Bretton Woods institutions*) agar

dapat membatasi *moral hazard* institusi-institusi keuangan dalam meraup keuntungan.

Pendapat kedua mempersalahkan kebijakan defisit anggaran pemerintah AS yang kebablasan, terutama akibat berkurangnya pendapatan pajak dan kebijakan luar negeri yang agresif. Defisit anggaran itu mendorong menggungunya utang luar negeri pemerintah AS mencapai sekitar 70 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP) negara itu. Defisit tersebut mendorong tingkat laju inflasi dan ditengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan, lantas mengurangi daya beli konsumen. Akibatnya, terjadilah gagal bayar kredit, terutama di sektor perumahan, yang akhirnya memicu krisis finansial saat ini⁷.

Pendapat lain yang mengemuka namun belum dominan adalah perpektif Marxian yang menekankan sifat sistem ekonomi kapitalisme yang cenderung *overcapacity*⁸ dan semakin memburuk akibat globalisasi neoliberal. Pendapat ini melihat krisis finansial yang saat ini terjadi merupakan hakikat kontradiksi antara kecenderungan tingkat

produksi yang berlebih dibandingkan dengan kapasitas populasi yang mengkonsumsinya. Kesenjangan itu dihasilkan oleh ketimpangan (*inequalities*) sosial yang membatasi daya beli rakyat yang akhirnya mengikis tingkat keuntungan⁹. Melalui perspektif ini diperoleh benang merah pemahaman bahwa krisis finansial saat ini merupakan bentuk baru namun sehakikat dengan krisis-krisis yang terjadi sebelumnya dalam sistem ekonomi kapitalisme.

Anatomi Krisis

Kalangan neoliberal umumnya sepakat dengan pendapat yang pertama dan kedua, namun tetap berpandangan bahwa *lack of regulation* bukanlah penyebab utama, melainkan "hanya" kecerobohan para eksekutif *Wall Street* dalam mengelola risiko. Karena itu, mereka tetap menolak terbitnya pengaturan lebih lanjut negara atas sistem finansial AS dan dunia, terutama menyangkut skema insentif terhadap para eksekutif *Wall Street* yang pada umumnya dipandang berlebihan¹⁰. Majalah pro-pasar bebas Inggris yang

Diagram 1. Tiga Faktor Penyebab Krisis Finansial AS



6 Berbagai prediksi menyebutkan bahwa krisis akan berlangsung selama 18-24 bulan dan angka pengangguran AS akan meningkat mencapai 9 persen yang berdampak pada tergerusnya daya beli konsumen.

7 Joseph Stiglitz, ekonom AS pemenang Nobel Ekonomi 2001, menyinggung perihal defisit anggaran yang kebablasan. Menurutnya, perang Irak yang memakan biaya USD 3 triliun juga turut memperburuk keadaan. Biaya perang yang didanai dari utang luar negeri itu telah mencapai besaran 40 persen dari total utang pemerintah. Perihal ini dapat diakses pada <http://www.infowars.com/?p=4622>

8. Atau sering juga disebut dengan *overaccumulation* dan *overproduction*.

9. Lihat Walden Bello, "Afterthoughts : A primer on the Wall Street meltdown", Focus on the Global South, 18 Oktober 2008. Dapat diakses pada <http://focusweb.org/afterthoughts-a-primer-on-the-wall-street-meltdown.html?Itemid=1>

10 "Questions of equity", The Economist, 27 September – 3 Oktober, 2008, h. 16.

berpengaruh, *The Economist*, bahkan berujar: "...the reaction to the crisis is bound to go too far, and allow the state to get too big."¹¹

Namun demikian, kiranya manusia dimotivasi insentif bukan semata-mata karena sifat alamiah berupa "kerakusan" atau "kecerobohan", melainkan juga karena kelemahan institusi. Dari perspektif ini, penulis berpandangan bahwa krisis finansial AS adalah *resultante* dari tiga faktor, yaitu hakikat pasar finansial yang senantiasa memproduksi gelembung hampa (*bubble*); terputusnya keterkaitan antara sektor finansial dan sektor riil; serta peran negara yang lemah dan salah arah (lihat Diagram 1)

Praktik *rent-seeking* atau kerakusan pemburu rente sesungguhnya dihasilkan oleh 'keunikan' sistem finansial AS sendiri. Penting untuk dicatat bahwa perburuan rente dalam sistem ekonomi kapitalisme AS bukanlah secara *tidak sengaja* (alamiah) disebabkan oleh 'hakikat manusia' yang *self-centered* dan *homo oeconomicus* sebagaimana dipercayai oleh kalangan neoliberal. Praktik itu memang secara sengaja didorong oleh dan dihasilkan dari arsitektur sistem finansial itu sendiri.

Awalnya adalah status Bank Sentral AS (*The Fed*) yang merupakan institusi swasta. Ia didirikan pada 23 Desember 1913 oleh, antara lain, Eugene Meyer (ayah Katherine Graham, pemilik harian *The Washington Post*) dan JP Morgan (seorang pedagang senjata). Pemerintah AS memberikan kuasa

mencetak uang kepada *The Fed* dengan cara menerbitkan surat utang melalui *Treasury* (Departemen Keuangan yang secara konvensional dipimpin oleh 'orang titipan' *Wall Street*) dengan bunga sekitar 6 persen. Berdasarkan hal itu, *The Fed* mencetak uang sejumlah pokok utang ditambah bunga yang harus ditanggung pemerintah AS. Selisih bunga tersebut, tentu saja, tak bisa dibayar oleh pemerintah AS, sebab jumlah uang beredar tidak mencukupi, dan hanya bisa dibayar apabila pemerintah menerbitkan surat utang baru yang juga berbunga 6 persen¹². Demikianlah seterusnya sehingga utang pemerintah AS kepada *The Fed* tidak akan pernah bisa dilunasi.

Terhadap sistem ini, Tuturoong (2008)¹³ menyimpulkan sebagai berikut:

Konsekuensi dari sistem ini adalah bahwa pemerintah AS didorong untuk terus berutang dan melakukan ekspansi untuk membayar utang yang takkan pernah bisa dibayarnya itu. Begitu pula sistem perbankan di AS, terdorong untuk mengalokasikan pinjaman pada sektor yang paling cepat pertumbuhannya (yaitu sektor finansial, ketimbang sektor riil yang terkait kesejahteraan rakyat). Inilah awal mula sistem yang menciptakan "gelembung ekonomi" hingga saat ini.

Hakikat sistem finansial yang *rent-seeking* itu mendorong pula

berkurangnya, atau bahkan tereliminasi, fungsi lembaga keuangan sebagai institusi perantara (*intermediary*) antara modal dan produksi. Sehingga, model politik-ekonomi Marxian yang membagi dua antara sistem kapitalisme klasik dan modern dengan, masing-masing, alur "barang-uang-barang" ($C-M-C^1$, $C < C^1$) dan "uang-barang-uang" ($M-C-M^1$, $M < M^1$) menjadi ketinggalan jaman. Sebab, finansialisasi kapitalisme modern saat ini telah berfungsi dengan alur "uang-uang" ($M-M^1$, $M < M^1$), tanpa harus melalui proses produksi (Magdoff 2006)¹⁴.

Selain itu, tingkat pengembalian (*returns*) di sektor finansial bertumbuh sedemikian pesat meninggalkan sektor riil. Dengan demikian, proses produksi menjadi kurang kompetitif sebagai alat untuk akumulasi modal dan sektor finansial melesat bak primadona. Ditambah lagi, proses globalisasi finansial yang memungkinkan modal untuk bersarang di mana saja dan berpindah antar-negara dengan relatif cepat semakin memicu kapitalisasi dan sungguh-sungguh menjadi alat yang efektif untuk melipatgandakan modal. Keadaan ini dimungkinkan secara sengaja oleh berbagai liberalisasi yang selama dua dekade ini gencar dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia melalui program penyesuaian struktural (*structural adjustment programme*) terhadap negara-negara berkembang.

Bersamaandenganitu, pemangkasan peran negara dan 'reformasi regulasi'¹⁵

11 Ibid, h. 18. Lihat juga keberatan AS (pada era pemerintah George W. Bush) terhadap proposal regulasi sistem finansial global yang diajukan Eropa dan Asia dalam "ASEM: Rombak Sistem Finansial. Koordinasikan Ekonomi Virtual dengan Ekonomi Riil", Kompas, 26 Oktober 2008, h. 1 & 15). Versi online dapat diakses pada <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/26/02282382/asem.rombak.sistem.finansial>

12. Lebih lanjut, hutang dari pemerintah AS juga menjadi jaminan bagi *The Fed* untuk meminjamkan uang kepada bank-bank komersial di AS. Seandainya utang pemerintah AS sebesar USD 100 juta, maka uang yang dapat dipinjamkan ke bank-bank komersial (bila kewajiban modalnya 10 persen) bisa mencapai 900 juta dolar AS. Inilah yang dinamakan "fractional reserve system".

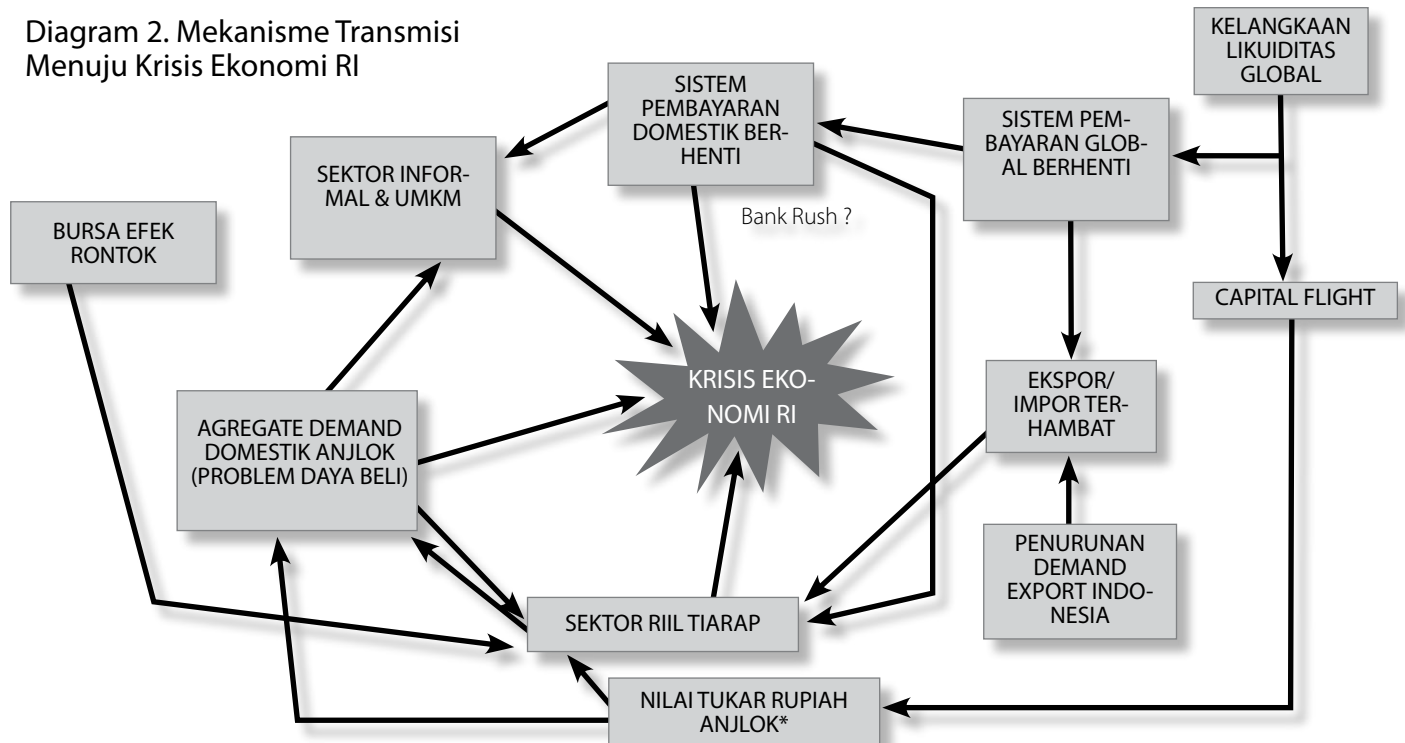
13 Tulisan singkat dan populer dari Tuturoong dapat dilihat di http://www.new.facebook.com/note.php?note_id=44375045249#/note.php?note_id=43668300249. Tulisan ini merupakan refleksi dari Stephen Zarlenga,

The Lost Science of Money: The Mythology of Money, The Story of Power, New York: American Monetary Institute, 2002.

14 Penjelasan akan hal ini dapat ditemukan di Fred Magdoff, "The Explosion of Debt and Speculation", *Monthly Review* Vol. 58 No. 6 (2006). Versi online dapat diakses pada <http://www.monthlyreview.org/1106fmagdoff.htm>

15 Reformasi regulasi ini sering disebut dengan 'good governance'. Walau terdengar etis, namun hakikat good governance, sebagaimana dikampanyekan Bank Dunia dan IMF, adalah untuk mendukung terlaksananya pasar bebas. Ironisnya, banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil yang turut mempromosikan good governance namun tanpa kajian kritis terhadap tujuan sesungguhnya dari hal itu. Lebih lanjut tentang hal ini lihat KP. Galagher dan L. Zarsky, "Rethinking Foreign Investment for Development," *Post-Autistic Economics Review*, no. 37 (2006).

Diagram 2. Mekanisme Transmisi Menuju Krisis Ekonomi RI



*Walau suku bunga dinaikkan, demand for US dollars akan tetap naik karena pelaku usaha asing "memburu" mata uang itu untuk mengatasi krisis likuiditas di negara asal.

yang 'ramah pasar' (*market friendly*) membuat akumulasi modal semakin leluasa. Peran negara sebagai institusi publik pun berubah jadi pelayan modal. Tangan-tangan negara dipreteli dengan membentuk berbagai 'komisi independen' yang ironisnya tidak dipilih secara demokratis. Akibatnya, kendali publik atas negara menjadi terkikis dan rakyat dibiarkan menjadi pemain dalam pasar bebas yang rimbawi.

Dampak Krisis Finansial Global Terhadap Perekonomian Indonesia

Selanjutnya, segera mengemuka pertanyaan: bagaimanakah krisis finansial AS dan global akan berdampak pada

Indonesia? Akankah situasi layaknya krisis Asia Timur satu dekade lalu akan terulang? Beberapa ekonom tergesa-gesa menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa dampak krisis finansial global terhadap perekonomian Indonesia tidak signifikan¹⁶. Alasannya, 'fundamental ekonomi' Indonesia dan neraca perbankan kita relatif lebih baik, serta —katanya— kita telah belajar banyak dari penanganan krisis finansial 1997-1999.

Namun demikian, harus pula diingat bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini telah lebih terliberalisasi dan terintegrasi dengan sistem finansial global. Dengan demikian, walau pemicu dan episentrum krisis finansial

saat ini (Amerika Serikat) relatif jauh dari Indonesia (dibandingkan dengan Thailand pada 1997), hal itu tidak berarti bahwa efek penularan (*contagion effect*) akan berkurang. Liberalisasi dan integrasi terhadap sistem finansial global membuat Indonesia pun lebih rentan untuk 'tertular' guncangan keuangan.¹⁷

Karena itu, tak salah bila Juan Somavia, Direktur Organisasi Buruh Sedunia (ILO) mengingatkan bahwa krisis saat ini bukan semata-mata pada *Wall Street*, melainkan *all streets*¹⁸. Hal itu bermakna bahwa krisis finansial tidak saja potensial untuk menular pada sektor lain dalam perekonomian satu negara, melainkan juga pada negara-negara lain dan dapat bersifat multisektoral.

16 Lihat, antara lain, berita The Jakarta Post edisi 9 Oktober 2008, h.1, berjudul "Indonesia far from crisis, say analysts" yang memuat pendapat beberapa ekonom tentang krisis. Artikel tersebut dapat diakses di <http://www.thejakartapost.com/news/2008/10/09/indonesia-far-crisis-say-analysts.html>.

17 Lihat JR. Pincus and R. Ramli, "Deepening or Hollowing Out? Financial Liberalization, Accumulation and Indonesia's Economic Crisis," dalam K.S. Jomo (ed) *After the Storm: Crisis, Recovery and Sustaining Development*

in *Four Asian Economies*, Singapore: Singapore University Press, 2004. Dalam kasus negara-negara berkembang, lihat Yilmaz Akyüz dan Andrew Cornford, "Capital Flows to Developing Countries and The Reform of International Financial System", UNCTAD Discussion Papers no. 143 (1999).

18 Press Release ILO tentang hal ini dapat dilihat di http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang-en/WCMS_099529/index.htm

Dampak terhadap Indonesia dapat diamati melalui sektor-sektor yang menjadi “jendela” bagi transmisi krisis finansial global menjadi krisis ekonomi domestik. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa dampak tersebut adalah keniscayaan yang tak dapat diantisipasi dan dimitigasi. Pemahaman yang menyeluruh atas anatomi krisis, sebagaimana telah diuraikan di atas, akan membantu pembuatan kerangka kebijakan yang tepat sasaran dan lebih berpengaruh pada masyarakat.

Diagram 2 menunjukkan alur mekanisme transmisi yang memungkinan krisis finansial global menjelma menjadi krisis ekonomi Indonesia. Ruang yang terbatas tentu tak memungkinkan kita untuk mengeksaminasi seluruh opsi kebijakan secara terinci. Namun demikian, penggambaran mekanisme pada diagram itu dapat memperlihatkan beberapa faktor yang bersifat *eksogen* (di luar kontrol pemerintah), *endogen* (di dalam kontrol pemerintah) dan akibat-akibat yang harus menjadi fokus kebijakan guna mencegah krisis ekonomi Indonesia.

Pengenalan akan faktor-faktor *endogen* dan *eksogen* itu menjadi krusial tatkala kita dihadapkan pada serangkaian kebijakan ekonomi yang seringkali bukanlah merupakan pilihan antara yang ‘baik’ dan ‘buruk’. Sebuah diagram, atau peta, akan memandu pengambilan kebijakan untuk tetap fokus pada tujuan pencegahan krisis ekonomi dan penyelamatan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia.

Dari Diagram 2 kita ketahui bahwa faktor-faktor *eksogen* itu adalah (1) kelangkaan likuiditas global; (2) penurunan permintaan global, khususnya pada barang-barang ekspor Indonesia, dan; (3) terhambat, atau bahkan berhentinya, sistem pembayaran

Tabel 1. Penurunan Harga Komoditas-Komoditas Ekspor Utama

Komoditas	Harga Sebelum Krisis	Harga Sesudah Krisis	Perubahan (%)
Kopi Jenis Arabica	USD 3800/ton	USD 3200/ton	- 15,8
Jagung Pipilan Kering	Rp. 3800/kg	Rp. 1700/kg	- 55,3
Kakao	USD 300/ton	USD 205	- 31,7
Teh	USD 268/ton	USD 196	- 26,9
Karet	USD 340/ton	USD 210/ton	- 38,2
Pulp dan Kertas	>USD 900/ton	USD 50/ton	- 94,4
Kelapa Sawit (CPO)	USD 1210/ton	USD 480/ton	- 80,6

Sumber: diolah dari berbagai rilis dan sumber.

global akibat ketatnya likuiditas dan hilangnya kepercayaan antar-lembaga keuangan dan bank. Atas faktor-faktor ini, pemerintah Indonesia tentu saja tak memiliki kontrol, atau bahkan pengaruh, walau bukan berarti tak dapat disiasati apabila pemerintah mampu menjalin kerjasama-kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang *less affected*, yaitu mereka yang perekonomiannya belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem finansial AS, seperti Cina.

Kemudian faktor-faktor *endogen* adalah (1) sistem pembayaran domestik; (2) permintaan agregat domestik; (3) sektor riil; (4) usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), (5) risiko pelarian modal (*capital flight*) dan; (6) nilai tukar rupiah. Keenam faktor ini adalah hal-hal krusial yang harus menjadi fokus pemerintah, dimana kegagalan pasar yang terjadi saat ini harus disiasati agar krisis ekonomi dapat dihindari atau, paling tidak, diminimisasi dampaknya.

Sistem pembayaran domestik yang terhambat akibat berhentinya sistem pembayaran global saat ini telah memengaruhi sektor-sektor yang bertumpu pada ekspor dan impor. Hal itu disebabkan kesulitan pencairan *Letter of Credit* (LC). Terkikisnya kepercayaan antar-lembagakeuangan dan perbankan membuat LC kini harus dijamin dengan

100 persen kas, padahal semula cukup dengan jaminan hanya 10-20 persen. Kondisi ini menyebabkan penurunan volume ekspor pada berbagai sektor, antara lain, agroindustri (30 persen), tekstil (35 persen) dan perikanan (10-15 persen).

Ekspor Indonesia juga dipengaruhi oleh penurunan permintaan agregat global yang mengakibatkan terjadinya kelebihan penawaran (*excess supply*) sehingga menurunkan harga berbagai komoditas primer. Tabel 1 menunjukkan penurunan harga yang sangat tajam dan drastis¹⁹ yang membuat ratusan petani merugi dan sebagian bahkan gulung tikar.

Kemudian, Tabel 2 menunjukkan penurunan pangsa pasar pada negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia, antara lain yang terbesar adalah Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Memang, sebagaimana dikatakan kaum neoliberal, penurunan ini dalam jangka panjang dapat membantu mengubah struktur pasar tujuan ekspor Indonesia agar tidak terlalu tergantung pada negara-negara tertentu (diversifikasi pangsa pasar ekspor). Namun, dalam jangka pendek tentu akan menimbulkan kejutan-kejutan (*shocks*) pada industri-industri ekspor Indonesia, karena perubahan tersebut bukanlah disebabkan oleh

19 Penurunan harga yang tajam terjadi hanya dalam hitungan bulan. Bahkan, harga beberapa komoditas turun dalam jangka waktu satu bulan, seperti Kopi. Rilis dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumatera Utara (Sumut) mengatakan bahwa dari 400 eksportir kopi

terdaftar di Provinsi itu, hanya sekitar 60 yang aktif dan kini terancam gulung tikar. Rilis ini dapat diakses pada <http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/21/15212637/puluhan.eksportir.kopi.sumut.terancam.gulung.tikar>

Tabel 2. Perbandingan Pangsa Pasar Ekspor Utama Indonesia

Negara	2003	Jan-Agt 2003	Perubahan
Amerika Serikat	14,7%	11,6%	- 3,1%
Eropa	17,1%	13,9%	- 3,2%
Jepang	14,4%	12,5%	- 1,9%
RRC	5,9%	7,6%	1,7%
India	3,4%	6,5%	3,1%
Singapura	10,1%	9,8%	- 0,3%
Korea Selatan	3,7%	4,4%	0,7%
Taiwan	2,7%	2,6%	- 0,1%
Malaysia	4,9%	5,6%	0,7%
Australia	2,3%	1,9%	- 0,4%
Lainnya	20,3%	23,7%	3,4%

Sumber: Departemen Perdagangan dan BPS

kebijakan yang terencana dan sistematis oleh negara demi diversifikasi pangsa pasar ekspor. Kejutan-kejutan itu terjadi akibat perubahan-perubahan yang tidak diantisipasi sebelumnya oleh para pelaku industri, sehingga dampak-dampaknya pun belum diperhitungkan dalam perencanaan usaha (*business plan*) yang komprehensif.

Kedua hal di atas tentu potensial menambah beban perekonomian dan –terutama– pengangguran yang akibatnya mungkin baru dapat dirasakan pada paruh pertama 2009 dan berpuncak pada paruh kedua tahun itu. Sayangnya, pada paruh kedua itulah justru terjadi peningkatan eskalasi sosial-politik akibat penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) anggota parlemen dan presiden. Kombinasi faktor ekonomi dan non-ekonomi tersebut akan sangat membahayakan dan bisa memicu ketegangan sosial di tingkat masyarakat.²⁰

Lebih lanjut, kerugian yang masif, atau bahkan kebangkrutan, industri-

industri yang bergerak pada sektor-sektor komoditas ekspor juga memiliki dampak berganda (*multiplier effect*) yang mengancam para petani kecil serta sektor-sektor informal, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mendukung sektor-sektor itu. Dengan demikian, keterlambatan antisipasi pemerintah dalam menanggulangi dampak krisis finansial terhadap sektor-sektor itu akan membawa akibat bagaikan spiral yang dapat membawa perekonomian ke jurang yang dalam dan relatif lebih lama untuk dapat pulih.

Dampak terhadap sektor-sektor ekspor dan UMKM juga menjadi pembeda utama krisis saat ini dibandingkan dengan satu dekade lalu. Kala itu, kendati krisis memukul industri-industri besar yang sebagian besar memiliki keterkaitan kepemilikan (*inter-linkages*) dengan industri perbankan²¹, namun ekspor dan UMKM justru menjadi penyelamat perekonomian dan tulang punggung yang diandalkan untuk pemulihan. Kali ini, sebagaimana

diuraikan di atas, ekspor dan UMKM justru menjadi korban pada ronde pertama dampak krisis finansial global.

Kegagalan Respons Pemerintah

Menghadapi realitas krisis sebagaimana disebut di atas, tampaknya pemerintah mengalami kegagalan. Langkah-langkah yang diambil cenderung terkotak-kotak dan tidak memiliki fokus kebijakan serta sasaran yang jelas. Kegagalan itu tampak jelas antara lain dari pernyataan Menteri Keuangan bahwa pemerintah masih bingung antara menyelamatkan dunia usaha atau pekerja. Pernyataan ini, tentu saja, keliru. Dalam situasi krisis, penyelamatan dunia usaha dan pekerja harus berjalan seiring. Sebab, tanpa menyelamatkan pekerja, tentu dunia usaha pun akan mengalami kesulitan. Sebaliknya, tanpa menyelamatkan dunia usaha, maka pekerja pun akan kehilangan tempatnya memperoleh penghidupan.

Pengalaman krisis di berbagai negara menunjukkan bahwa penyelamatan dunia usaha memerlukan peran pemerintah yang aktif. Stimulus fiskal pada sasaran yang memiliki efek berganda paling besar terbukti mampu memelihara roda perekonomian tetap bergerak, sekaligus mempertahankan output industri, sehingga meminimisasi terjadinya pemutusan hubungan kerja. Mengandalkan pasar untuk mencari keseimbangan baru adalah ibarat menanti kapal yang bocor untuk secara alamiah mengapung kembali. Padahal, kapal yang bocor niscaya akan tenggelam. Karena itu, dibutuhkan

20 Indonesian Petroleum Association, Indonesian Security Outlook 2009, Jakarta: PT Sekurindo Gada Patria, 2008.

21 Lihat M. Khusaini, "The Role of Economic Fundamentals in Explaining Indonesian Currency Crisis." MA Thesis, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, 2002.

22 Joseph Stiglitz mengatakan hal ini secara tegas. "Markets are not self-correcting in the relevant time frame. No government can sit idly by as a country goes into recession or depression..." [pasar tak dapat mengoreksi dirinya sendiri pada waktu yang sesuai. Tak ada pemerintah yang dapat duduk santai ketika negaranya sedari menuju resesi atau depresi...] Lihat:

Stiglitz, "Turn Left for Growth", Project Syndicate, August 2008. Dapat diakses pada: <http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz102>. Bahkan, Presiden baru AS Barack Obama dalam Pidato Pelantikannya pada 20 Januari 2009 juga mengatakan bahwa "this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can spin out of control - and that a nation cannot prosper long when it favours only the prosperous" [krisis ini telah mengingatkan kita bahwa tanpa pengawasan, pasar dapat berputar di luar kendali – dan suatu bangsa tak dapat makmur secara lestari ketika ia hanya menguntungkan kaum berpunya].

intervensi, menambal yang bocor, agar *market failure* dapat dikoreksi.²²

Selain kegagalan, kebijakan pemerintah juga kerap diwarnai kepentingan-kepentingan pribadi pihak-pihak yang terkait dengan kekuasaan. Misalnya, kebijakan buy back sejumlah saham BUMN di pasar modal yang sarat dengan kepentingan untuk menyelamatkan nilai-nilai aset sejumlah kecil investor di pasar modal yang memiliki akses langsung terhadap kekuasaan. Kemudian, tanpa ada kejelasan kepentingan siapa yang hendak dilindungi, pemerintah malah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk memberikannya wewenang mengambil "tindakan-tindakan darurat" di masa krisis. Dengan berkaca pada kasus BLBI di masa lalu, yang kembali hanya menguntungkan konglomerat-konglomerat papan atas, wajarlah bila dampak lebih jauh dari pemberian wewenang yang amat besar semacam ini amat dikhawatirkan.²³

Penutup

Tampaknya terdapat kesenjangan antara pemahaman tentang akar-akar krisis finansial global sebagaimana diterangkan di atas, dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kesenjangan itu menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak selaras dan mengarah pada sasaran penyebab krisis, yaitu sistem keuangan yang sarat dengan kepentingan perburuan rente. Padahal, risiko ini dapat dimitigasi dengan memperkecil ruang terjadinya rente, antara lain dengan mengendalikan



arus devisa, penerbitan alat-alat tukar alternatif (misalnya dengan sistem kupon²⁴) dan lain-lain, sehingga mengurangi terjadinya spekulasi.

Memang, cakupan masalah menjadi sangat luas dan sebagian besar melibatkan faktor-faktor eksogen (di luar kendali pemerintah). Namun demikian, fokus kebijakan hendaknya tetap diarahkan pada pembenahan sistem keuangan di dalam negeri, disertai antisipasi dampak penularan krisis pada "pintu-pintu" yang paling rentan seperti digambarkan pada Diagram 2 di atas.

Hal krusial lain yang hendaknya mendapat perhatian khusus adalah meminimisasi dampak non-ekonomi dari krisis finansial. Ancaman pengangguran yang massif dan kebangkrutan industri secara meluas, harus dapat diimbangi dengan peran anggaran negara yang lebih besar melalui stimulus-

stimulus fiskal dan menjalankan aneka proyek padat karya. Pembangunan infrastruktur, misalnya, tak dapat ditunda lagi demi menyerap tenaga kerja dan memberikan akses yang lebih baik bagi berkembangnya industri-industri baru.

Akhirnya, memasuki "tahun politik" 2009 yang sangat dinamis ini, hendaknya pemerintah memiliki fokus yang jelas dalam respons terhadap krisis ekonomi. Reformasi sistem keuangan yang *rent seeking*, mengatasi potensi meledaknya pengangguran, menopang daya beli masyarakat, dan menyelamatkan sektor industri padat karya, adalah empat fokus utama yang tak boleh luput dari perhatian. Kegagalan mengantisipasi keempat hal itu akan berdampak luar biasa pada stabilitas sosial-ekonomi-politik dan kita semua harus menanggung akibatnya.***

23 Perpu tersebut akhirnya tidak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga, sesuai konstitusi, tidak dapat diberlakukan sebagai Undang-Undang.

24 Sistem kupon pernah diterapkan di Amerika Serikat pada saat Depresi Besar 1930-an. Caranya, setiap orang yang bekerja pada proyek padat karya pemerintah, mendapat upah dengan bentuk kupon. Kemudian, kupon ini harus dibelanjakan pada kurun waktu tertentu, sehingga tidak dapat disimpan. Dengan demikian, tambahan pendapatan yang

diberikan negara tidak terserap kembali ke dalam sistem perbankan/moneter dan dapat mempertahankan/meningkatkan daya beli. Hal yang sama pernah diterapkan di kota Curitiba, Brazil pada tahun 1973. Lebih lanjut dapat dilihat antara lain Michael R. Sesit, "Joe Blow Needs Spending Money, Not Tax Cuts", Bloomberg, 30 Januari 2008. (dapat diakses pada: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601039&refer=columist_sesit&sid=aBQGmJCFW4)



Yanuar Rizky¹

Makna Krisis Finansial Global Penyebab Krisis S Pengingat Teraba Di Politik Ekonom

Ketika pengambil-alihan hutang swasta oleh negara (*bail out*) terjadi di Amerika Serikat (semester dua 2008), di beragam komunitas diskusi internet (milis) Indonesia terjadi suasana euforia “mempergunjingkan”. Bagi negara seperti Indonesia, ini seperti “bumerang” atas ulah spekulasi yang membuat krisis nilai tukar Asia 1997.

Betapa tidak, hal itu berujung ke penyuntikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk penyelamatan Perbankan di tahun 1998, yang masih menjadi beban hukum politik-ekonomi hingga saat ini. Beban BLBI dalam bentuk obligasi rekap masih terus membayangi beban belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain penyehatan Perbankan sendiri, sampai dengan 10 tahun paska krisis dirasakan belum pulih dari sisi mendongkrak kembali intermediasi ke sektor riil.

Sehingga, beban sebagai investasi “*give money to take money*” dari kebijakan BLBI belum dirasakan dalam bentuk

peningkatan penerimaan negara di APBN. Fakta finansial keuangan negara tersebut, terlihat dari rendahnya pertumbuhan rasio pajak (*tax ratio*) di realisasi APBN meskipun jumlah agregatnya tumbuh lebih pesat.

Tengok saja data yang ditunjukkan di diagram 1, prestasi telah “keluar dari krisis” yang diklaim oleh pemerintah Indonesia, dengan telah berkurangnya rasio hutang akibat pembiayaan luar negeri (PLN) dan Obligasi Rekap BLBI yang turun di kisaran ke 70% menuju 30%, jika dilihat diatasi dengan penerbitan Surat Utang Negara (SUN).

Artinya, hutang lama yang sifatnya “bilateral” dan “multilateral” diatasi dengan penerbitan hutang baru dari pasar keuangan. Hal inilah yang menjadi data kunci, bahwa perekonomian Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap posisi dan kondisi di pasar finansial.

Tak terpungkiri, jeratan “hutang baru” digunakan untuk menutupi

¹ Yanuar Rizky, www.elrizky.net, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Analis Independen – Aspirasi Indonesia Research Institute (AIR inti)

Goal Bagi Negara Berkembang: Sektor Riil atau Mekanismenya Sektor Riil di Negara?

beban "hutang lama" (salah satunya beban BLBI) terjangkit di perekonomian Indonesia, meski tumbuh. Hal ini terlihat dengan Pertumbuhan ekonomi terjadi tanpa diikuti peningkatan realisasi tax ratio, yang menunjukkan tidak berkualitaskan pertumbuhan ekonomi. Sehingga tumbuh, tapi daya beli upah melemah dan tetap terancam PHK sebagaimana tampak dalam Indeks Daya Beli dan Persepsi Pekerja.

Di sisi lain, suasana politik di alam demokrasi telah melahirkan fragmentasi aliran dalam politik-ekonomi, sebagai akibat dari tidak tercapainya keseimbangan antara makro ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Dampak ikutannya, lahirnya "stigma" bahwa peran negara dalam perekonomian harus dikurangi, dengan menyerahkannya ke pasar.

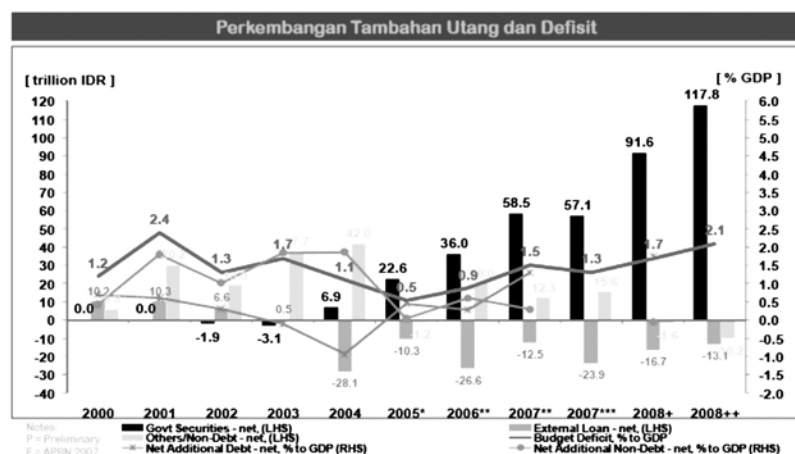
Menurut penganut antiekonominisme liberal, kejadian tersebut dikarenakan terus diratifikasinya peran pasar sebagai "konskuensi" masuknya International Monetary Fund (IMF) saat krisis terjadi. Itulah kenapa, ketika Amerika Serikat yang di-Citra-kan sebagai pengendali

IMF masuk ke lubang yang sama dengan peristiwa BLBI, banyak pihak merasa "bumerang telah berbalik ke pelemparnya".

Euforia ini tak berlangsung lama, saat kurs Rupiah terus melemah terhadap US Dolar. Masyarakat awam di Indonesia bahkan bertanya sangat sederhana

"kenapa AS bangkrut Rupiah yang melemah?". Untuk menjawabnya, sederhana saja karena keuangan negara telah memiliki ketergantungan terhadap pasar finansial itu sendiri, seiring pertumbuhan SUN yang tinggi (diagram 1). Dimana, SUN tersebut menjadi portopolio dari pemain pasar

Sejak 2005, SUN menjadi sumber utama pembiayaan APBN
Peningkatan tambahan SUN (neto), terutama karena semakin besarnya defisit
Tambahan PLN (neto) negatif sehingga stok-nya semakin menurun



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG - DEPKU

4

Diagram1: Proporsi Hutang Pemerintah Indonesia

Indeks Daya Beli Pekerja

No.	Item	Triwulan IV (%)	Triwulan III (%)	Triwulan II (%)	Triwulan I (%)
1	Konsumsi Makan Pribadi	26.48	25.83	22.45	20.96
2	Konsumsi Makan Keluarga	63.51	61.07	32.67	31.44
3	Kontrak Rumah	21.51	21.68	21.5	19.59
4	Lain-lain	32.98	26.42	24.23	23.73
5	Transport Pribadi	10.55	14.21	11.67	11.19
6	Transport Keluarga	20.02	26.19	20.86	20
7	Pendidikan	16.91	20.51	16.09	15.04
8	Kesehatan	7.63	9.01	9.34	9.32
9	Cicilan Rumah	34.31	24.31	27.25	26.29

Indeks Persepsi Pekerjaan Terhadap Kebijakan Pemerintah

No.	Item	Triwulan IV (%)	Triwulan III (%)	Triwulan II (%)	Triwulan I (%)
1	Tempat Tinggal	27.33	26.55	29.05	27.54
2	Transportasi	35.5	34.9	37.15	34.84
3	Pangan	41.85	35.38	35.35	36.6
4	Kesehatan	37.24	29.6	31.71	33.44
5	Pendidikan	35.62	27.05	31	32.45
6	Kepastian Kerja	27.23	25.07	26.74	26.7
7	Jaminan Sosial	37.96	25.49	34.15	36.6

Tahun awal survey 2008, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)

keuangan yang mayoritas asing. Itulah episentrum kenapa Rupiah melemah.

Kepanikan ini terus bertambah, tatkala perkataan "dampak krisis finansial" menjadi alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan upah dan upaya meliberalisasi hubungan industrial itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan kunci, apakah saat pasar finansial memasuki masa emas diikuti oleh Industrialisasi Ekonomi? Kalau ya jawabannya, lalu mengapa terjadi pertumbuhan ekonomi tak berkualitas?

Sinyal Pertumbuhan Tak Berkualitas

Pasar finansial pada dasarnya adalah sarana (infrastruktur) dari berjalannya fungsi intermediasi yang menjadi fungsi utama dari Industri Keuangan. Yaitu, menjembatani sektor riil (*supply side*) mendapatkan dana para pihak yang memiliki cadangan modal (*demand side*). Itu kenapa, pasar finansial yang

berkualitas akan menjamin sektor riil yang bekerja penuh.

Dalam perkembangannya, sekuritisasi dokumen kontrak antara pemilik dana dengan sektor riil penerimanya berkembang menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan (*portfolio*). Itulah yang disebut dengan pasar finansial. Jika dikembalikan ke filosofi dasarnya, pasar finansial yang memperdagangkan surat berharga dibutuhkan sebagai sarana peralihan modal antar pemilik modal, baik itu karena urusan ambil untung maupun karena kebutuhan likuiditas untuk melepas aset.

Pasar finansial secara filosofis memang kental dengan nuansa "lindung nilai" (*hedging*), yaitu pemodal terlindungi di masa depan serta memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan keuntungan maupun likuiditas-nya. Likuiditas menjadi kebutuhan daya tarik menanamkan investasi sekaligus

menjadi resiko. Hubungan linier inilah yang dikenal dengan teori "*high risk - high return*".

Mengelola Pasar Finansial adalah seni mencari keseimbangan antara keuntungan, yang memberi nilai bagi tumbuh berkelanjutannya sektor riil (aspek fundamental) dan tujuan likuiditas dari pemodal-nya (aspek teknikal). Perekonomian negara yang sehat (berkualitas), akan terjadi tatkala pasar finansial mencapai keseimbangan dari aspek fundamental yang menjadi "*leading factor*" di atas aspek teknikal.

Keuntungan teknikal, dalam bentuk capital gain (selisih harga jual atas harga beli surat berharga di pasar finansial) tidaklah salah, sepanjang berkorelasi dengan terjadinya keuntungan di sektor riil-nya. Karena sektor riil yang untung, akan memberi deviden bagi pemodalnya, peningkatan upah dan bonus bagi pekerja-nya dan memberi ruang ekspansi untuk menyerap lapangan kerja baru.

Kalau dilihat dari korelasi tersebut, pada saat pasar finansial dunia mengalami likuiditas dan pertumbuhan indeks terbesar (2002-awal semester dua 2008), tanda-tanda ketidakseimbangan antara parameter makro yang ditunjukkan pasar finansial dengan akar fundamental di sektor riil-nya menunjukkan sinyal siaga.

Hal itu terlihat dari 19 negara anggota OECD (*Organization For Economic Co-operation and Development*), hanya 3 negara yang menunjukkan korelasi pertumbuhan parameter makro dengan akar fundamental ekonomi riil. Yaitu, terjadinya pembentukan modal tetap bersih (*capital stock*) dan terjadinya penyerapan lapangan kerja (*employment*) dari pertumbuhan ekonomi-nya (GDP).

Data statistik menunjukkan bahwa pasar finansial dunia menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa, yang juga diikuti membaiknya pertumbuhan ekonomi-nya. Dalam ilmu ekonomi, dikenal "*Law of Deminishing Theory*"

**Tabel 1: Potential GDP, employment and capital stock
Percentage change from previous period**

	GDP			Employment			Capital Stock		
	2006	2007	growth	2006	2007	growth	2006	2007	growth
Australia	3,3	3,3	0,00	2,1	2,3	0,70	3,8	3,7	-0,07
Austria	2,2	2,3	0,14	1,0	0,6	-0,43	2,7	2,7	0,00
Belgium	2,2	2,1	-0,08	1,1	1,5	0,41	1,9	1,9	0,01
Canada	2,8	2,9	0,11	2,0	2,3	0,30	4,3	4,3	0,00
Denmark	1,9	1,9	0,01	2,0	2,4	0,42	4,0	3,9	-0,15
Finland	3,1	3,4	0,25	1,8	2,0	0,28	0,2	0,1	-0,17
France	1,9	1,8	-0,10	0,9	1,1	0,12	3,1	3,1	-0,01
Germany	1,5	1,6	0,11	0,6	1,7	1,05	1,6	1,6	0,00
Greece	4,1	4,2	0,18	2,4	1,7	-0,68	5,3	5,3	0,00
Ireland	5,9	5,4	-0,45	4,4	3,3	-1,14	5,8	5,7	-0,15
Italy	1,2	1,2	0,05	2,2	0,6	-1,56	3,6	3,6	-0,02
Japan	1,4	1,5	0,03	0,4	0,4	0,01	2,6	2,6	0,01
Netherland	1,9	1,8	-0,12	1,9	1,8	-0,09	2,0	2,0	0,00
New Zealand	3,1	2,9	-0,20	2,1	1,7	-0,47	3,7	3,7	0,00
Portugal	1,6	1,6	0,09	0,7	0,0	-0,73	3,9	3,9	0,00
Spain	3,5	3,5	0,00	4,1	3,3	-0,76	5,1	5,1	0,00
Sweden	3,2	3,3	0,15	2,0	2,6	0,54	3,2	3,0	-0,25
United Kingdom	2,7	2,7	-0,04	0,9	0,5	-0,36	2,9	2,8	-0,07
United States	2,6	2,5	-0,05	1,9	1,1	-0,77	3,9	3,6	-0,21

Source: OECD Country Members Indicator Report

Diolah kembali, Yanuar Rizky

yang menyatakan bahwa puncak dari pertumbuhan adalah titik awal dari pembalikan arah.

Disinilah, ekonomi di tataran kebijakan politik-ekonomi harus dilihat sebagai seni (*art*) bukan teori semata (*science*). Karenanya, berpikir linier tentang ekonomi hanya dari parameter tanpa melakukan “*check up*” seluruh organ tubuh adalah awal dari keteledoran melihat “titik keuntungan optimum yang diikuti oleh resiko optimum”. Disitulah, seni dari membaca keadaan menjadi penting dibandingkan “citra politik” semata.

Saya sengaja menunjukan data tahun 2007, karena tanda-tanda demam sudah terlihat saat itu. Yaitu, terkonfirmasi-nya gagal bayar Kredit

Perumahan (KPR) yang jadi underlying dari sekuritisasi subprime mortgage di pasar finansial Amerika Serikat (AS). Banyak pemimpin politik negara seolah “tutup mata” dengan “wabah demam” tersebut, tatkala pasar finansial-nya seolah “tidak terpengaruh” dengan terus “bergembira” dengan racing pasar finansial negerinya ke posisi puncak.

Pemetaan Respon Krisis Finansial

Studi kasus respon pemerintah Indonesia menunjukan “percaya diri berlebihan” membawa manajemen kebijakan ekonomi melupakan “high risk high return” dalam mengelola sinyal “deminishing return” sebagai sebuah fakta. Tak salah memang, jika kita harus

mengingat filosofi tradisional “musuh terbesar adalah diri sendiri, dimana kekuatan terbesarnya jika kita telah mengenal diri sendiri bukan berharap dari kekuatan orang lain”.

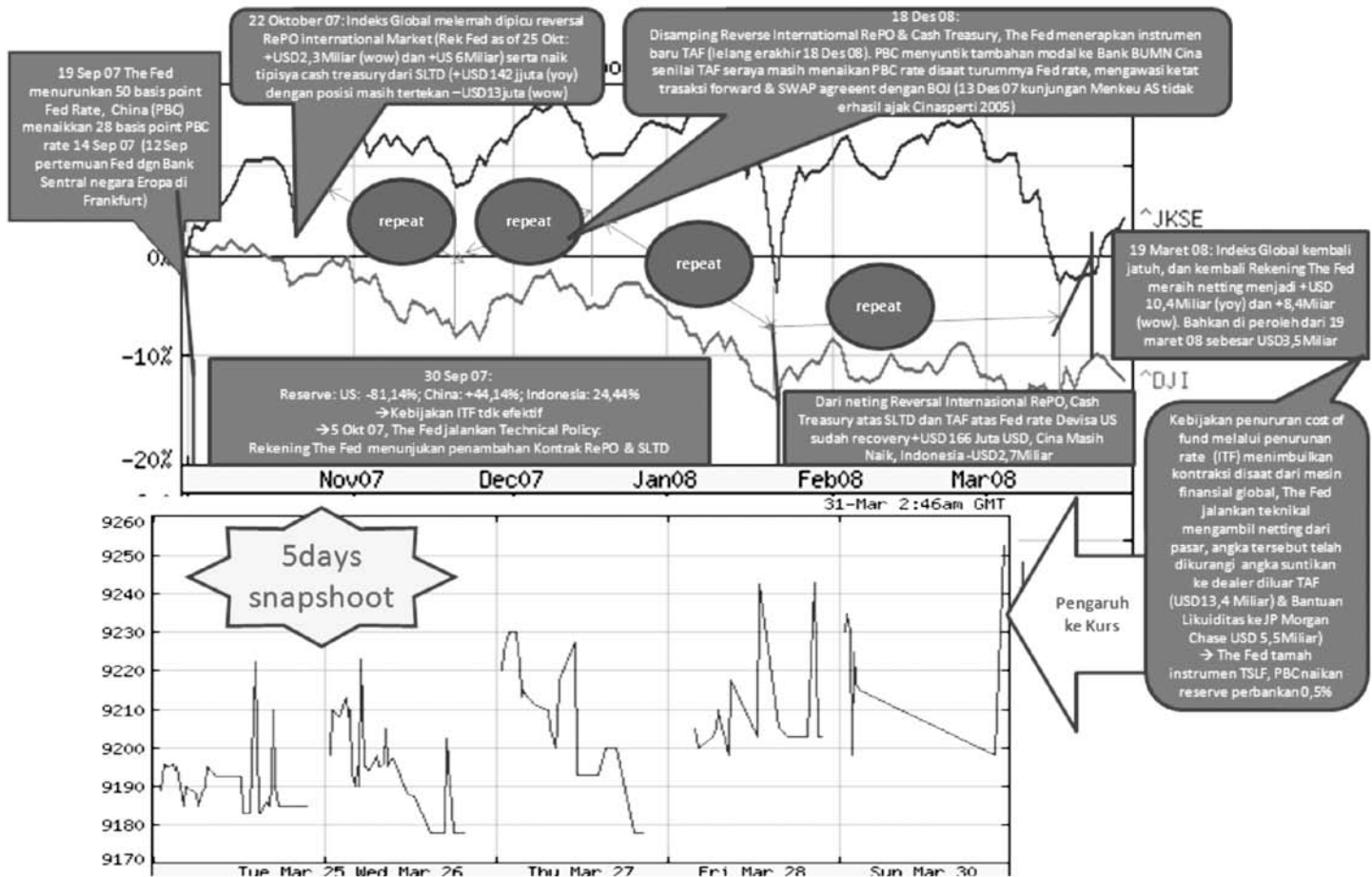
Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa Perbankannasional tidak adayang membeli subprime mortgage, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu, pemerintah menegaskan bahwa kondisi fundamental perekonomian Indonesia bagus. Tak kalah menariknya, otoritas pasar modal meyakinkan bahwa kondisi emiten di Bursa Efek Indonesia sehat.

Jika kita tarik garis perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ke posisi setelah Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) mengumumkan terjadinya gagal bayar *subprime mortgage*, maka seolah meninggalkan sentimen negatif yang hinggap di bursa New York (NYSE).

Kondisi Indeks BEI yang bertolak arah dengan Indeks NYSE seolah memberi “angin” kepada otoritas dan pemerintah Indonesia bahwa “negerinya steril dari demam di AS”. Satu hal yang cukup serius, dan dilupakan adalah melihat pasar dari dua sisi sekaligus, yaitu penawaran dan permintaan. Jika saja asumsi pemerintah benar “investor melirik sisi penawaran ekonomi Indonesia yang masih kuat”, maka bagaimana dengan sisi permintaan tentang posisi investor itu sendiri?

Saat itu (Agustus 2007), posisi portopolio di pasar finansial Indonesia 70% ditangan asing (data KSEI: Kustodian Sentral Efek Indonesia). Lalu, jika kita lihat lagi statistik arus dana portopolio dikuasai oleh perputaran dana nasabah hedge fund yang dikelola oleh Investment Bankers di industri sekuritas AS. Disinilah sisi pandang-nya, jika investor-nya sedang mengalami kerugian, maka logika-nya mereka akan segera melepas aset lain untuk menutup kerugiannya.

Dalam posisi kecemasan, melepas (memutar) aset tentu-nya memerlukan ilmu (teknik) “memancing”. Sederhana



©2007-2008:YANUAR RIZKY, www.elrizky.net

saja, tidak ada pihak yang mau berbisnis dengan orang bangkrut, ataupun penjual yang terlihat panik akan "ditekan" posisi tawarnya. Jika kita sadar investor yang memegang "kendali permainan" dalam posisi bangkrut, tentu pemerintah dan otoritas akan berhati-hati melihat fenomena berdetak kencang-nya BEI dimulai di September 2007 tersebut.

Dalam beberapa tulisan di media masa dan *talk show* di media elektronik sejak bulan September 2007, saya telah berulang-kali memberikan "warning" tren menuju titik return tertinggi adalah resiko tertinggi menuju berjalannya "*law of deminishing return*". Sinyal ini semakin terlihat, tatkala nilai tukar (*kurs*) Rupiah atas US Dolar melemah saat Indeks BEI menunjukkan tren menguat secara periodik (pola anomali).

Kenapa nilai tukar melemah, jelas

karena permintaan Rupiah meningkat. Rata-rata transaksi harian di BEI tahun 2007 adalah Rp4,2 Triliun, di sisi lain data transaksi besar di sistem pembayaran Bank Indonesia (RTGS: *Real Time Gross Settlement*) menunjukkan kisaran yang sama. Artinya, perputaran transaksi finansial adalah dominasi dari posisi penyelesaian pembayaran di perbankan.

Kalau 70%-nya adalah "pemain asing", maka keuntungan penjualan surat berharga dalam Rupiah akan ditukar ke US Dolar. Itu mengapa, kurs melemah. Dan itu, sudah terlihat sejak indeks BEI *racing* di September 2007. Sayang, pemerintah justru membanggakan kondisi 2007 sebagai sinyal "kepercayaan investor asing". Padahal, gesekan portopolio ke kurs akan mengganggu posisi sektor riil yang

berada di posisi *net importir*.

Untuk melihat gesekan portopolio negara maju ke masalah negara berkembang, dapat dipolakan secara sederhana dalam kronologi:

1. Posisi dimulainya kebijakan teknikal dari instrumen moneter The Fed adalah pemicu "naik"-nya indeks BEI di tahun 2007, yang secara konsisten terjadi pula aksi ambil untung di hari Rabu-Kamis. Mengapa Kamis, karena itulah waktu bagi The Fed menutup rekening arus kas devisa mingguannya.
2. Kalau dipetakan, umpan pancing terlihat tatkala The Fed memperbesar kebijakan penerbitan kontrak RePO (*Re Purchase Order*) di akhir September 2007 yang berkorelasi dengan naiknya Indeks BEI. Sekilas tentang RePO adalah transaksi

- pinjam meminjam surat berharga antara Bank Sentral dengan para dealer-nya dengan jangka waktu dan tingkat suku bunga tertentu. Jadi keuntungan diperoleh saat kontrak RePO dieksekusi (*Reverse RePO*) dalam bentuk pembayaran bunga sekaligus dilakukan pengembalian surat berharga yang dipinjamkan.
3. Sinyal bagi negara di luar AS telah tampak di seminggu setelahnya (4 Oktober 2007), dimana *Reverse RePO* dilakukan di "*Foreign Official and International Account*". Artinya, sedikit portopolio yang menjadi basis kontrak RePO di minggu sebelumnya ditarik ditambah penarikan diluar kontrak yang dibuat setahun sebelumnya.
 4. Saat itu, kontrak RePO baru juga diterbitkan kembali, yang menunjukkan kebijakan memancing bukan menarik total adalah cara The Fed mencari selisih positif untuk arus kas-nya. Dan konfirmasinya jelas, portopolio di luar negaranya menjadi sasaran memancing perolehan dana (*financial netting*) dengan umpan pancing "Kontrak RePO" dengan para dealer-nya. Sebagai informasi pula, dealer di sistem finansial The Fed adalah induk dari pengelolaan dana portopolio di pasar finansial global (*global hedge fund*).
 5. Energi cari selisih keuntungan finansial dari RePO untuk "digoreng" *hedge fund* di Bursa diluar AS, instrumen-nya ditambah lagi di bulan Desember 2007, yaitu dengan modal uang dalam bentuk pinjaman uang tunai berdurasi 28 hari antara The Fed dengan dealer-nya (TAF: *Term Auction Facilities*).
 6. Bunga TAF di atas *Fed rate*, jelas pusarannya akan mengganggu nilai tukar mata uang yang dijadikan target operasi *hedge fund*. Sayangnya, kembali berkorelasi ke guncangan Rupiah. Dimana, 18 Desember 2007 saat lelang TAF pertama kali dilakukan posisi Rupiah berada di titik koreksi terdalam di tahun itu (85 poin).
 7. Indikatifnya, setelah The Fed berhasil mengumpulkan selisih positif dari hasil operasi moneter-nya. Mulai dari posisi tertekan di September 2007 sampai mampu membiayai suntikan ke Berns USD13,5 Miliar di 20 Maret 2008.
 8. Setelah RePO dan TAF, di bulan April 2008 The Fed mengeluarkan instrumen tambahan untuk menyerap financial netting lebih agresif lagi, yaitu *Term Securities Lending Facilities* (TSLF). Dimana, para dealer akan mendapatkan tambahan dana pinjaman sepanjang memiliki obligasi AS.
 9. Sekali lagi, sayangnya kita kembali terjebak. Pemerintah terpancing melakukan *Buy Back* Obligasi USD yang belum jatuh tempo (April 2008) di saat para hedge fund membutuhkan menukar obligasi internasional dengan *US Bond* sebagai syarat mendapat fasilitas TSLF The Fed.
 10. Salah hitung melanda kebijakan arus kas devisa The Fed, dipicu transaksi silang Lehman Brothers ke *Bank Of America* (BOA) yang membuka tabir instrumen CDS (*Credit Default Swap*) sebagai instrumen turunan dari deversifikasi resiko gagal bayar *mortgage*. Sehingga, konsolidasi *Investment Holding* mengalami kebutuhan likuiditas untuk menutup CDS, yang membutuhkan dana talangan pemerintah AS
 11. Kebijakan tersebut terjadi, setelah keputusan politik Kongres AS menggariskan adanya skema pengembalian dana talangan itu sendiri. Sehingga, setiap aset yang diambil oleh The Fed dari penerima *Bail Out* harus segera dijual, untuk menjamin terjadinya proses pengembalian.
 12. Karena yang diambil alih adalah perusahaan investasi, maka asetnya adalah portopolio di pasar finansial

global. Itulah sebabnya, paska *bail out* terjadi pelepasan surat berharga global sebagaimana terjadi di BEI diawali jatuhnya saham yang di-RePO-kan pemegang sahamnya kepada kreditur asing (dealer The Fed).

Dari 12 angka paragraf diatas yang menarasikan kronologi aksi-reaksi antara kebijakan moneter negara maju dan respon pemerintah negara berkembang (studi kasus Indonesia), maka dominasi global *hedge fund* sebagai market leader tampak jelas.

Dimana, melalui pancingan RePO, TAF dan TSLF, The Fed mampu melakukan suntikan likuiditas ke *Bear Sterns* (angka 7). Jadi, salah jika ada yang memandang krisis dalam arti bail out baru terjadi saat kejatuhan Lehman Brothers (angka 10). Bedanya saat menolong Bear Sterns kebijakan arus kas tidak menyentuh aset negara, sedangkan paska Bail Out melalui keputusan kongres AS melibatkan aset negara. Di titik itu, krisis terasa karena kebijakan tidak lagi memancing tapi menjual aset.

Negara berkembang, justru harus membayar biaya penanganan krisis negara maju. Hal ini terlihat dari melemahnya nilai tukar, yang telah terjadi sejak September 2007 serta teralokasikannya anggaran negara untuk sesuatu yang tak mendesak (angka 9).

Di titik pemetaan ini, apakah benar negara berkembang seperti Indonesia terkena "sindrom de-industrialisasi" hanya semata terjadinya tsunami finansial yang dimulai dari "kejatuhan Lehman Brothers". Saat emas, dalam periode setahun sebelumnya mengkonfirmasi tak bermakna pula bagi industrialisasi itu sendiri.

Menanamkan Kembali Pohon Kesejahteraan

Terjebaknya politik ekonomi negara di suasana "mesin finansial yang keluar dari sektor riil-nya" telah diuraikan di

bagian sebelumnya. Suasana negara maju (OECD) yang memicu “pasar finansial” telah berdampak lepasnya akar “linier” parameter makro dengan kondisi mikro pembentuknya, yaitu kesejahteraan.

Potret derap pasar finansial tahun terakhir (dimulai di September 2007), ketika “overheating” terjadi, tetap menjadikan negara berkembang sebagai korban di saat masa bullis ataupun bearis pasar finansial dunia. Bagi saya, masalahnya tidak cukup dengan hanya menyalahkan “neo liberal” semata. Ataupun, menggugat negara maju. Karena jawaban lepas dari krisis bukanlah kekuatan eksternal, tapi kekuatan internal.

Krisis ini, secara pragmatis praktis adalah saat bagi para pemimpin politik melakukan koreksi tata kelola politik ekonomi negara (*state capture*). Tidaklah salah, bagi setiap negara akan melakukan beragam kebijakan ke dalam. Lihatlah kemenangan Barack Obama di AS, dari program kampanye sampai pidato pelantikannya dia menawarkan “peran negara” yang lebih besar sebagai stabilisator ekonomi ke titik keseimbangan baru.

Obama, menyatakan “*In bold swift action*”. Jika kita menyadari itu searah dengan apa yang dikatakan Franklin D. Roosevelt (FDR) “*Concerned Citizens Think Out Of The Box*” saat memenangi pemilu Presiden AS (1932) setelah *great depression* 1929. Itu artinya, kembali ke akar kesejahteraan dalam bentuk sistem ekonomi yang menjamin rakyatnya memiliki daya kerja dan jaminan sosial.

Kembali menanam akar, juga kita lihat di Restorasi Meiji yang diimplementasikan Kaisar Meiji. Maupun Cina di satu dasawarsa terakhir dibawah pengaruh Deng Xioping di Partai Komunis Cina. Meiji, FDR, Xioping dan mungkin Obama adalah aktor yang memimpin perubahan dengan menggeser arus linier “makro” kembali ke akar-nya. Dan itu biasanya, diikuti kebijakan proteksionisme industri.

Di posisi seperti itu, apakah wajar bagi negara berkembang seperti Indonesia hanya “pasrah” kepada kekuatan eksternal? Misalnya saja, beralasan terjadinya PHK dikarenakan dampak krisis finansial global akhir-akhir ini, apakah memang demikian atukah selama ini kebijakan politik-ekonomi yang dianut yang salah?

Pemerintah dan beberapa kalangan menyatakan bahwa pasar ekspor melemah akibat krisis finansial global, sehingga pengurangan upah dan PHK adalah dampak yang tak bisa dihindari. Fakta saat pertumbuhan ekonomi Indonesia (GDP) baik didukung tingginya performa pasar keuangan Indonesia, tren de-industrialisasi terlihat

Jika tidak, mungkin masalahnya sederhana “kita terlalu tergantung ke kekuatan eksternal, yang tidak mengakar dalam platform tata kelola politik ekonomi negara itu sendiri (*state capture*)”. Sinyal tidak adanya akar dalam perekonomian (industrialisasi), terlihat dari rendahnya peran pajak dan tidak adanya sistem jaminan sosial.

Mari kita lihat persoalan “hubungan industrial” yang terlalu kaku dengan “*high cost*” di manajemen resiko dunia usaha (tingginya uang pesangon PHK) selalu menjadi alasan tidak tumbuhnya lapangan kerja. Apakah benar? Tat kala negara (*state capture*) tidak memiliki sistem jaminan sosial yang melekat dalam hukum politik-ekonomi itu sendiri.

Negara maju mendorong negara berkembang, seperti Indonesia untuk menerapkan “pasar tenaga kerja fleksibel”, tapi jika dilihat apakah ada negara yang tak menjamin resiko sosial-nya? Sekali lagi, kesalahan mendasar adalah “*follower*” cenderung tidak filosofis. Terlepas dari mazhab ekonominya, krisis ini mengingatkan semua negara untuk kembali ke filosofi-nya, yaitu masyarakat yang sejahtera.

Kesejahteraan hanya akan terjadi tat kala sistem ekonomi bekerja penuh yang memberi kekuatan daya beli

masyarakatnya dan terkelola dengan manajemen resiko-nya (jaminan sosial). Mari kita tengok, mengapa negara maju seperti AS, Eropa dan Jepang (OECD) saat ini disibukan dengan “stimulus fiskal” untuk mencegah PHK, jika ekonomi pasar itu “tidak peduli” mengapa pusing?

Jika dilihat, karena sistem jaminan sosial ditanamkan dalam akar platform politik-ekonomi negara, maka ekonomi negara akan bekerja untuk menciptakan daya kerja mesin ekonomi itu sendiri. Amerika Serikat dengan sistem jaminan sosial sepenuhnya ditanggung negara (kuasi privat), tentu akan menghadapi defisit anggaran yang membesar kalau pengangguran terus bertambah. Karena penganggur berhak melakukan klaim “upah penganggur” kepada pemerintah.

Eropa dan Jepang dengan model asuransi jaminan sosial, dengan premi dari alokasi anggaran belanja pemerintah dan tabungan pekerja (kuasi swasta) akan berisiko likuiditas jika penganggur bertambah, yang berarti tanggungan klaim “asuransi pengangguran” akan meningkat.

Di sisi lain, Cina menerapkan model SWF (*Sovereign Wealth Fund*). Dimana, operasional asuransi jaminan sosial dengan premi model privat (alokasi arus kas devisa dan anggaran belanja pemerintah). Kalau dilihat di titik ekstrim, ekonomi pasar dan komunis ternyata menanamkan akar “jaminan sosial”.

Coba bayangkan, jika negara berkembang tidak “tercerahkan” dan dipaksa meratifikasi “ujung” sebuah pohon tanpa dikasih “akar”-nya, maka yang terjadi “debat tak berujung”. Apapun pohon (mazhab politik-ekonomi) tanpa akar adalah kesia-siaan.

Coba kita dengan kepala dingin berpikir, bagi negara berkembang ekonomi makro baik dan buruk terjadi pelemahan daya beli dan tren deindustrialisasi di sisi mikro. Karena saat baik, kita tidak memanfaatkannya sebagai momentum “mencangkok” akar

dari pohon ekonomi negara maju.

Padahal, Teori Ekonomi Pembangunan yang diajarkan di Fakultas Ekonomi mengajarkan “negara berkembang akan lebih cepat menjadi negara maju, karena masa belajar menuju kemajuan (*learning curve*) telah diperoleh dari negara yang lebih dahulu maju sepanjang kebijakannya dapat menyerap filosofi dari masa belajar itu sendiri”.

Di sisi lain, teori ekonomi juga mengajarkan ciri negara berkembang (miskin) adalah besarnya kesenjangan jumlah masyarakat yang terdidik (*human capital divide*). Artinya, asumsi dalam teori ekonomi pembangunan “sepanjang menyerap pelajaran dari *learning curve* negara maju” dan “*human capital divide*”, maka jawabannya adalah kepemimpinan politik yang kuat dan efektif.

Masa transisi demokratisasi dengan model terbuka dari tertutup, itulah masa-masa sulit yang harus dijawab oleh negara berkembang seperti Indonesia. Saat ini, terkesan Industrialisasi Politik belum diikuti Industrialisasi Ekonomi, bahkan cenderung deindustrialisasi ekonomi.

Dari sisi akar, apapun mazhab politik-ekonomi yang dianut kandidat dan partai politik belum ada yang menjawab dua isu penting yang saling terkait dalam menciptakan kesejahteraan. Yaitu, harmonisasi kebijakan fiskal-moneter-otonomi daerah yang menciptakan (menstimulasi) daya beli dari penciptaan daya kerja dengan sistem jaminan sosial yang melekat.

Kita harus percaya, krisis adalah saat yang tepat melakukan koreksi aksi. Dan aksi yang tepat harus berangkat dari kesadaran dalam merenungkan fakta sejarah. Berdebat mazhab ekonomi adalah kesia-siaan, yang perlu dilakukan adalah kemampuan merekayasa teori dari legitimasi demokrasi (politik)

menjadi wujud nyata kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial (ekonomi).

Pasar finansial tak bisa kita salahkan sebagai sebuah pasar, yang harus dikoreksi adalah pemanfaatannya bagi korelasi penerapan instrumen kesejahteraan rakyat. Cina, adalah contoh negara (dengan SWF dan operasi Moneter-nya) yang bermain di “mesin finansial” dan membawa hasilnya ke penguatan sektor riil. Eropa dengan asuransi sosial-nya adalah negara yang memutar dana “jaminan sosial” di pasar finansial.

AS, sebagai negara memang terlepas. Karena yang bermain di pasar finansial adalah murni pelaku industri keuangan. Tapi, saat masa emas rakyat-nya memperoleh manfaat keuntungan dari masa *bullish* pasar finansial, karena kemampuan daya beli upah yang tinggi memungkinkan masyarakat membeli produk investasi itu sendiri.

Saat ini, kebangkrutan pelaku pasar finansial membuat pemerintah AS yang menguasai portopolio. Sinyal dari Presiden Barack Obama jelas “stimulus fiskal”. Itu artinya, aset portopolio di banyak negara akan dilepas untuk membiayai program fiskal-nya untuk mencegah meningkatnya defisit karena klaim biaya pengangguran.

Di sisi lain, tekanan jual juga akan terjadi di investment bankers eropa, karena pengelola asuransi sosial menempatkan dananya di portopolio, sehingga meningkatnya pengangguran “memaksa” mereka mengeksekusi portopolio untuk mengatasi likuiditas klaim asuransi pengangguran.

Tekanan jual yang besar tersebut akan ganggu Rupiah, karena meningkatnya demand mata uang asing yang menukarkan penjualan portopolio dalam rupiah ke mata uang investor asing. Kalau pasrah, dan menyalahkan ekonomi global ya sudah pasti Rupiah

terhentak dalam posisi net importir akan berakibat turunnya daya beli.

Pasar ekspor yang melemah, harus dilihat secara tidak linier pula. Kalau dilihat GDP Indonesia yang 65% dari Konsumsi, dimana barang konsumsi trejn-nya impor, maka pertanyaannya harus dicari celah kaitan produksi dan barang konsumsi masyarakat. Di titik ini, yang dimaksud pasar ekspor adalah kuota produk “*brand*” yang produksinya dikerjakan di Indonesia.

Kita bisa mencegah PHK di sektor padat karya. Jalannya negosiasi dengan pemilik “*brand*” untuk tetap memberi kuota produksinya ke Indonesia. Konsumsi barang impor (*branded*) di pasar konsumsi adalah daya tawarnya. Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja harus mendorong aliansi-nya di negara maju untuk memberikan order jika tetap ingin menjual barang-nya di pasar konsumsi Indonesia.

Di sisi lain, pola SUN harus dirubah. Hutang tidak salah sepanjang produktif. Sehingga, SUN yang diterbitkan harus ke stimulus fiskal yang menyerap lapangan kerja. Jangan mimpi “*deal*” dengan pemain pasar finansial global yang tengah bangkrut. Teroboslah kebijakan moneter yang terintegrasi dengan fiskal, yang mampu menggerakkan kembali intermediasi perbankan dan masyarakat di produk SUN terfokus tersebut.

Tak kalah penting, segera susun arsitektur sistem jaminan sosial. Agar akar platform politik-ekonomi tertanam. Krisis ini akan jadi makna “pembelajaran” bagi negara berkembang untuk menamakan akar ekonominya, sepanjang kita semua berhasil meraih hikmah dan menanamkannya kembali di sistem tata kelola ekonomi yang lebih demokratis (setara) dan berkeadilan sosial (*fairness*). Selalu ada keseimbangan baru, kita harus mendorongnya!.



Krisis Finansial Global: Apa yang Perlu Dilakukan?

CHRISTOPHER RUDE (Diterjemahkan dari FES Briefing Paper 12/November 2008)

1 Latar Belakang

Pada Kamis, 13 November 2008, Suatu kelompok yang terdiri dari akademisi, regulator internasional, perwakilan bank, pembuat kebijakan, dan aktivis serikat pekerja dari Amerika Serikat (AS), Eropa, Asia, dan Amerika Latin mengadakan pertemuan di New York untuk membicarakan krisis finansial global, faktor penyebabnya dan dampak sosial yang ditimbulkan, serta implikasi bagi regulasi dan pengaturan sistem perbankan dan pasar finansial. Pemenang hadiah Nobel, Joseph Stiglitz dari *Initiative for Policy Dialogue* (IPD), menjadi tuan rumah pertemuan yang diselenggarakan bersama oleh IPD dan *Friedrich Ebert Stiftung* (FES). Hadir juga dalam pertemuan tersebut adalah otoritas ekonomi senior, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, dari Argentina, Brazil, Kanada, Cina, Chile Kolombia, Mesir, Uni Eropa (EU), Jerman, Malaysia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan AS; termasuk Justin Lin, *Chief Economist* Bank Dunia, Poul Rasmussen, Kepala Komite Pengaturan Finansial Parlemen

Eropa, Y. V. Reddy, Gubernur Bank India, Paulo Nogueira Batista, Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund* atau IMF) untuk bagian Brazil, Amar Bhattacharya, Direktur Sekretariat G24, Philip Turner, Bank untuk Pembayaran Hutang Internasional (*Bank for International Settlements* atau BIS), serta Jose Antonio Ocampo dan Stephany Griffith-Jones dari IPD. Pada kesempatan itu Wakil Presiden Senior dari *Federal Reserve Bank of New York* atau Bank Sentral AS bagian New York, Christine Cumming menyampaikan pidato sambutan.

Diskusi setelahnya juga berlangsung secara terbuka dan serius. Para peserta mengetahui bahwa kepala negara industri dan negara berkembang anggota G20 akan bertemu di Washington dua hari kemudian, oleh karena itu mereka ingin mempengaruhi hasil pertemuan tersebut. Mereka menyambut baik gagasan untuk dibentuknya "Bretton Woods II", dengan melihat perlunya reformasi finansial yang mendasar bagi stabilitas ekonomi



dan sosial. Beberapa peserta memiliki perhatian pada Forum Stabilitas Finansial (*Financial Stability Forum* atau FSF) yang lebih baik, bersama dengan IMF, yang mungkin dapat berperan untuk mensosialisasikan gagasan tentang reformasi dengan agenda yang terbatas dan tanpa melakukan perubahan yang diperlukan dalam hal akuntabilitas dan tata pengaturan. Para peserta juga menyadari bahwa tindak lanjut Konferensi Internasional PBB mengenai Pembiayaan Pembangunan akan diadakan di Doha dua minggu setelah Pertemuan Tingkat Tinggi G20, dan oleh karena itu mereka ingin memperkuat inisiatif yang mungkin akan dihasilkan di sana untuk reformasi mendasar yang mencakup perubahan dalam institusi. Penulis berpartisipasi dalam diskusi *off-the-record* tersebut.

2 Elemen Kunci dari Reformas

Upaya serius untuk mereformasi sistem finansial internasional haruslah mempertimbangkan luasnya pelajaran yang bisa ditarik dari krisis yang

berlangsung saat ini untuk regulasi pasar finansial, langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk memungkinkan stabilitas finansial di masa mendatang, dan pembentukan ulang sistem finansial global—termasuk arsitektur dan tata pengaturannya—sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang paling mendasar. Upaya-upaya tersebut dapat dimulai dengan adanya pengakuan akan besarnya biaya sosial dari instabilitas finansial pada pasar dan negara-negara berkembang, umumnya pada kelas pekerja dan kelompok ekonomi lemah.

Situasi dan diagnosa. Melemahnya pasar *subprime* AS menyebabkan dampak sosial yang luar biasa merugikan pada negara berkembang. Negara dengan perekonomian, sistem keuangan dan perdagangan yang terregulasi serta tersusun dengan baik telah terimbas krisis melalui dampak tingkat dua dan tiga. Oleh karena itu, krisis ini tidak lagi merupakan krisis finansial yang berpusat di AS, namun menjadi krisis ekonomi global. Bagian penting dari

persoalan ini adalah interaksi antara pasar finansial dengan perekonomian yang sesungguhnya selama periode resesi. Diagnosa sederhananya adalah bahwa regulasi pasar finansial yang ada saat ini bersifat pro-siklikal, inkonsisten, ketinggalan jaman, tidak lengkap, kurang menaruh perhatian pada liabilitas jangka pendek yang dimiliki bank dan kebutuhan likuiditasnya, serta berdasar pada asumsi keliru bahwa penilaian pasar terhadap resiko sistemik dapat dipercaya.

Stabilitas Finansial. Untuk menjamin stabilitas finansial di masa yang akan datang, diperlukan langkah-langkah kongkret untuk menghilangkan atau setidaknya, mengurangi pro-siklikalitas sistem yang berlaku saat ini, membawa setiap institusi, pasar, instrumen, dan perekonomian ke dalam sistem kontrol pengaturan yang jelas dan sederhana, memenuhi kebutuhan likuiditas bank, dan secara agresif mengontrol resiko pasar agregat dan sistemik.

Menghadapi biaya sosial. Betapa pun pentingnya stabilitas ekonomi, ada

hal yang lebih dibutuhkan daripada itu. Sistem finansial dan perbankan tiap negara, sebagaimana uang, kredit, dan pasar modal internasional yang menghubungkan semua itu—termasuk tingkat kedalaman, stabilitas, serta keuntungan yang dihasilkan—merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukanlah tujuan akhirnya. Dimensi sosial dari krisis yang terjadi saat ini memunculkan pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan dari sisi keadilan rezim yang berlaku saat ini. Untuk menghasilkan stabilitas sosial, reformasi terhadap arsitektur keuangan internasional harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari pasar dan negara-negara berkembang, yang telah dirugikan oleh krisis yang berasal dari AS; termasuk kebutuhan dan kepentingan kelompok pekerja dan masyarakat ekonomi lemah.

Stimulus, solusi lainnya. Reformasi finansial tidak akan menghalangi memburuknya krisis, kecuali dibarengi oleh stimulus fiskal yang terkoordinasi dan injeksi likuiditas, penerapan kontrol modal untuk tujuan kontrasiklikal, dan reformasi IMF.

3.1 Fakta di balik Krisis

Permasalahan ekonomi global saat ini berawal dari AS dan berawal dari turunnya harga rumah-rumah yang menjadi aset dasar (*underlying assets*). Keruntuhan pasar kredit kepemilikan rumah AS yang telah diamankan beserta produk turunan yang terkait telah memperbesar kelemahan sektor ini dan mengirimkan keguncangan kontraksi ke seluruh dunia melalui ekonomi AS.

Surat berharga yang dibiayai oleh aset dan diterbitkan oleh lembaga khusus, lazim disebut sebagai *Special Purpose Vehicles* (SPV) yang saat ini tengah menghadapi masalah, membawa kelemahan pada pasar dana dollar, dan karenanya menyebabkan pembekuan pasar tersebut di bulan Agustus 2007. Pasar ini menyediakan pendapatan jangka pendek bagi konglomerat

finansial besar AS dan multinasional untuk membiayai investasi mereka, termasuk transaksi yang terjadi sehari-hari di lantai perdagangan mereka. Hal ini menjadi tidak aktif, dengan konsekuensi destruktif pada sistem finansial yang lebih besar.

Pembekuan total di bulan Agustus 2007 telah melumpuhkan sistem perbankan dan keuangan AS dan menyebabkannya keterpurukan secara perlahan. Keadaan mencapai puncaknya pada September 2008. Tidak banyak yang terjadi di dalam pusat sistem finansial yang memang telah berhenti bergerak, tapi kondisi ekonomi makro secara umum melemah dan menyeret harga aset semakin turun.

Deflasi hutang yang disebabkan oleh sistem makro yang klasik tengah berlangsung: terjadinya penyebaran pembekuan dari antar bank ke pasar uang AS jangka pendek, termasuk yang dikontrol oleh dana bersama pasar uang utama, dan turut menyebabkan pembekuan. Sebelum November 2008, keseluruhan sistem keuangan, tidak hanya meliputi pasar uang di Inggris ataupun AS, menjadi tidak mampu berfungsi, bahkan dalam fungsi sederhana untuk melakukan konversi simpanan perusahaan menjadi investasi ataupun pendanaan pembangunan rumah, konsumsi pribadi, dan pembangunan. Sangatlah sulit untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk meningkatkan dan menyuburkan kembali infrastruktur dunia dalam mekanisme yang berlaku saat ini.

3.2 Perspektif dari Negara-Negara Berkembang

Pasar dan negara-negara berkembang awalnya seolah tidak terpengaruh oleh kekacauan yang dimunculkan dari AS. Keterlambatan permintaan impor dari AS dan Eropa, peningkatan tajam harga komoditi dan energi (beberapa di antaranya didorong oleh pendapatan spekulatif dari runtuhnya pasar kredit dan kepemilikan rumah AS) dan

simpanan yang telah diakumulasi oleh pasar yang tengah tumbuh dan negara-negara berkembang dalam beberapa tahun ini telah menyebabkan tertahannya efek yang sebenarnya secara sementara. Namun “kekebalan” ini tidak bertahan lama. Dalam waktu singkat, negara dengan strategi pertumbuhan yang berorientasi ekspor dan telah meliberalisasi modalnya mengalami dampak buruk akibat pengurangan permintaan agregat dari negara tujuan ekspor mereka.

Mereka juga terkena pengaruh dari peningkatan mendadak suku bunga dalam jumlah tinggi setelah terjadinya ledakan dalam sistem keuangan AS di bulan September 2008. Perekonomian di negara-negara ini menderita kerugian dari krisis ekonomi mereka sendiri (terlihat dari penurunan ekspor, harga komoditas, dan permintaan domestik), tetapi hal ini bukan merupakan kesalahan mereka. Kenaikan harga yang sama yang berkontribusi pada “kekebalan” sementara juga memberikan dampak buruk, yaitu: meningkatnya harga bahan pangan seperti jagung, beras, biji-bijian menyebabkan kejatuhan mendadak dan dalam jumlah yang besar pada tingkat pendapatan riil dan standar hidup, yang tidak diperbaiki oleh penurunan harga selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat pengangguran. Pasar dan negara-negara berkembang saat ini mengalami dampak buruk dari lingkaran setan yang sama yang tengah mempengaruhi negara maju: perekonomian yang melemah berinteraksi dengan kelemahan pada sistem keuangan. Inflasi hutang global saat ini tengah berjalan.

3.3 Implikasi Politik pada Pembangunan

Implikasi politik pada pasar yang tengah tumbuh dan negara-negara berkembang sama pentingnya seperti implikasi ekonomi. Krisis yang terjadi hari ini berasal dari AS, negara yang hingga saat ini merupakan salah satu peletak

dasar deregulasi pasar finansial. Krisis membawa dampak dari luar bagi negara berkembang (negara yang juga telah menerapkan deregulasi dari luar). Oleh karena itu, kebalikan dari krisis finansial Asia, gagasan untuk pembentukan institusi keuangan internasional yang baru dan berbeda amatlah kuat. Dunia telah mencatat keburukan dari model investasi perbankan AS, serta sistemnya yang secara sederhana mengandalkan daya koreksi pasar uang. Tidaklah mengherankan jika banyak pasar dan negara berkembang mendorong pertemuan "Bretton Woods II" untuk membentuk sistem keuangan dan perbankan internasional yang baru dan lebih global.

4.1 Tingkat Reformasi Pasar Finansial

Apa yang salah secara ekonomi?

- Regulasi perbankan yang disosialisasikan oleh Komite Basel untuk Regulasi Perbankan, dengan titik berat pada persyaratan modal minimum, pengawasan yang ringan, dan disiplin pasar, bersifat pro-siklikal: investor didorong untuk menanamkan modal lebih banyak dan lebih beresiko pada saat putaran bisnis sedang baik, dan memotong investasi mereka selama periode buruk; meningkatkan, bukannya mengurangi instabilitas pasar uang dan dasar perekonomian yang sesungguhnya. Regulasi yang ada saat ini juga tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sistem keuangan dan perbankan. Mereka mendorong praktek arbitrase pengaturan serta memperbolehkan bank dan institusi keuangan lainnya untuk "menyembunyikan" aktivitas mereka dari pengawas kebijakan antara lain melalui laporan keuangan di luar neraca, instrumen derivatif yang kompleks, dan pusat keuangan internasional (*Off-shore Financial Centers* atau OFC)

- Secara umum, upaya pengamanan, derivasi kredit, dan perubahan dari sistem keuangan yang mulanya terpusat pada bank menjadi terpusat pada pasar, telah secara jelas memiliki peranan dalam krisis ini. Tetapi gejolak krisis keuangan, muncul pada bank-bank besar dan lembaga-lembaga investasi; atau lebih tepatnya pada pasar uang jangka pendek di mana institusi yang berada pada pusat perekonomian global meningkatkan pendapatan jangka pendek yang dipergunakan untuk membiayai investasi jangka panjang. Masalahnya terletak bukan pada dukungan aset yang mengisi neraca, tapi pada liabilitas; dan karena mereka lebih mepedulikan ketidakmampuan mereka untuk memperpanjang hutang jangka pendek ketimbang tingkat resiko investasi mereka.
- Pengaturan yang ada saat ini hanya berperan sedikit dalam mengontrol pengaruh leverage dan pengambilan resiko yang berlebihan. Sebaliknya, bank dan institusi keuangan lainnya telah dihibau untuk menggunakan penanganan dan manajemen resiko internal mereka sendiri untuk mengontrol tingkat resiko yang berlandaskan pada asumsi yang salah, yaitu bahwa harga pasar memperkirakan resiko secara tepat, dan sebagai dampaknya, privatisasi manajemen dan pengontrolan resiko pasar agregat menjadi mungkin. Stabilitas finansial merupakan barang publik yang tidak disediakan oleh pasar uang.

4.2 Revisi Tiga Pilar Basel II

Reformasi haruslah menyentuh seluruh tiga pilar dari regulasi Komite Basel dan tidak hanya terfokus pada pilar pertama. Ketiga pilar tersebut adalah: persyaratan tentang modal minimum, penilaian terhadap kelayakan modal, dan disiplin pasar. Dalam kerangka

Basel II, titik berat difokuskan pada persyaratan modal yang tergantung pada sistem manajemen resiko internal yang dimiliki oleh bank tersebut, diikuti oleh pembukaan dan disiplin pasar. Selain itu juga, otoritas dalam Basel II tidak lagi memfokuskan pada aktivitas tradisional pembuat aturan (*regulator*) dan pengawas (*supervisor*), yang menjalankan peraturan yang ditentukan dari luar, dan yang seringkali tidak berdasarkan pada pasar. Persyaratan untuk tersedianya delapan persen modal merupakan rasio modal minimum. Pengawas suatu bank dapat meminta bank tersebut mempertahankan rasio modal yang lebih tinggi. Tetapi atas dasar disiplin pasar, otoritas tidak perlu menerapkan persyaratan bahwa setiap bank harus memiliki rasio modal yang lebih tinggi. Karena rasio modal sebuah bank haruslah terbuka untuk umum, maka rasio modal berfungsi sebagai cara yang mudah dan cepat untuk mengukur performa bank tersebut. Bank dengan rasio modal yang tinggi lebih memiliki akses terhadap modal dan kredit. Sebaliknya, bank dengan rasio modal yang rendah "dihukum" oleh pasar.

Hal ini dapat dipahami apabila dilakukan dengan tujuan untuk mengatur satu bank saja; tetapi dampaknya menjadi berbeda dalam pelaksanaannya dan secara keseluruhan: paket kebijakan ini lebih mengutamakan siklus bisnis. Mudah untuk melihat alasannya. Permasalahannya tidak sesederhana asumsi bahwa modal bank umumnya meningkat selama pertumbuhan dan menurun selama krisis. Yang menjadi masalah adalah persyaratan modal memiliki bobot resiko. Bobot resiko adalah penghitungan fungsi harga pada saat ini atau baru-baru ini, dan secara alamiah bersifat kontrasiklikal: penanganan resiko akan menurun selama pertumbuhan dan meningkat selama kebangkrutan. Lalu ada pula masalah mengenai dampak Basel II pada variasi pilihan

investor: jika tiap investor menggunakan sistem penanganan dan manajemen risiko yang sama, maka kurangnya ketidaksepakatan antar investor akan menyebabkan perdagangan risiko menjadi tidak mungkin. Disiplin pasar yang didorong oleh sistem ini akan menjadi fleksibel selama pertumbuhan namun sangat kaku di masa-masa krisis. Bank dengan kinerja yang baik, yaitu dengan modal yang tinggi dan investasi menguntungkan seperti yang kurang beresiko, akan diberikan makin banyak modal untuk dihabiskan. Sebaliknya, bank yang bermasalah, dengan modal yang semakin menurun serta investasi yang beresiko dan mengalami kerugian; akan mengalami 'paceklik modal'. Jika setiap bank bertindak dengan cara yang sama maka efeknya adalah pertama, ekspansif; dan kemudian berkontraksi pada tingkatan yang ekstrem. Setiap pihak akan meningkatkan ataupun memperlambat pinjamannya pada saat yang bersamaan. Sebuah bank dengan rasio kapital yang diketahui meningkat atau jatuh paling cepat, akan sangat diuntungkan atau paling dirugikan. Langkah-langkah 'penyediaan' juga harus dipandang sebagai alat kebijakan kontrasiklikal.

Dua reformasi kontrasiklikal penting harus diperkenalkan untuk mengganti ataupun melawan pro-siklikalitas persyaratan modal yang ada saat ini. Persyaratan modal tersebut dapat diubah menjadi kontrasiklikal. Bank harus menambah simpanan cadangan kerugian hutang ketika membuat hutang. Persyaratan margin harus digunakan secara proaktif. Tujuan dari penanganan ini dan sejenisnya adalah untuk mencegah kebangkrutan melalui pencegahan pertumbuhan yang tidak terkendali.

4.3 Menciptakan Regulasi yang Menyeluruh

Peraturan yang baru haruslah komprehensif, meliputi segala aktivitas, instrumen, pasar, dan institusi, termasuk

laporan keuangan di luar neraca, dana investasi seperti *hedge funds*, pusat keuangan internasional, dan negara yang menerapkan pajak ringan bahkan bebas pajak (*tax havens*). Jika tidak, suatu "sistem finansial bayangan" akan membuat pencegahan leverage yang berlebihan dan arbitrase pengaturan yang berkontribusi pada krisis saat ini menjadi tidak mungkin. Setiap jenis kegiatan perbankan dan finansial perlu diawasi, baik pengamanan derivatif dan pengamanan dasar yang tengah dinilai kembali, dana investasi seperti *exchange-traded funds* (ETF), serta pengamanan di luar pasar bursa efek yang harus dikontrol. Perusahaan perdagangan, asuransi, serta dana pensiun dan dana bersama juga harus dilihat kembali. Untuk mengembangkan dan mengimplementasikan reformasi regulasi yang diperlukan, otoritas keuangan dunia atau regulator global untuk melengkapi IMF paska-reformasi akan dikonstruksi ulang sebagai bank sentral dari seluruh bank sentral yang ada. Singkatnya, ranah pengatur kebijakan harus sama seperti ranah pasar.

4.4 Mengadopsi Penanganan Likuiditas

Terdapat kelemahan serius yang ada pada pasar uang jangka pendek, di mana institusi keuangan dan non-finansial mencari dana untuk membiayai investasi dan kegiatan jangka panjang lainnya. Setiap jenis institusi, pasar, dan sistem finansial telah merasakan dampak negatif dari krisis, namun pasar yang terpengaruh paling parah berada pada inti perekonomian internasional: yaitu pasar antar-bank. Bank sentral di manapun juga telah mengambil langkah penanganan untuk membuat istilah 'pasar antar-bank' kembali cair, meskipun sejauh ini tanpa hasil. Alasan kegagalan ini tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan jelas, dan juga tidak terlihat alasan mengapa pasar antar-bank menderita dampak yang paling

negatif. Oleh karenanya, pasar uang jangka pendek membutuhkan reformasi secepatnya.

4.5 Mengurangi Risiko Pasar

Pasar finansial tidak memproses informasi secara baik ataupun efisien. Apakah ini terjadi karena persoalan asimetri informasi yang penting bagi Stiglitz, atau disebabkan oleh apa yang disebut oleh kelompok pengusung gagasan Keynesian dan paska-Keynesian sebagai "ketidakpastian radikal", yang jelas bank dan pasar finansial tidak mengalokasikan modal secara efisien, dan premi risiko yang ditentukan oleh pasar tidak atau hanya sedikit menyediakan informasi tentang risiko intinya. Jika bank dan pasar finansial tidak dapat membuat investasi jangka panjang yang efisien ataupun mengelola risiko secara efektif dengan perlengkapan internal mereka, maka diperlukan regulasi yang lebih efektif, terlepas dari dampaknya yang mungkin dapat mencegah dan mengurangi krisis di masa mendatang.

Terdapat kelemahan mendasar pada cara sistem yang ada saat ini mengelola risiko, harga pasar, dan khususnya, risiko kreditnya. Upaya untuk mengelola risiko kredit antara lain melalui derivasi kredit, yaitu dengan menciptakan pasar bagi risiko kredit, bukan untuk kredit. Yang harus diperhatikan adalah dukungan dari otoritas untuk perubahan rezim modal Basel I ke Basel II, dan hubungan antara evolusi rezim modal bank pembayaran hutang internasional (BIS) dan persoalan yang dihadapi saat ini.

Melalui Basel II, bank dapat menggunakan sistem internal bagi penanganan dan pengelolaan risiko untuk menentukan sendiri persyaratan kapital mereka, tidak hanya untuk risiko harga dari operasi perdagangan mereka (ini bukan merupakan hal yang baru), tapi juga dan yang lebih penting, untuk risiko mitra pengimbang (*counter-party*) atau risiko kredit secara umum. Menggunakan derivasi kredit untuk

membentuk, merestrukturisasi, atau untuk mengelola resiko kredit dalam bentuk *credit exposure* merupakan tanggapan rasional sektor privat. Bank telah membuat investasi yang diperlukan dalam teknologi perdagangan dan informasi mereka untuk mengelola resiko harga, sehingga mudah bagi mereka untuk menggunakan teknologi yang sama untuk membentuk dan memperdagangkan penukaran kredit jatuh tempo, penjaminan obligasi hutang, dan surat berharga yang dibiayai aset. Inilah yang ditekankan oleh penggagas perubahan menjadi Basel II, dan inilah yang dilakukan oleh bank.

Hal terakhir yang diperlukan adalah "Basel II yang memiliki perasaan", dengan kata lain rezim modal yang bertingkat, tetapi sistem internal bank untuk penghitungan resiko tetap memainkan peran di dalamnya. Masalahnya lebih rumit daripada sekadar saran penanganan internal untuk menciptakan kebijakan yang memungkinkan bank untuk menentukan resiko modal mereka sendiri. Regulasi yang efektif bersifat intrusif: ia akan memaksakan pengaturan perusahaan melalui regulasi supaya tindakan yang dilakukannya akan berbeda dengan reaksi normal, semata-mata untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat dan meminimalkan kerugian yang dialami. Stabilitas merupakan barang publik, di mana resiko sistemik merupakan eksternalitas. Sebagaimana resiko sistemik tidak dapat diukur berdasarkan penilaian resiko bank yang bersangkutan, barang publik bukan merupakan produk yang lazim dihasilkan oleh pasar. Perbankan makroekonomi dan stabilitas pasar finansial merupakan sesuatu yang ditegakkan oleh regulator.

Fakta bahwa pasar finansial yang tidak terregulasi dan menderita dampak dari persoalan informasi menimbulkan beberapa implikasi tambahan.

- Untuk meningkatkan transparansi pasar, perdagangan di luar pasar bursa atas produksi turunan ataupun

terstruktur harus dihentikan, dengan kata lain memindahkan segala fungsi yang dimiliki oleh turunan atau produk tersebut ke pertukaran (*exchanges*). Sebagai tambahan, lembaga khusus seperti SPV dan mekanisme legal lainnya yang memperbolehkan bank dan institusi finansial lainnya untuk melanjutkan transaksi tersebut di luar pencatatan seharusnya dihapuskan.

- Langkah-langkah yang sama harus dilakukan untuk mengakhiri perdagangan oleh 'orang dalam' dan konflik kepentingan. Insentif, proteksi internal seperti *firewalls*, dan tata kelola perusahaan harus direformasi.
- Untuk mencegah krisis finansial di masa mendatang dan kesalahan alokasi modal yang terjadi selama berlangsungnya "mania", otoritas moneter harus memperhitungkan inflasi dan deflasi harga aset dan bukan hanya inflasi dan deflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam implementasi kebijakannya, termasuk kebijakan regulasi. Terdapat suatu hal yang mengkhawatirkan bila melihat perilaku Bank Sentral di masa lalu: komitmen yang luar biasa untuk menjaga inflasi IHK tetap rendah, bersama dengan keengganan yang jelas untuk memeriksa inflasi aset, telah menghasilkan periode yang memiliki kombinasi antara pendapatan yang rendah, pertumbuhan yang lambat, dan instabilitas finansial yang terus menerus.

Dengan berasumsi bahwa sistem keuangan tidak dapat direformasi sepenuhnya, langkah-langkah harus diambil untuk menempatkan pengamanan di sekeliling sistem institusi finansial dan perbankan inti. Tujuannya adalah untuk melindungi inti tersebut dari sektor lain dalam sistem finansial yang tidak terlalu diatur dengan regulasi, di mana masalah informasi bisa berlangsung terus. Permasalahannya

adalah upaya untuk mengendalikan *leveraging*—mobilisasi sistem moneter untuk tujuan spekulatif—juga disertai dengan upaya untuk mencegah uang yang telah mengalami *leveraging* terpuruk selama krisis finansial dan berimbas pada basis moneternya, tentunya dengan dampak negatif yang tidak terhindarkan karena uang dipakai sebagai alat pembayaran. Regulasi yang kuat, didukung dengan pinjaman dari tempat terakhir untuk mendapatkan pinjaman (*lender of last resort* atau LOLR) yang berlimpah ketika diperlukan, jelas merupakan bagian dari solusi jangka panjang.

4.6 Mengadopsi Paket Stimulus Keuangan

Stimulus fiskal sangat diperlukan untuk menumbuhkan kembali dasar ekonomi riil karena kebijakan moneter jelas-jelas terjebak dalam kondisi yang bahkan disebut oleh Keynes sebagai "jebakan likuiditas". Ekspansi fiskal yang raksasa, cepat, dan terkoordinasi secara internasional dibutuhkan untuk merangsang permintaan dunia dalam waktu singkat. Tindakan ini dapat, dan mungkin seharusnya juga dibarengi dengan proses daur ulang dan pengalihan simpanan eksternal Cina, Jepang, dan negara lainnya dalam jumlah yang besar—kemungkinan melalui jaringan bank pembangunan regional ke pasar dan negara berkembang yang tengah membutuhkan pendanaan tambahan. Tetapi pembuat kebijakan harus berhati-hati karena hal ini melibatkan penjualan obligasi pemerintah AS dan dapat memicu kenaikan tingkat suku bunga dan turunnya nilai dollar.

5.1 Tujuan dan Cara: Ekonomi Politik Reformasi

Sistem finansial dari perekonomian yang berbasis pasar memiliki empat fungsi.

- Sistem itu harus memobilisasi dana tak bergerak yang mungkin disimpan untuk tujuan investasi pasar modal,

yaitu untuk mengubah simpanan perusahaan menjadi investasi.

- Pada perekonomian seperti AS, Inggris, dan negara maju lain, di mana pembangunan perumahan dibiayai oleh kredit kepemilikan rumah dan pengeluaran konsumen dibiayai oleh kartu kredit dan kredit kepemilikan rumah sekunder, sistem juga harus membiayai konsumsi.
- Tujuan ketiga, yang menjadi perhatian khusus dari pasar dan negara berkembang, adalah untuk membiayai perdagangan internasional, dan karenanya membiayai pembangunan.
- Akhirnya, sistem finansial harus memperbolehkan dan mendorong terjadinya investasi jangka panjang, terutama di bidang infrastruktur.

Oleh karena itu sistem perbankan dan finansial, dan sistem pembayaran yang ada di dalamnya, merupakan cara untuk mencapai tujuan; bukan tujuan itu sendiri. Berdasarkan standar ini, sistem keuangan internasional, sebagaimana wujudnya saat ini, merupakan sebuah kegagalan. Pasar finansial saat ini yang tidak teregulasi atau hanya diatur secara minimal tidak dapat diharapkan untuk: mengubah laba ditahan menjadi investasi efisien, membiayai pengeluaran konsumsi, membangun perumahan yang layak, membiayai pembangunan, atau mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk restrukturisasi berbagai infrastruktur nasional yang ada di seluruh dunia untuk menghadapi pemanasan global dan hambatan lingkungan hidup lainnya.

Masalahnya, sistem perbankan dan keuangan internasional bukanlah sekadar mekanisme alokasi barang dan jasa. Hubungan ekonomi adalah merupakan hubungan sosial, dan sistem finansial internasional—sayangnya jauh dari kompetisi yang adil dan seimbang—pada dasarnya merupakan sistem yang berhierarki di mana beberapa sistem finansial nasional lebih dominan daripada sistem lainnya dalam

konteks geografis tertentu, yang juga mencerminkan dinamika politik. Dari perspektif ini, krisis finansial mengubah nilai dalam bentuk suku bunga, dividen, dan pembayaran lainnya, dari satu kawasan ke kawasan lain.

Menurut perspektif ini, krisis finansial memiliki fungsi untuk mendisiplinkan, khususnya dengan melihat bagaimana krisis finansial diselesaikan pada masa sebelumnya, dengan pembagian fungsi kerja antara bank sentral G10 yang mengurangi tingkat suku bunga dan IMF yang dengan tegas memastikan agar instabilitas—di mana pun ia mungkin muncul untuk pertama kali—tetap berada di dalam atau dipindahkan ke sistem finansial lain yang lebih lemah, dan karenanya akan semakin memperlemah mereka. Prosiklikalitas permintaan modal harus dilihat dengan cara yang sama. Di sini, aturannya bersifat global.

Terdapat juga faktor lain yang menjadi pertimbangan. Hubungan finansial selalu merupakan hubungan kreditor-debitor di mana, sebagai pengganti uang untuk saat ini, di masa yang akan datang debitor mentransfer lebih banyak uang untuk kreditor. Karena debitor harus membayar pada kreditor, bahkan apabila investasi yang dibiayai dengan uang pinjaman tidak menghasilkan keuangan, debitor tetap merupakan pihak subordinat dalam hubungan tersebut, meskipun debitor pun sebenarnya juga merupakan investor. Debitor yang pinjamannya digunakan untuk membiayai konsumsi akan jatuh lebih dalam lagi dalam hutang.

5.2 Apa yang Dipertaruhkan

Ketiga fakta tersebut—hierarki internasional dari sistem perbankan internasional, krisis finansial sebagai mekanisme pengatur, dan hubungan kreditor-debitor yang ada di seluruh sistem—menentukan apa yang dipertaruhkan dalam perdebatan mengenai karakter 'arsitektur keuangan

internasional yang baru'. Alokasi dari sumberdaya yang beresiko ini tergantung pada perubahan kapasitas organisasi dari negara dan institusi antar-negara. Alokasi baru ini juga tidak dapat ditentukan hanya atas dasar pertimbangan pasar, karena instabilitas dan ketidakadilan merupakan karakter alami dari pasar bebas yang tidak diatur. Dengan melihat pada keterkaitan antara hak dan kewarganegaraan, dan juga antara hak asasi manusia dan negara; prinsip yang harus memandu sistem pengaturan alokasi sumber daya global yang baru haruslah jelas: adanya kedaulatan nasional di dalam sistem kesetaraan internasional. Posisi subordinat pasar dan negara-negara berkembang dalam sistem finansial internasional harus diakhiri.

6.1 Menuju Demokrasi Sosial Global

Kesepakatan antara para pengusung gagasan reformasi tentang karakter krisis ekonomi saat ini dan posisi pasar dan negara berkembang di dalamnya—yang menyetujui bahwa reformasi apapun haruslah kontrasiklikal dan kuat; bahwa pasar cenderung rawan terhadap kegagalan pasar; bahwa prinsip kesetaraan nasional haruslah membentuk rezim pengaturan yang baru; bahwa langkah penanganan harus diambil untuk menciptakan permintaan agregat—tidak menggambarkan perse-tujuan mengenai apakah 'Bretton Woods Baru' itu sendiri atau tindakan apa yang harus dilakukan. Dua posisi dapat dibedakan di sini. Pertama, ada pihak yang percaya bahwa kesulitan informasi yang menjadi masalah pasar finansial dapat diselesaikan dengan perbaikan transparansi pasar, mereka lebih mempedulikan stabilitas daripada kesetaraan, dan percaya bahwa perubahan yang diperlukan hanya minimal. Di sisi lainnya, mereka yang tidak mempercayai pasar finansial yang tidak teregulasi atau hanya diatur secara minimal dan menganggap pengaturan

yang ada saat ini telah membawa pada konsekuensi ekonomi dan sosial yang serius dan negatif; melihat perlunya perubahan struktural sebagai hal yang utama.

Untuk kelompok pertama, peraturan yang disosialisasikan oleh regulator pasar internasional yang baru di satu sisi haruslah ringan, terbatas dan difokuskan pada hal-hal menyangkut stabilitas perekonomian makro, sementara di sisi lain memberikan kesempatan pada pasar untuk memainkan peranan besar dalam alokasi simpanan global dan pembiayaan pembangunan. Untuk kelompok kedua, regulasi yang baru haruslah intrusif dan secara aktif mempromosikan pembangunan pasar dan negara berkembang, dan di saat yang sama mencari langkah inovatif untuk mengatur produk pasar menuju distribusi barang sosial yang lebih setara dan adil. Kelompok pertama lebih mementingkan hubungan pasar; kelompok kedua lebih memilih dekomodifikasi. Selain itu, penting juga untuk mengingat bahwa ketidaksepakatan ini terjadi dalam konteks mendasar yang sama-sama menyepakati perlunya reformasi dalam perekonomian internasional dan posisi pasar dan negara berkembang di dalamnya, serta juga mengenai tingkat kecepatan dan ruang lingkup reformasi yang diperlukan.

6.2 Program Minimal

Apakah kemudian yang menjadi seperangkat prinsip minimal yang setidaknya harus menunjukkan arah proses reformasi? Terdapat tiga hal yang dapat ditawarkan.

- Solusi apapun haruslah menempatkan biaya sosial yang ditimbulkan oleh krisis sebagai titik awal, karena hal ini secara tidak proporsional telah mempengaruhi negara berkembang, sebagaimana umumnya kelompok pekerja dan ekonomi lemah. Sistem keuangan dan perbankan global yang dapat diterapkan dan bersifat stabil

merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri, di mana tujuan yang lebih dipentingkan adalah keadilan sosial. Prestasi sebuah sistem perekonomian dan perbankan tidak boleh dinilai hanya berdasarkan tingkat stabilitas yang dipromosikan atau dalam hal pertumbuhan, inovasi, dan investasi yang dipromosikan. Pengaturan sistemik juga harus dinilai berdasarkan seberapa efektif ia mempromosikan keadilan sosial.

- Untuk alasan ini, perwakilan institusi global—bukan kelompok ad hoc tanpa legitimasi demokratis—harus berada di tengah upaya reformasi. IMF, BIS, dan badan-badan lainnya dapat memiliki peran di dalam sistem yang baru, tetapi usulan yang tidak atau kurang memiliki legitimasi demokratik tidak akan diterima. Terdapat hubungan antara ketidakadilan dan instabilitas sistem keuangan internasional yang tengah berkecamuk dengan ketidakmampuannya saat ini untuk mempromosikan stabilitas dan pertumbuhan. Reformasi yang diperlukan untuk menstabilkan perekonomian internasional—dan untuk menyatukannya kembali—harus mendengarkan dan memperhitungkan suara-suara dari pasar dan negara berkembang.
- Akhirnya, reformasi ini harus menciptakan perimbangan baru antara aspek ekonomi dan politik, perimbangan yang lebih menguntungkan negara demokratis ketimbang pasar finansial; mengutamakan minat masyarakat di atas keuntungan privat, dan memilih pemerintah akuntabel daripada spekulasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tentang Penulis:

Christopher Rude adalah seorang ahli ekonomi politik dan pengamat pasar finansial. Ia bekerja pada Federal Reserve Bank of New York selama bertahun-tahun dan di Wall Street. Dengan latar belakang gelar Doktoral pada the New School for Social Research, dia mengajar di almamaternya. Penulis berterimakasih kepada Werner Puschra, Stephany Griffith-Jones dan Sara Burke untuk dukungan dan masukan-masuk berharga untuk proyek ini.

Informasi lebih lanjut tersedia pada: www.fes-globalization.org

Pandangan yang disampaikan oleh penulis adalah merupakan pendapat pribadi, dan tidak mengatasnamakan pandangan resmi Friedrich-Ebert-Stiftung dan organisasi di mana penulis bekerja.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Hiroshimastrasse 17
10785 Berlin
Jerman
Tel.: ++49-30-26 935 914
Fax.: ++49-30-26 935 959
Roswitha.Kiewitt@fes.de
www.fes.de/globalization

Friedrich-Ebert-Stiftung
New York Office
747 Third Avenue, Suite 22B
New York, N.Y. 10017
Tel.: ++1-212-687-0208
Fax.: ++1-212-687-0261
http://www.fesglobalization.org/new_york/



REORIENTASI PARADIGMA EKONOMI

IVAN A HADAR*)

Bagi Indonesia, gejala ekonomi global menyusul bangkrutnya beberapa perusahaan keuangan besar di AS, setidaknya berdampak terhadap nilai tukar, bursa saham dan suku bunga. Lebih dari itu, krisis finansial yang belum tuntas di AS itu, dilansir akan memicu *capital outflow* yang semakin besar sehingga bursa saham dan valuta akan semakin anjlok. Koreksi tersebut, dicemaskan akan semakin besar akibat anjloknya harga komoditas seperti CPO, batu bara dan lainnya. Pilihan kebijakan pemerintah yang hanya menaikkan bunga tinggi dan melakukan intervensi kurs rupiah, dikhawatirkan hanya akan menguras devisa.

Meski, konon, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat, namun pemerintah seharusnya segera mengambil langkah penyelamatan terhadap semua sektor penggerak ekonomi, untuk meredam tekanan pasar keuangan. Karena, pertumbuhan ekonomi saat ini, lebih bertumpu pada sektor keuangan terutama perbankan dan pasar modal. Pemerintah, terlalu lama membiarkan devisa terpendam di BI dan lebih mengutamakan intervensi rupiah agar dapat mengendalikan inflasi. Padahal, inflasi akibat pelemahan

ekonomi global tidak perlu dicemaskan, jika sektor riil, khususnya industri dan infrastruktur bisa bergerak atau bertumbuh.

Seharusnya, kebijakan yang diambil agar mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Hal ini terkait dengan adanya fenomena negatif yang melanda perekonomian dunia. Dengan kebijakan itu, kepercayaan pasar pun turut terbangun sehingga pelaku usaha maupun investor, mau berusaha kembali di Indonesia.

Pernyataan tentang kuatnya fundamental ekonomi kita, pernah dilontarkan ketika tanda-tanda krisis moneter mulai melanda Asia pada 1997. Kenyataannya, cerita sukses makro ekonomi pemerintahan Orde Baru seakan bubble yang dalam sekejap meletup meninggalkan krisis berkepanjangan yang dampaknya masih terasa hingga kini.

Globalisasi pasar uang, telah menjadi pendorong sistem kapitalisme global. Pada sisi lainnya, ekonomi riil menjadi semakin tidak berarti. Pergeseran dari perdagangan ke pasar uang, sangat jelas terlihat dalam kenyataan bahwa transaksi di pasar devisa global sejak pertengahan

90an, misalnya, berjumlah rata-rata di atas 1.5 triliun dollar AS per hari dengan kecenderungan terus menanjak. Jumlah ini, sama dengan total perdagangan barang dan jasa selama tiga bulan (Hirst/Thompson, *Globalisation in Question*, 2004) Sejak 1991, UNCTAD telah memperingatkan dampak "dominasi uang atas industri". Salah satunya, perusahaan yang (semakin) didominasi oleh aktor keuangan, lebih menekankan upaya keuntungan jangka pendek dan peningkatan dividen, ketimbang pertumbuhan jangka panjang lewat investasi dalam penelitian dan pengembangan.

Arus dana spekulatif ke negara berkembang, termasuk ke Indonesia, lebih didorong oleh aspek "penawaran", bukan "permintaan", termasuk penawaran tingkat suku bunga yang tinggi. Berkat *oil boom* tahun 70an dan mundurnya AS dari Perang Vietnam, terjadi penumpukan dana di bank-bank negara industri yang mencari lahan untuk investasi. Kondisi ekonomi riil yang memburuk di negara-negara berkembang, tidak menjadi penghalang bagi aliran dana dari utara ini. Negara-negara yang tadinya bangkrut terjebak beban utang luar negeri, tiba-tiba

REORIENTASI PARADIGMA EKONOMI



dianggap sebagai "*big emerging markets*".

Hingga kini, kita masih saja mengikuti anjuran IMF pra Krisis Asia, yaitu liberalisasi pasar uang, mempertahankan suku bunga lebih tinggi dibandingkan negara industri, serta mengaitkan mata uang dengan dollar AS untuk menyakinkan investor asing atas keamanan investasinya dari krisis moneter. Perbedaan tingkat suku bunga yang tinggi memang menyebabkan mengalirnya dana dari negara maju. Tingkat pertumbuhan pun melejit, begitu pula inflasi dan defisit perdagangan luar negeri.

Awalnya, sistem ini kelihatannya berfungsi baik. Dalam waktu tiga tahun hingga Krisis 1997, investasi portfolio berjumlah 24 dollar AS ditambah sekitar 50 milyar dollar AS dalam bentuk kredit. Arus dana ke Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand dan Korea, ketika itu, meningkat drastis dari 379 milyar (1994) menjadi 97.1 milyar dollar AS (1996).

Masalahnya, dana yang masuk bersifat spekulatif sekedar mencari keuntungan cepat dan besar. Karena itu, dana tersebut tidak mengalir ke sektor produktif atau pertanian, tetapi ke bursa saham, kredit konsumtif dan

spekulasi properti. Tak heran bahwa pada masa-masa boom, harga lahan di beberapa kawasan emas Jakarta, lebih mahal dibandingkan beberapa pusat kota Eropa. Sudah sejak 1996, terlihat simptom krisis: stagnasi di sektor properti dan menurunnya ekspor, sementara defisit perdagangan luar negeri semakin meningkat. Investor asing, mulai mencemaskan kemampuan membayar negara pengutang.

Pada 1997, kecemasan menjadi kepanikan yang berujung pada penarikan dana secara liar, adalah kegiatan spekulatif para *Hedge Funds*. Di Thailand, dalam satu hari (10 Mei 1997) terjadi penukaran uang sebesar 10 milyar dollar AS (Khantong, *The Currency War is the information War*, 1998).

Krisis moneter yang selalu berulang memunculkan berbagai usulan reformasi sistem keuangan global. Ada usulan untuk kembali ke "*Bretton Woods System*". Aliran ini, menginginkan kontrol yang lebih ketat atas arus dana global untuk menghindari dampak destabilisasi aliran dana. Sistem yang berlaku di Malaysia, seringkali menjadi contoh, di mana investor portfolio diharuskan menaruh deposito di Bank Sentral sebagai jaminan.

Kontrol secara nasional, dianggap lebih berpeluang sukses ketimbang kontrol global. Keberhasilan China dan India menghindari krisis moneter, diajukan sebagai bukti. Dengan kelompok Keynesian, terdapat kesamaan visi, bahwa sebuah *Asian Currency Funds* diperlukan dan sangat mungkin untuk dilakukan. Tetapi, terdapat perbedaan mendasar dengan aliran Keynesian, yaitu kritik terhadap proses globalisasi. Bagi kelompok kedua, penyebab utama krisis bukanlah *capital volatility*, melainkan kesalahan pandang bahwa ekspor dan investasi asing adalah motor pembangunan ekonomi. Bahwa ketika itu, Thailand, Meksiko, Argentina dan Indonesia yang paling setia mengikuti paradigma *outward oriented development* ini, kemudian mengalami "gempa moneter", adalah sebuah konsekuensi logis kesalahan paradigma. Seharusnya, solusi dicari dalam bentuk kerangka pertumbuhan berorientasi ke dalam negeri lewat penguatan sektor riil.

*) Ivan A. Hadar, Koordinator Nasional Target MDGs (Bappenas/UNDP); Wakil Pemred Jurnal Sosdem



Krisis Keuangan Global :

Cina Andalkan Ekonomi Domestik untuk Hadapi Krisis Keuangan Global

Rudof Traub-Merz

Peking mulai gelisah semenjak kondisi ekonomi negara-negara maju memburuk secara drastis dan semua pasar jual produk Cina secara bersamaan dilanda resesi. Tahun lalu ekspor masih mencapai 38% dari GNP/ *Brutto social product*. Sebelumnya pengarah ekonomi Cina sempat beranggapan perekonomian negaranya tidak akan terkena dampak krisis keuangan global dan bahkan mengupayakan penurunan ekspor sebagai langkah pengamanan guna menghindari lepas kendali lonjakan ekonomi.

Ekspor menurun

Mulai Oktobor 2008 krisis penjualan semakin meluas dan ekspor menurun. Prospek ekonomi tahun 2009 dinilai suram. Pertumbuhan ekspor di 2009 menurut prediksi pertama hanya 0%.

Industri yang pertama-tama terkena imbas khususnya industri ringan padat

karya (produk plastik, pakaian, tekstil, aneka permainan dan elektronik) dan juga industri transportasi yang erat kaitannya dengan ekspor. Sejumlah pabrik konstruksi kontainer kapal sudah ditutup. Hal yang sama terjadi pada industri semen dan baja yang tahun lalu telah mencatat rekor ekspor tapi sekarang bermasalah akibat kapasitas berlebih.

Program Ekonomi Mahabesar

Beberapa hari sebelum World Summit G-20 yang membahas krisis keuangan global pemerintah Cina mengumumkan strategi ekonominya kepada publik. Pemerintah Cina berharap suntikan dana investasi 4000 Milyar RMB (586 Milyar USD) dalam dua tahun mendatang dapat memicu kembali pertumbuhan ekonomi. Volumennya sungguh menakutkan: terhitung per tahun rencana dana investasi bisa mencapai

8% BSP. Cina jelas bergerak dalam skala berbeda jika dibandingkan dengan negara lain yang pada umumnya menetapkan dana investasi sekitar 1% dari BSP saja.

Sementara ini volume target telah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemerintah pusat hanya mampu memenuhi sepertiga dari rencana investasi; proyek lainnya dialihkan untuk ditanggung oleh pemerintah daerah dan pasar ekonomi. Didalam paket juga ditemukan rencana-rencana yang telah diputuskan sebelum terjadinya krisis global.

Peluang baik implementasi

Peluang yang dihasilkan dari reaksi cepat berupa suntikan ekonomi termasuk baik. Pengalaman Peking cukup banyak sehubungan intervensi ekonomi, terbukti di tahun 1997/1998 saat Cina sukses mengatasi krisis

moneter Asia melalui penetapan program ekonomi mahabesar. Penangguhan akibat mekanisme berbelit dalam menetapkan rencana juga bukan masalah karena komisi perencanaan menyimpan banyak proyek yang pelaksanaannya bisa dipercepat.

Negara juga tidak mempermasalahakan volume dana yang akan dikerahkan. Di tahun-tahun terakhir Cina berhasil membuktikan soliditas dan daya eksekusi politik ekonominya: tahun 2007 utang negara mencapai 45% dan saat fiskal ditutup masih ada sedikit surplus.

Bank sentral secara terang-terangan menopang prestasi ekonomi negara dengan penambahan likuiditas. Sejak September *key interest rate* sudah empat kali diturunkan, dari 7,2% menjadi 5,6%. Saat mencapai batasan cadangan minimal penurunan dilakukan berhati-hati dari 18% menjadi 16% untuk bank



besar dan 14% untuk bank kecil. Di bulan-bulan berikutnya interest level juga bisa mengalami hal sama, yaitu penurunan seperti yang terjadi pada cadangan minimum.

Beberapa perusahaan Cina yang bergerak di usaha kredit properti dan investasi di pasar Amerika terdesak melakukan pengurangan. Bank of China pertengahan 2008 melaporkan kerugiannya di jaminan hipotek (*hypothekengesicherten Papiere*) dalam Fannie Mae dan Freddie Mac senilai 1,9 Milyar USD, sementara asuransi jiwa Pin An di musim gugur melaporkan kerugiannya dalam Fortis asal Belgia-Belanda senilai 2,3 Milyar USD. Memang nilai kerugian tidaklah kecil dan menyakitkan untuk pihak yang terkena imbas. Namun demikian karena *overseas trade* Cina tidak terlalu tinggi krisis finansial tidak memaksa sistem perekonomian Cina untuk mengorbankan aktor ekonomi dalam insolvensi maupun menerapkan langkah penunjang berskala besar.

Pertumbuhan 8% sebagai batas bawah perdamaian sosial

Prediksi pertumbuhan ekonomi Cina untuk tahun 2009 pada mulanya berkisar antara 6% dan 10%, 9% untuk tahun 2008, dan 12% di tahun 2007. Perkiraan waktu yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi terdahulu juga sangat tidak tentu berkisar dari dibawah satu tahun sampai 5 tahun.

Jika negara lain melihatnya sebagai ledakan ekonomi maka Cina mempunyai penilaian berbeda dari kaca mata pasar lapangan kerja. Arus urbanisasi pekerja ke kota tidak terbendung lagi. Tahun 2009 ada 6 juta tenaga kerja terdidik pencari kerja baru. Di tahun-tahun sebelumnya pasar tenaga kerja di kota bertambah 10 juta, dan untuk penambahan tenaga kerja ini pemerintah memerlukan kalkulasi sedikitnya 8% pertumbuhan ekonomi. Jika ini tidak terpenuhi maka kenaikan tingkat pengangguran akan turut membahayakan keamanan sosial. Demonstrasi pekerja semakin sering

ditemukan. Skenario yang ditakuti pemerintah: Mahasiswa dan akademisi pengangguran bersama-sama dengan penduduk kota melakukan aksi protes atas kenaikan harga bahan pokok dan dengan pekerja pabrik melakukan boikot sebagai protes atas penurunan gaji dan ancaman PHK.

AS dan Cina – Kepentingan bertolak belakang

Politik ekonomi Cina saat ini berada di titik peralihan. Surplus kapasitas selama bertahun-tahun tidak hanya menghasilkan cadangan devisa terbesar dunia senilai 1,9 trilyun USD. Namun juga telah menekan rasio cadangan di AS dan turut membiayai hutang *private household*. Utang AS pada Cina berkisar satu trilyun USD, dan bank sentral Cina menahan sekitar 585 Milyar USD (September 2008) berupa dana obligasi dan juga sekitar 376 Milyar USD di Fannie Mae dan Freddie Mac. AS dan Cina terkait sangat erat satu dengan lainnya dan tanpa mempertimbangkan kepentingan perekonomian dunia kedua negara tidak bisa bergeming. Cina berusaha mempertahankan pinjamannya, tapi untuk itu nilai tukar mata uang terhadap Dolar mesti stabil supaya bisa memastikan haluan ekspornya. Di lain pihak AS juga hanya dapat mengurangi defisit pendapatannya dengan cara meluncurkan ekspor secara *ofensif* dan untuk itu perlu kurs mata uang Cina yang kuat. Tahap akhir "Dialog ekonomi strategis" antara kedua negara tidak membuahkan hasil yang jelas: dalam kurun waktu singkat pertukaran mata uang antara USD dan RMB bisa terus berubah, dan dalam jangka waktu menengah mencerminkan interrelasi antar kedua negara di ekonomi riil. Presiden AS baru telah menyampaikan pandangannya: Cina mesti memperkuat mata uangnya dan meningkatkan impor.

Ke arah pertumbuhan domes-

tik: Membangun Negara Sosial

Konsekuensi pengarah pasar ekonomi dunia bukan hanya terhadap pertumbuhan pesat pusat ekonomi sepanjang pantai Timur, tapi juga peningkatan kuota konsumsi perorangan yang kini hanya mencapai 36%. Angka ini juga sudah mencakup kondisi ekonomi di propinsi Cina bagian tengah dan barat yang terisolasi, sektor pertaniannya belum berkembang dan tingkat konsentrasi pendapatan setaraf dengan di Brasil dan Rusia. Penurunan ekonomi ekspor untuk jangka waktu menengah hanya bisa diatasi jika konsumsi domestik ditingkatkan dan rencana investasi publik diselaraskan dengan kondisi sosial politik.

Selain peningkatan tarif upah juga banyak aktor yang sepakat dengan jalan terpenting dan paling bisa diandalkan: percepatan pencapaian negara sosial (*social state*). Tingkat konsumsi rumah tangga di Cina termasuk rendah dikarenakan oleh tingkat pendapatan yang juga rendah atau juga karena menabung untuk jaminan sosial. Pengembangan asuransi kesehatan, pensiun dan pengangguran akhirnya merupakan hal yang mutlak guna beralih dari model ekonomi berorientasi ekspor ke arah pertumbuhan ekonomi domestik yang stabil.

Rudolf Traub-Merz, Resident Direktur
Friedrich-Ebert-Stiftung Shanghai.



Krisis Keuangan : Apakah Brasil Luput dari Bahaya?

Jochen Steinhilber

Brasil tidak bisa menutupi kekuatirannya lebih lama. Harapan bahwa dampak krisis keuangan global berupa merosotnya nilai mata uang, kebangkrutan bank, kredit macet dan cadangan devisa terbatas mengenai negara-negara maju penanggung jawab utama krisis seperti London, Frankfurt dan New York ternyata tidak terpenuhi karena fenomena – fenomena itu juga menimpa negara-negara lainnya. Brasil juga terpukul akibat ditinggal pergi modal asing di bulan-bulan terakhir. Padahal Brasil selama ini adalah salah satu negara yang paling diuntungkan oleh aliran modal pasar global, dan kepanikan akibat krisis keuangan global telah memberikan pukulan lebih berat daripada negara lain.

Lihat saja, kerugian yang dialami pasar saham Brasil akibat hengkangnya modal asing. Jika di tahun-tahun terakhir Brasil sangat menikmati dukungan modal luar maka kerugian yang kini dialami tidak dapat dikompensasi dalam jangka waktu singkat. Index pasar saham di Sao Paolo terjungkal 10% dalam waktu hanya sehari, bahkan mencapai 30% dalam waktu satu bulan. Kondisi ini jauh lebih drastis dibandingkan yang dialami

Dow Jones Index – juga tanpa adanya kepastian akan waktu pemulihan. Mata uang Real juga jatuh nilainya terhadap USD sebanyak 32% dan kini nilainya sudah mencapai seperempat lebih buruk dari nilainya di bulan September.

Iklm kondusif ?

Relaksasi perlahan di pasar saham di Sao Paolo menunjukkan bahwa poin tertinggi di pasar saham Brasil sudah berhasil dilampaui. Walaupun demikian, sulit untuk dibayangkan bahwa dampak krisis keuangan ini akan berujung pada krisis mata uang maupun krisis politik dalam negeri – skenario yang paling dianggap beralasan oleh negara-negara tetangga Brasil. Keberhasilan Brasil untuk bertahan terhadap guncangan menunjukkan bahwa langkah-langkah persiapannya lebih baik dibandingkan saat menghadapi krisis-krisis perekonomian terdahulu. Negara berhasil melunasi hutangnya kepada IMF sebelum jatuh tempo, menurunkan volume hutang luar negeri dari 42% BIP (2002) menjadi 15% (2007 – sekitar 200 Milyar USD), menekan laju kenaikan nilai inflasi serta aktif merespon capital influx

dengan cara mengumpulkan 204 Milyar USD cadangan devisa. Tahun 2008 Brasil mengumumkan dirinya sebagai kreditor internasional, dan setelah “*spread*”, markup untuk risiko properti kian jatuh, baru di musim semi tahun ini akhirnya membuahkan hasil yang diharapkan: agen rating ternama memberikan Brasil “*Investmentgrade*”. Hal ini tentunya menggembirakan karena pada umumnya reputasi negara bankrut yang tahun 2002 masih bergelut dengan krisis keuangannya sangat lambat pulih. UNCTAD bahkan menetapkan Brasil kini menjadi satu dari lima lokasi favorit dunia untuk investasi.

Selain data-data basis yang baik ada juga struktur dan manajemen dari sektor keuangan Brasil yang mendukung kondisi Brasil dalam mengatasi krisis keuangan global yang baru terjadi. Kekuatiran bahwa bank utama Brasil akan terbawa arus krisis dinilai tidak perlu. Sektor perbankan dan pasar kredit di Brasil lebih banyak digerakkan oleh institusi-institusi nasional. Penguatan keuangan khususnya dilakukan melalui pasar domestik. Bank-bank Brasil hanya sedikit bergantung pada asing. Bank-bank publik dengan volume kredit

mencapai 40% berperan penting, dan hanya 30% deposito berada ditangan asing (di Meksiko mencapai 80%). Berbeda dengan Amerika Serikat, Brasil juga telah memulai secara bertahap implementasi Perjanjian-II Basell.

Walaupun jumlah cadangan devisa negaranya mencukupi namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa pemerintah akan mencairkannya. Sampai sekarang bank sentral baru menetapkan 5%, bandingkan ini dengan Rusia dan negara-negara lain yang disaat krisis siap membakar lebih banyak devisa. Sejauh mungkin bank sentral berupaya menghindari kesan adanya keinginan mengorbankan USD demi menopang Real, karena hal ini tentunya dapat melahirkan spekulasi yang merugikan mata uang Brasil. Jika ekonomi Brasil di tahun-tahun sebelumnya diuntungkan oleh penguatan mata uangnya, maka kini ia mesti menyesuaikan diri dengan nilai Real yang melemah. Ini pun bukanlah kabar buruk semata.

Bahaya Infeksi

Jauh lebih berbahaya daripada turbulensi di portfolio adalah banyaknya jalur krisis ini menular ke ekonomi riil. Sebut saja fenomena yang juga terjadi di negara-negara maju yaitu penyempitan lorong kredit, yang dalam waktu singkat akan terasa di sektor otomotif dan agrarbisnis. Dikuatirkan pula, dalam jangka waktu menengah hal ini bisa berimbas pada konjunktur domestik. Tahun 2007 pasar domestik mencapai 78% BIP, dan permintaan kian disokong perluasan pasar kredit – 2007 sekitar 33% – semakin dipacu.

Jika memperhatikan angka-angka permulaan ternyata berbeda dari yang dikuatirkan. Pergerakan pemberian kredit di bulan Oktober/ November tetap stabil – terkecuali kredit untuk pembelian mobil. Perkembangan ini tercapai berkat reaksi tanggap dan agresif pemerintah dalam menanggapi krisis dengan menetapkan langkah-langkah pengamanan. Yang dilakukan

adalah bantuan spesifik sektoral, penurunan cadangan devisa, penetapan strategi baru untuk industri ekspor dan peningkatan proteksi terhadap ketidakstabilan nilai tukar mata uang.

Serangkaian perusahaan "multi-latinas" asal Brasil dan terkenal di tingkat regional dalam aktivitas jiplakannya (*derivativ*) ternyata salah spekulasi. Dengan penguatan konstan nilai Real terhadap USD perusahaan-perusahaan ini menjanjikan keuntungan tambahan senilai keuntungan rutin catur wulan. Perusahaan-perusahaan ini bertaruh akan kelanjutan proses ini – dan ternyata mereka salah. Dibandingkan lainnya, kerugian 30 Milliar dollar yang dialami perusahaan Brasil masih kecil untuk ukuran Casino Royale. Ketidakberadaan transparansi akan nilai kerugian dan spekulasi masih tersembunyi dibalik neraca keuangan, dan telah menimbulkan kecurigaan di pasar ekonomi. Sejumlah rencana investasi telah dibubarkan dan rencana saham going public dibatalkan.

Hal ini juga terjadi mengingat tersendatnya laju modal asing. Diperkirakan di tahun berikutnya sejumlah 350 Milliar Dollar akan berkurang mengalir ke negara-negara berkembang. Brasil tetap berharap lubang terbesar terjadi di portfolio, kepercayaan terhadap pasar ekonomi tetap terjaga dan dampak terhadap investasi jangka panjang bisa dibatasi.

Sesungguhnya pasar ekonomi Brasil adalah jauh lebih beragam daripada di negara-negara amerika latin lainnya. Walaupun demikian produk-produk primer, yang di bulan-bulan terakhir mengalami penurunan harga secara drastis telah mencakup sekitar separuh ekspor Brasil. Dalam dunia resesi tidak hanya harga untuk bahan mentah namun juga permintaan akan produk jadi ikut turun – yaitu separuh lainnya dari ekspor Brasil.

Walaupun demikian ada secercah harapan untuk ekonomi Brasil: lemahnya mata uang Real juga dapat mendorong

permintaan terhadap produk dari Brasil. Demikian juga ketergantungan ekspor Brasil yang relatif rendah dibandingkan negara-negara berkembang lainnya – Ekspor/GDP adalah 15% terhadap rata-rata 40% - dapat mengurangi tekanan dampak krisis ekonomi global untuk Brasil dibawah tekanan yang dialami negara lainnya. Namun tetap saja, Brasil akan mengalami *economic slowdown*. Prediksi pertumbuhan ekonomi yang tadinya berkisar 5,3% kini hanya mencapai 2,4%.

Brasil, yang sampai akhir tahun ini mengepalai G-20 Menteri Keuangan melihat dirinya sebagai korban dari krisis. Krisis ini merupakan tanggung jawab negara-negara kaya dan pengkotbah mantra reformasi keuangan yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya sendiri. Brasil walau demikian melihat krisis ini sebagai peluang untuk mengupayakan ruang kuasa (*terrain*) di dunia internasional.

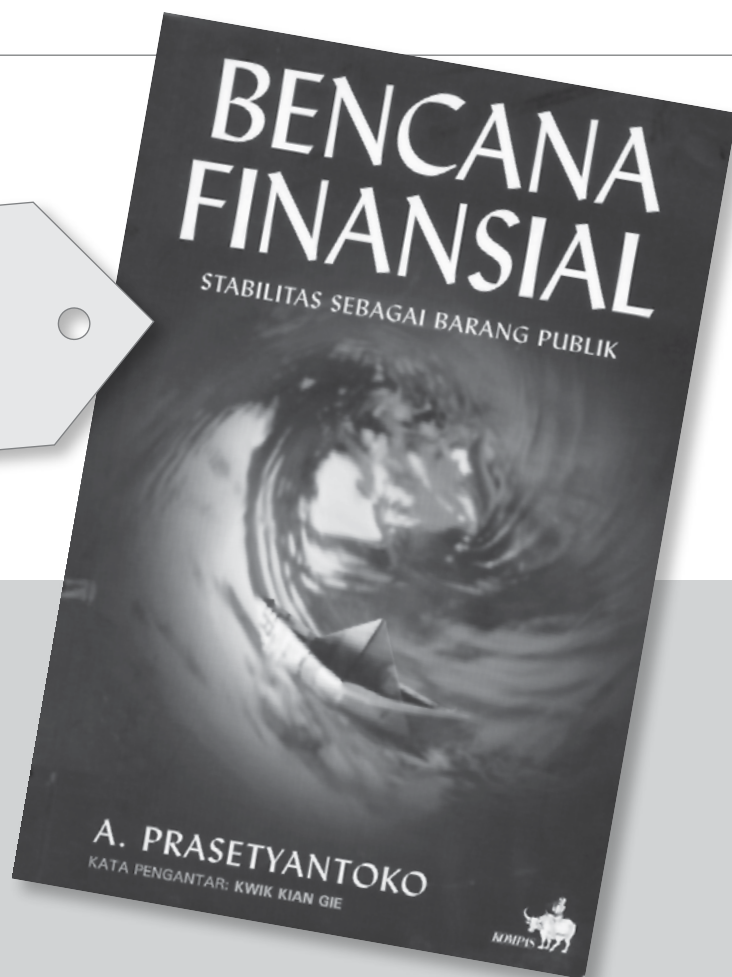
Pada intinya tuntutan Brasil dalam "Bretton Woods II" adalah penguatan Bank Dunia dan IMF, namun dengan peranan lebih besar terhadap negara-negara berkembang. Yang diajukan adalah: memajukan tahapan reformasi kuota dalam IMF, mewajibkan pengadaan progress report dalam meregulasi ekonomi, penyelesaian perundingan Doha secara cepat, dan menjadikan pertemuan puncak ekonomi di Washington sebagai institusi tetap. Dari kaca mata pemerintah, G-8 sudah berakhir, namun Brasil tetap skeptis apakah reformasi perekonomian dan arsitek keuangan benar-benar akan terjadi dan apakah dalam masa krisis asmara kilat negara-negara ekonomi maju terhadap lembaga keuangan multilateral akan bertahan lama.

Jochen Steinhilber adalah Resident Direktur Friedrich-Ebert-Stiftung Brasil



Resensi

Judul Buku : Bencana Finansial: Stabilitas sebagai Barang Publik
Penulis : A. Prasetyantoko
Penerbit : Penerbit Buku Kompas
Cetakan : Ketiga, November 2008
Tebal : xxvi + 310 halaman



KRISIS FINANSIAL GLOBAL DAN UPAYA PENCARIAN ALTERNATIF

Bagi saya, buku *Bencana Finansial: Stabilitas sebagai Barang Publik* yang ditulis oleh A. Prasetyantoko ini menarik karena setidaknya dua alasan. Pertama, buku ini memberikan suatu alternatif pandang teoritik atas teori atau ideologi dominan yang disebut dalam buku ini sebagai neoklasik atau yang sering dikenal juga sebagai neoliberal atau neoliberalisme. Di sini, neoliberalisme dimaknai dalam dua hal (Priyono, 2004), yakni: paham/agenda pengaturan masyarakat yang didasarkan pada dominasi homo-economicus atas dimensi lain dalam diri manusia (*homo culturalis*, *zoon politicon*, dan lain sebagainya); dan sebagai kelanjutan pokok pertama, neoliberalisme juga bisa dimaknai sebagai dominasi sektor finansial atas sektor riil dalam tata ekonomi politik. Menurut Herry Priyono, definisi pertama lebih merujuk pada "kolonisasi eksternal" *homo oeconomicus* atas berbagai dimensi antropologis

lain dalam multi-dimensionalitas kehidupan manusia, sedangkan definisi kedua menunjuk pada "kolonisasi internal" *homo finansialis* atas multi-dimensionalitas tata *homo oeconomicus* itu sendiri. Dalam kaitan ini, normatif etis yang biasa disebut "kebaikan bersama" (*bonum commune*) tidak lagi dianggap sebagai tujuan yang secara intensional dikejar oleh agenda ekonomi-politik (*intended motive*), tetapi hanya sebagai hasil sampingan (*unintended consequences*) kinerja ekonomi politik. Selanjutnya, melalui pergeseran ini maka proses marginalisasi berjalan sempurna karena berbagai tujuan pembangunan seperti pengentasan kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai tujuan yang secara intensional dikejar oleh kinerja ekonomi-politik. Sebaliknya, yang dikejar oleh agenda ekonomi-politik neoliberal adalah "*the accumulation of individual wealth*".

Sejak tahun 1970-an, paham

neoliberal telah menjadi mainstream kebijakan publik negara-negara di seluruh dunia, menjadi semacam, mengutip Steven Gill (2000), global constitutionalism. Banyak negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, mengambil tanpa kritik kebijakan neoliberal ini. Para penganutnya senantiasa menganjurkan bahwa jika negara-negara Dunia Ketiga ingin meraih kemajuan dan kemakmuran sebagaimana halnya negara Maju, maka mereka harus mengintegrasikan diri ke dalam pasar global (lihat, misalnya, Friedman, 2002; Wofl, 2004). IMF dan Bank Dunia serta rejim perdagangan dunia WTO menjadi "tempat bersemayam" paling nyaman neoliberalisme. Dengan demikian, pasien dan juga anggota ketiga lembaga tadi mengalami injeksi terus-menerus kebijakan yang bersandar pada neoliberalisme tersebut. Soros (1998) bahkan menuduh para penganut fundamentalisme pasar ini sebagai pihak yang telah mentransformasikan suatu

teori aksiomatik dan bebas nilai menjadi sebuah ideologi, yang mempengaruhi pelaku politik dan bisnis secara kuat dan berbahaya.

Membaca buku *Bencana Finansial* yang ditulis Prasentyantoko ini kita akan dibawa pada pembacaan teoritik sebab-sebab krisis finansial di dunia atau kapitalisme dalam pengertian yang lebih luas. Krisis finansial, sebagaimana dapat dibaca dalam buku ini, dapat dijelaskan melalui suatu perspektif teoritik yang bersumber dari pikiran-pikiran Joseph Schumpeter tentang *creative destruction* dan siklus bisnis (*business cycle*), John Mynard Keynes tentang spekulasi dan ketidakpastian, hipotesis instabilitas finansial dari Minsky hingga teori-teori yang lahir lebih belakangan seperti teori regulation, konvensi, dan teori kontemporer. Keseluruhan perspektif teoritik ini kemudian dimasukkan ke dalam perspektif heterodoks.

Paparan perspektif teoritik yang beragam ini menjadi penting sebagai sebuah tawaran alternatif atas pandangan ekonomi dominan dewasa ini, orthodox atau neolib. Seperti ditulis A. Prasentyantoko, "Perspektif heterodoks menawarkan pertautan yang lain, yang dikenal sebagai *"institutions-history-social structure"*. Gagasan ini sekaligus menjadi antitesis dari pandangan neoklasik tentang *"rationality-individualism-equilibrium"*. Selanjutnya, oleh karena ia merupakan antitesis dari pandangan ekonomi orthodox, maka gagasan-gagasan perspektif heterodoks hampir senantiasa berangkat atau berlawanan dari pandangan ekonomi orthodox.

Pandangan Schumpeter tentang moneter, misalnya, berbeda dengan pandangan para pemikir neoklasik seperti Milthon Friedman. Menurut Schumpeter (sebagaimana dikutip Prasentyantoko hal 48), sirkulasi kapital (uang) memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi kapitalis. Di sini, sistem kapitalis dianggap sebagai sistem yang tidak stabil. Instabilitas tersebut bersifat struktural yang bersumber

dari dalam sistem itu sendiri. Ini terjadi karena adanya sifat inovatif para pelaku ekonomi kapitalis. Kemudian, karena inovasi ini bersifat permanen, maka instabilitas akan senantiasa ada dalam sistem kapitalis. Pandangan ini bertolak belakang dengan para pemikir neoklasik yang mengatakan bahwa moneter bersifat netral terhadap perekonomian.

Pandangan Schumpeter terhadap persoalan keuangan juga sangat jelas. Sebagaimana dikemukakan Prasentyantoko, "Jika kita kembali pada persoalan inovasi keuangan, maka perspektif Schumpeter sangat jelas bahwa pada dasarnya pengembangan produk derivasi keuangan tidak diperlukan. Karena perbankan telah berhasil menjalankan fungsinya dengan baik, menciptakan kredit bagi sektor produktif. Dengan kata lain, inovasi tidak diperlukan dalam rangka inovasi di sektor produktif" (hal. 63). Lebih lanjut, dikatakan bahwa "Pengembangan pasar derivatif hanya akan meningkatkan perilaku spekulatif. Dan, pada dasarnya, spekulasi harus dipisahkan dari kegiatan produksi dan inovasi".

Keynes menegaskan kembali mengenai perilaku spekulatif ini. Menurutnya, (lihat hal. 71), penciptaan uang ditentukan oleh kredit. Di sini, uang seharusnya diciptakan untuk disalurkan pada sektor produktif sebagai kredit sehingga uang akan meningkatkan kapasitas produktif, lapangan kerja, pendapatan nasional, dan akhirnya mendorong sisi permintaan. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai "the principle of effective demand", yang bertentangan dengan neoklasik yang lebih menekankan pada sisi penawaran. Keynes juga berbeda dengan para pemikir neoklasik mengenai sifat rasionalitas manusia dan informasi. Bagi para ekonom neoklasik, manusia adalah makhluk paling rasional dan pasar menyediakan informasi yang lengkap sehingga masa depan dapat diprediksi dan diteropong dari masa sekarang. Menurut Keynes, tidak ada satupun

cara yang memadai untuk meramalkan masa depan. Individu juga senantiasa dihadapkan pada situasi ketidakpastian yang sangat tinggi. Dalam kenyataannya, pasar juga tidak pernah menyedikan informasi secara lengkap. Sebaliknya, senantiasa terjadi ketidakseimbangan informasi sehingga keuntungan tidak pernah terdistribusikan secara merata (Stiglitz, 2002).

Instabilitas sekali lagi mendapatkan penekanannya oleh anak didik Schumpeter dan pengaruh Keynes, Hyman Minsky. Prasentyantoko memaparkan gagasan Minsky mengenai "Hipotesis Instabilitas Finansial" pada bab 4. Di sini, dijelaskan bahwa sumber instabilitas adalah stabilitas itu sendiri. "Jika ekonomi berjalan stabil, maka para pelaku ekonomi cenderung ekspansif dan kurang hati-hati dalam berutang. Akibatnya, situasi berubah menjadi mengarah pada instabilitas sehingga sumber instabilitas adalah situasi stabil dimana perilaku agen ekonomi menjadi cenderung spekulatif" (lihat hal 86). Keynes menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa keputusan para agen ekonomi sangat dipengaruhi oleh harapan di masa datang. Padahal, masa depan itu sendiri, mengandung ketidakpastian. Minsky mengatakan bahwa para agen ekonomi sangat mungkin salah dalam mengantisipasi masa depan sehingga keputusan hari ini menjadi sangat tidak rasional.

Dalam memaparkan perspektif teoritik, Prasentyantoko tidak hanya berhenti pada teori Hipotesis Instabilitas Finansial Minsky yang sebenarnya masih senafas dengan Schumpeter dan Keynes. Ia juga memaparkan teori-teori yang lahir lebih belakangan, dan kemudian ditambah dengan suatu perspektif empiris mengenai krisis Subprime Mortgage di Amerika Serikat, Krisis Asia, dan "*Balance Sheet Effect*" di Indonesia yang membuat buku ini menjadi semakin menarik.

Alasan kedua menariknya buku ini adalah pengajuan pertanyaan dasar

yang berusaha dijawab dalam buku ini, yakni "Jika ternyata investasi tidak mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara baik dan berkualitas, menjadi pertanyaan serius apakah investasi tersebut memang benar-benar sebagai kekuatan atau justru menjadi kelemahan?" (hal. 36). Investasi yang dimaksud adalah investasi di sektor finansial, yang menurut Prasetyantoko menjadi hegemonik karena tiga alasan, yakni globalisasi pasar finansial; deregulasi pasar domestik; dan inovasi produk-produk finansial. Dalam era kapitalisme global sekarang, tidak dapat disangkal bahwa modal uang karena sifatnya yang lebih mobile dibandingkan dengan investasi fisik menempati posisi istimewa (Soros, 1998). Namun, ironisnya, mobilitas uang ini pulalah yang menjadi akar penyebab krisis moneter pada penghujung 2007 di AS dan penghujung 1997 di Asia. Dalam kaitan ini, kesalahan paling fatal masyarakat modern yang berada dalam kungkungan kapitalisme global adalah keberaniannya dalam mengubah uang tidak lagi sebagai alat tukar semata, tetapi juga menjadi komoditas. Dan, ketika alat tukar tersebut diperdagangkan, menjadi alat spekulasi, krisis finansial menjadi tidak terelakan. Pengangguran dan kemiskinan tidak dapat diatasi karena uang lebih diinvestasikan di sektor finansial dibandingkan di sektor riil. Akibatnya, pasar dan lebih-lebih pasar finansial tidak akan pernah mampu mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Sesuatu yang justru sebaliknya terjadi. Krisis di sektor finansial membuat sektor riil macet bahkan mengalami kebangkrutan. Jika dibiarkan, maka akan tercipta pengangguran dalam jumlah besar. Krisis Asia akhir 1997 dan krisis finansial AS penghujung 2007 menjadi contoh paling konkret mengenai hal ini. Pertanyaan kritis mengenai investasi yang tidak mampu menggerakkan pertumbuhan sehat yang diajukan oleh Prasetyantoko ini mestinya menjadi

bahan renungan mendalam bagi akademisi dan para pengambil kebijakan publik. Utamanya, yang berasal dari pemikir ekonomi orthodox.

Kritik Atas Buku Ini

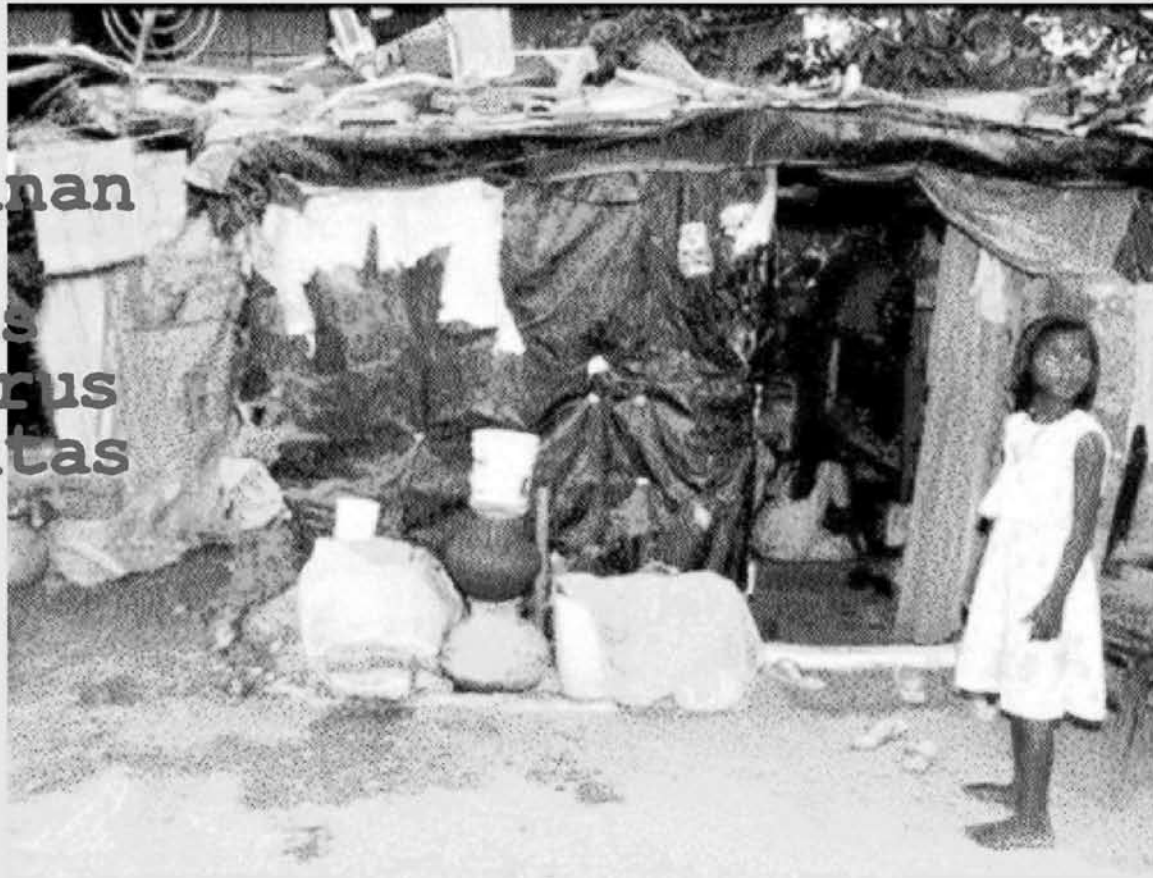
Tidak ada sebuah karya yang paripurna. Setiap karya, sebesar apapun sumbangannya bagi dunia akademis dan praktis, tidak akan pernah lepas dari kekurangan. Salah satu kekurangan buku ini, menurut saya dan mudah-mudahan saya keliru, adalah miskinnya tawaran solutif atas problem instabilitas finansial. Jika kita baca dengan seksama bagian penutup buku ini, maka kita akan menemukan beberapa rekomendasi yang lebih mengarah pada studi lebih lanjut atas berbagai isu atau lebih tepatnya agenda penelitian. Ini menunjukkan bahwa penulis masih bias akademis. Padahal, niatan awal yang dibangun dalam penulisan buku ini adalah bagaimana buku ini dapat ditulis secara populer sehingga tidak tampak terlalu akademis. Meskipun, penulis tidak menjelaskan secara gamblang mengapa harus ditulis secara populer. Jika buku ini juga diabdikan untuk kalangan yang lebih luas, para pengambil kebijakan publik, misalnya, maka nilai tambah yang mestinya lebih dipertajam adalah rekomendasi kebijakan. Misalnya, menghadapi instabilitas keuangan yang *embeded* dalam sistem kapitalisme seperti sekarang ini kebijakan apa yang harus dilakukan? Di sini, penyelesaian tidak cukup berhenti pada rekomendasi penelitian di bidang sinkronisasi sektor finansial dengan sektor-sektor lainnya, terutama sektor riil, misalnya, (lihat hal 278) karena persoalannya kemudian jika ditemukan bahwa sektor finansial tidak sinkron dengan sektor lainnya, dan menurut saya ini yang terjadi, terus apa yang harus dilakukan? Memberikan regulasi yang ketat atas sektor finansial ataukah, seperti dikemukakan Schumpeter, inovasi di sektor ini tidak diperlukan? Dengan kata lain, sektor finansial yang bersifat spekulatif harus

dihancurkan. Sayangnya, isu ini tidak cukup mendapatkan ruang dalam buku ini.

Ketiadaan rekomendasi kebijakan yang lebih memadai pada akhirnya membuat pandangan yang ditegaskan dalam buku ini bahwa stabilitas finansial sebagai barang publik dan karenanya negara harus campur tangan tidak terjawab. Meskipun, seperti dikemukakan penulis, usaha merumuskan hal tersebut menjadi tugas bersama. Seperti dikemukakan Prasetyantoko pada bab pendahuluan, "Dan, karena instabilitas finansial bisa menjadi sumber kekacauan yang merugikan kepentingan bersama, menjadi tugas bersama untuk menjaga agar pasar finansial bisa dikelola dan dikendalikan". Jadi, memang bukan niatan buku ini, barangkali, untuk menawarkan suatu alternatif solusi atas bencana finansial karena niatan dasarnya adalah untuk menawarkan perspektif alternatif sehingga kita mempunyai pemahaman yang lebih lengkap mengenai instabilitas finansial. Kemudian, tugas untuk menciptakan stabilitas dan meminimalkan instabilitas menjadi tugas bersama. Inilah barangkali yang menjadi kendala paling besar sebagaimana sering dikemukakan bahwa para pemikir kritis menjadi begitu canggih dalam memaparkan kegagalan ekonomi neoklasik, tetapi tampak begitu "mandul" ketika harus menyodorkan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Meskipun demikian, saya kira, perspektif alternatif yang ditawarkan dalam buku ini tetap mempunyai ketajaman analisis yang cukup membantu kita memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi, krisis finansial yang membangkrutkan lembaga-lembaga keuangan AS baru-baru ini.

Puji Rianto adalah Anggota Redaksi Pelaksana Jurnal Demokrasi Sosial, dan Direktur Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Yogyakarta.***

**Kemiskinan
adalah
Realitas
yang harus
diberantas**



Kemiskinan Bukanlah Komoditas
Untuk Diperdagangkan Demi Kepentingan Politik Tertentu



*“kemiskinan adalah
pangkal dari kekufuran”*

Iklan layanan ini dipersembahkan oleh:

**Yayasan Indonesia Kita
&
Pergerakan Indonesia**

Nasib memang beda, Pilihan Partai boleh beda,
Hanya satu yang sama, harus berubah,
berkembang dan berkeadilan sosial.



iklan layanan ini dipersembahkan

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG
Committed to Social Democracy

Jurnal
Sosial Demokrasi

**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**
Committed to Social Democracy



Jurnal
Sosial Demokrasi



Bila kita hendak mengentaskan kemiskinan, kita harus berikan kekuasaan, pengetahuan, tanah, kredit dan organisasi ke tangan si miskin.

